



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LAPORAN KEUANGAN

PER
31 DESEMBER
2024

BADAN PENDAPATAN DAERAH





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Laporan Keuangan
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Per 31 Desember 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah dapat disusun dan disajikan dengan baik.

Laporan keuangan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perangkat daerah selama periode laporan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan adalah proses yang memerlukan ketelitian dan keterbukaan. Oleh karena itu, laporan ini telah disusun dengan penuh kehatian dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan yang berharga dalam penyusunan laporan ini.

Kami berharap laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna dan memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran dari berbagai pihak akan sangat kami hargai untuk penyempurnaan laporan ke depan.

Lombok Tengah, Januari 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,



BAIQ ALUH WINDAYU WIRANOM, S.E., MM.
NIP. 197307291997032008

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dan bebas salah saji yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kab. Lombok Tengah, Januari 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,



BAIQ ALUH WINDAYU WIRANOM, S.E., MM.
NIP. 197307291997032008

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vii
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	1
II. NERACA.....	6
III. LAPORAN OPERASIONAL (LO)	9
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE).....	12
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK).....	14
BAB I PENDAHULUAN	14
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	14
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	17
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	18
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR	
PENCAPAIAN KINERJA APBD	20
2.1 Kebijakan Keuangan	20
2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	21
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	25
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	
Secara Umum	25
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target	
yang Telah Ditetapkan	27
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	28
4.1 Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan	28
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan	
Keuangan SKPD	29
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan	
Keuangan SKPD	29
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan	
Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi	
Pemerintahan SKPD.....	33

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	46
5.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	46
5.2 Pos-pos Neraca.....	56
5.3 Pos-pos Laporan Operasional.....	67
5.4 Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	79
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN.....	80
6.1 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah	80
6.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah	80
BAB VII PENUTUP	82
LAMPIRAN.....	48

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2.1 Anggaran Pendapatan dan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024.....	20
Tabel 2.2 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024	22
Tabel 2.3 Realisasi Program dan Kegiatan APBD Dinas/Badan..... Tahun 2024 ..	23
Tabel 3.1 Pencapaian Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	25
Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	46
Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah.....	47
Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Jenis Pendapatan Retribusi Daerah.....	48
Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah.....	49
Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ..	49
Tabel 5.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah.....	50
Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi.....	50
Tabel 5.8 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai	51
Tabel 5.9 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa	53
Tabel 5.10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal	53
Tabel 5.11 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	54
Tabel 5.12 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) LRA	55
Tabel 5.13 Rincian	56
Tabel 5.14 Rincian Aset Lancar.....	56
Tabel 5.15 Rincian Kas dan Setara Kas.....	57
Tabel 5.16 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan.....	57
Tabel 5.17 Rincian Piutang Pendapatan	58
Tabel 5.18 Daftar Piutang Pajak Daerah.....	58
Tabel 5.19 Daftar Piutang Retribusi	58
Tabel 5.20 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah.....	59
Tabel 5.21 Persediaan	60
Tabel 5.22 Daftar Nilai Aset Tetap.....	60
Tabel 5.23 Daftar Nilai Aset Tetap Tanah.....	61
Tabel 5.24 Aset Tetap Peralatan dan Mesin	61
Tabel 5.25 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024	62
Tabel 5.26 Aset Tetap Gedung dan Bangunan	62
Tabel 5.27 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	62

Tabel 5.28 Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	63
Tabel 5.29 Penambahan dan Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024	63
Tabel 5.30 Aset Tetap Lainnya	64
Tabel 5.31 Rincian Kewajiban.....	65
Tabel 5.32 Rincian Kewajiban Jangka Pendek.....	65
Tabel 5.33 Pendapatan Diterima Dimuka.....	65
Tabel 5.34 Rincian Utang Belanja	65
Tabel 5.35 Rincian Utang Belanja Pegawai	66
Tabel 5.36 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa	66
Tabel 5.37 Rincian Pendapatan - LO.....	67
Tabel 5.38 Pendapatan Asli Daerah – LO	67
Tabel 5.39 Rincian Pendapatan Asli Daerah	68
Tabel 5.40 Rincian Pendapatan Pajak Daerah– LO.....	69
Tabel 5.41 Penjelasan Selisih Pendapatan Pajak Daerah - LO	70
Tabel 5.42 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah– LO	70
Tabel 5.43 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO.....	71
Tabel 5.44 Rincian Beban.....	71
Tabel 5.45 Rincian Beban Operasional	72
Tabel 5.46 Rincian Beban Pegawai	72
Tabel 5.47 Penjelasan Selisih Beban Pegawai LO	73
Tabel 5.48 Rincian Beban Barang dan Jasa.....	73
Tabel 5.49 Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa-LO.....	74
Tabel 5.50 Rincian Beban Penyisihan	75
Tabel 5.51 Rincian Beban Peenyusutan dan Amortisasi	75
Tabel 5.52 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	76
Tabel 5.53 Rincian Surplus Non Operasional.....	76
Tabel 5.54 Rincian Defisit Non Operasional.....	76
Tabel 5.55 Rincian Beban Luar Biasa	77
Tabel 5.56 Rincian Surplus/(Defisit) – LO.....	77
Tabel 5.57 Ekuitas Awal - LO	79
Tabel 5.58 Surplus/(Defisit)-LO	79
Tabel 5.59 Rincian Ekuitas Akhir.....	79

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Jurnal Penyesuaian/Jurnal Umum 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024
- Lampiran 2 : Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD Tahun 2024
- Lampiran 3 : Berita Acara Opname Persediaan dan Daftar Persediaan Per 31 Desember 2024
- Lampiran 4 : Berita Acara Penutupan Kas Per 31 Desember 2024
- Lampiran 5 : Kertas Kerja Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024
- Lampiran 6 : Kertas Kerja Piutang Per 31 Desember 2024
- Lampiran 7 : Laporan Keuangan SKPD Rinci sd Level 6 (LRA, LO, Neraca, LPE)
- Lampiran 8 : Kertas Kerja Laporan Operasional



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK T ENGAH

Badan Pendapatan Daerah
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Per 31 Desember 2024 dan 2023



PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

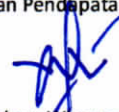


Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) * 100$	6
4	PENDAPATAN DAERAH	181.460.899.220,00	183.860.737.486,12	101,32	150.940.558.113,14
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	181.460.899.220,00	183.860.737.486,12	101,32	150.940.558.113,14
4.1.01	Pajak Daerah	181.460.899.220,00	182.328.157.865,50	100,48	147.240.146.529,07
4.1.01.06	Pajak Hotel	29.926.836.083,87	30.777.229.162,79	102,84	31.017.043.511,84
4.1.01.07	Pajak Restoran	26.557.660.472,48	27.212.701.343,48	102,47	26.121.087.581,04
4.1.01.08	Pajak Hiburan	639.694.120,00	635.378.016,00	99,33	8.813.025.350,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.631.245.928,00	1.947.094.265,00	74,00	2.474.103.456,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	23.073.604.102,00	23.073.604.102,00	100,00	27.939.630.764,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	1.186.539.192,00	1.206.617.014,00	101,69	2.466.398.329,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	10.775.373.200,00	487.944.413,00	4,53	327.308.567,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	8.704.315.763,00	4.350.000,00	0,05	18.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.750.278.803,00	3.549.329.804,00	202,79	1.348.208.186,58
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	24.110.079.000,00	16.013.894.795,00	66,42	17.149.230.084,61
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	29.000.000.000,00	35.702.051.083,00	123,11	29.566.110.699,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu ([],PBJT),	23.105.272.555,65	41.717.963.867,23	180,56	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	975.000,00	0,00	1.024.808.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00		0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	0,00	975.000,00		1.024.808.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00		0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	1.531.604.620,62	0,00	2.675.603.584,07
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	0,00		0,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	736.441.127,07		1.826.356.903,53
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00		0,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	795.163.493,55		849.246.680,54
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00		0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00		0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	0,00	0,00		0,00
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00		0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	181.460.899.220,00	183.860.737.486,12	101,32	150.940.558.113,14
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00		0,00
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	0,00		0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00		0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	181.460.899.220,00	183.860.737.486,12	101,32	150.940.558.113,14

5	BELANJA DAERAH	21.471.316.126,00	17.256.034.294,00	80,37	16.249.019.064,00
5.1	BELANJA OPERASI	20.759.276.318,00	16.561.653.444,00	79,78	15.619.566.664,00
5.1.01	Belanja Pegawai	18.210.311.668,00	14.447.736.632,00	79,34	13.777.145.811,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.640.635.629,00	6.441.166.886,00	97,00	6.212.402.203,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.483.149.078,00	2.416.623.721,00	97,32	2.363.742.345,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.086.526.961,00	5.589.946.025,00	61,52	5.201.001.263,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	0,00		0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00		0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	0,00	0,00		0,00
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00		0,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00		0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.548.964.650,00	2.113.916.812,00	82,93	1.842.420.853,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.577.393.340,00	1.360.306.950,00	86,24	1.004.623.510,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	527.992.310,00	390.771.482,00	74,01	641.552.265,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	48.750.000,00	38.750.000,00	79,49	118.260.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	394.829.000,00	324.088.380,00	82,08	77.985.078,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00		0,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00		0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00		0,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00		0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00		0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00		0,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	0,00	0,00		0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00		0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	20.759.276.318,00	16.561.653.444,00	79,78	15.619.566.664,00
5.2	BELANJA MODAL	712.039.808,00	694.380.850,00	97,52	629.452.400,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	712.039.808,00	694.380.850,00	97,52	629.452.400,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00		0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00		444.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00		0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00		0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	406.840.448,00	406.031.850,00	99,80	5.116.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00		10.116.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00		0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00		0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	305.199.360,00	288.349.000,00	94,48	170.220.400,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00		0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00		0,00
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00		0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00		0,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00		0,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00		0,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	0,00	0,00		0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00		0,00

5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00		0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	0,00	0,00		0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00		0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00		0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00		0,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00		0,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00		0,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00		0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00		0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	712.039.808,00	694.380.850,00	97,52	629.452.400,00
	JUMLAH BELANJA	21.471.316.126,00	17.256.034.294,00	80,37	16.249.019.064,00
	SURPLUS/DEFISIT	159.989.583.094,00	166.604.703.192,12	104,13	134.691.539.049,14
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00		0,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0,00	0,00		0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	159.989.583.094,00	166.604.703.192,12	104,13	134.691.539.049,14

Kab. Lombok Tengah, 31 Desember 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah



Baiq Aluh Windayu Wiranom, S.E.,M.M.
NIP. 197307291997032008



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Badan Pendapatan Daerah

NERACA

Per 31 Desember 2024 dan 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
NERACA



PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

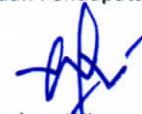
(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF KALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
ASET	5.3.1	38.585.930.317,95	42.424.128.527,14
ASET LANCAR	5.3.1.1	34.973.588.378,12	39.154.782.750,31
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	-	3.909.000,00
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	-	3.909.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	-	-
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	-	-
Kas di Bendahara BOSP	5.3.1.1.1.5	-	-
Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)	5.3.1.1.1.6	-	-
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.7	-	-
Piutang	5.3.1.1.2	88.187.517.626,14	80.096.311.526,81
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.1	86.378.017.612,07	78.286.811.512,74
Piutang Retribusi	5.3.1.1.2.2	1.713.434.474,33	1.713.434.474,33
Piutang Hasil Pengeloan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.3.1.1.2.3	-	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.4	96.065.539,74	96.065.539,74
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.2.5	-	-
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.1.2.6	-	-
Piutang Lainnya	5.3.1.1.2.7	-	-
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.3	(53.499.211.507,02)	(41.227.059.459,50)
Penyisihan piutang Pendapatan	5.3.1.1.3.1	(53.499.211.507,02)	(41.227.059.459,50)
Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.1.3.2	-	-
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.4	-	-
Persediaan	5.3.1.1.5	285.282.259,00	281.621.683,00
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2	-	-
Investasi Non Permanen	5.3.1.2.1	-	-
Dana Bergulir	5.3.1.2.1.1	-	-
Penyisihan dana bergulir	5.3.1.2.1.2	-	-
Investasi Permanen	5.3.1.2.2	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1	-	-
ASET TETAP	5.3.1.3	3.500.959.335,11	3.157.963.172,11
Tanah	5.3.1.3.1	400.000.000,00	400.000.000,00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	6.283.718.804,23	5.598.030.954,23
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	3.032.648.378,00	3.032.648.378,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	284.666.000,00	284.666.000,00
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	-	-
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(6.500.073.847,12)	(6.157.382.160,12)
PROPERTI INVESTASI	5.3.1.4	-	-
Properti Investasi Tanah	5.3.1.4.1	-	-
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.1.4.2	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.4.3	-	-
ASET LAINNYA	5.3.1.5	111.382.604,72	111.382.604,72
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.1	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.2	-	4
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.3	-	-
Aset Lain-lain	5.3.1.5.4	111.382.604,72	111.382.604,72
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.5.5	-	-

KEWAJIBAN	5.3.2	171.469.811,00	2.388.993.763,92
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1	171.469.811,00	2.388.993.763,92
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	-	-
Utang Bunga	5.3.2.1.2	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.3	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.4	-	687.737.595,92
Utang Belanja dan transfer	5.3.2.1.5	171.469.811,00	1.701.256.168,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.6		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	5.3.2.2.1	-	-
EKUITAS	5.3.3	38.414.460.506,95	40.035.134.763,22
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		38.585.930.317,95	42.424.128.527,14

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kab. Lombok Tengah, 31 Desember 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah



Baiq Aluh Windayu Wiranom, S.E.,M.M.
NIP. 197307291997032008



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Badan Pendapatan Daerah
LAPORAN OPERASIONAL
Per 31 Desember 2024 dan 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL




UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	REF	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
KEGIATAN OPERASIONAL	5.4				
PENDAPATAN DAERAH - LO	5.4.1	192.639.681.181,37	152.515.911.185,91	40.123.769.995,46	26,31
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	5.4.1.1	192.639.681.181,37	152.515.911.185,91	40.123.769.995,46	26,31
Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	191.107.101.560,75	148.750.476.819,82	42.356.624.740,93	28,47
Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	975.000,00	1.102.180.000,00	(1.101.205.000,00)	(99,91)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	-	-	-	#DIV/0!
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.4	1.531.604.620,62	2.663.254.366,09	(1.131.649.745,47)	(42,49)
PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2	-	-	-	#DIV/0!
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA	5.4.1.2.1	-	-	-	#DIV/0!
Dana Bagi Hasil - LO	5.4.1.2.1.1	-	-	-	#DIV/0!
Dana Alokasi Umum - LO	5.4.1.2.1.2	-	-	-	#DIV/0!
Dana Alokasi Khusus-Fisik - LO	5.4.1.2.1.3	-	-	-	#DIV/0!
Dana Alokasi Khusus- Non Fisik - LO	5.4.1.2.1.4	-	-	-	#DIV/0!
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LO	5.4.1.2.2	-	-	-	#DIV/0!
Dana Insentif Daerah (DID) - LO	5.4.1.2.2.1	-	-	-	#DIV/0!
Dana Desa - LO	5.4.1.2.2.2	-	-	-	-
TRANSFER ANTAR DAERAH - LO	5.4.1.2.3	-	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Bagi Hasil - LO	5.4.1.2.3.1	-	-	-	#DIV/0!
Bantuan Keuangan - LO	5.4.1.2.3.2	-	-	-	#DIV/0!
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.4.1.3	-	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3.1	-	-	-	#DIV/0!
Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	5.4.1.3.2	-	-	-	#DIV/0!
BEBAN DAERAH	5.4.2	28.228.421.134,00	22.569.470.693,10	5.658.950.440,90	25,07
BEBAN OPERASI	5.4.2.1	28.228.421.134,00	22.569.470.693,10	5.658.950.440,90	25,07
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	12.916.629.614,00	14.594.367.457,00	(1.677.737.843,00)	(11,50)
Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	2.120.269.897,00	2.072.367.819,00	47.902.078,00	2,31
Beban Bunga	5.4.2.2	-	-	-	#DIV/0!
Beban Subsidi	5.4.2.3	-	-	-	-
Beban Hibah	5.4.2.4	-	-	-	#DIV/0!
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.5	-	-	-	#DIV/0!
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.6	12.848.829.936,00	5.681.161.256,10	7.167.668.679,90	126,17
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.7	342.691.687,00	221.574.161,00	121.117.526,00	54,66
BEBAN TRANSFER	5.4.2.8	-	-	-	#DIV/0!
Beban Bagi Hasil	5.4.2.8.1	-	-	-	#DIV/0!
Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.8.2	-	-	-	#DIV/0!
BEBAN TAK TERDUGA	5.4.2.9	-	-	-	-
Beban tak terduga	5.4.2.9.1	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	5.4.3	164.411.260.047,37	129.946.440.492,81	34.464.819.554,56	26,52

KEGIATAN NON OPEASIONAL	5.4.4				
SURPLUS NON OPERASIONAL	5.4.4.1	576.677.888,48	-	576.677.888,48	#DIV/0!
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	5.4.4.1		-		
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.4.1	576.677.888,48		576.677.888,48	#DIV/0!
DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.4.2	-	-	-	#DIV/0!
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	5.4.4.2		-		
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.4.2	-		-	#DIV/0!
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON - OPERASIONAL		576.677.888,48	-	576.677.888,48	#DIV/0!
POS LUAR BIASA	5.4.5				
Pendapatan Luar Biasa	5.4.5				
Beban Luar Biasa	5.4.5	-		-	#DIV/0!
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	5.4.6	-	-	-	#DIV/0!
SURPLUS/DEFISIT LO	5.4.7	164.987.937.935,85	-	164.987.937.935,85	#DIV/0!

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kab. Lombok Tengah, 31 Desember 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah


Baiq Aluh Windayu Wiranom, S.E.,M.M.
NIP. 197307291997032008



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Badan Pendapatan Daerah

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Per 31 Desember 2024 dan 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023



No	Uraian	REF CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	40.035.134.763,22	44.032.719.876,57
2	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	5.6.2	164.987.937.935,85	130.733.441.861,93
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3	-	-
	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	5.6.3.1	-	-
	KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	5.6.3.2	-	-
	LAIN-LAIN	5.6.3.3	-	-
4	RK PPKD	5.6.4	(166.608.612.192,12)	(134.731.026.975,28)
5	EKUITAS AKHIR	5.6.5	38.414.460.506,95	40.035.134.763,22

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kab. Lombok Tengah, 31 Desember 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah

Baiq Aluh Windayu Wiranom, S.E.,M.M.
NIP. 19730729197032008



**PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Per 31 Desember 2024 dan 2023

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan Pemerintahan Negara dan Pembangunan Nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terbagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara dalam Rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan ketentuan pada peraturan-peraturan tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan Pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan bagi BLUD ditambah Laporan Perubahan Anggaran Saldo Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi yang akurat dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan pelaksanaan anggaran untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 17/2023, UU No. 1/2004, PP No. 12/2019, PP No. 71/2010, Perda No. 03/2022, Perbub No. 50/2022, Perbub No. 51/2022.

Maksud dari laporan keuangan ini adalah:

- a. *Menunjukkan Transparansi Keuangan*: Menyediakan gambaran yang jelas tentang pengelolaan keuangan dan sumber daya yang dikelola, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.
- b. *Memperkuat Akuntabilitas*: Memberikan bukti bahwa semua transaksi keuangan telah diproses dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta menunjukkan tanggung jawab pengelola keuangan dalam menjalankan amanah yang diberikan.
- c. *Menggambarkan Kinerja Keuangan*: Menyajikan hasil pencapaian target anggaran, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, untuk memberikan wawasan mengenai efektivitas penggunaan anggaran.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan ini meliputi beberapa aspek penting sebagai berikut:

- a. *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas*: Laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga semua pemangku kepentingan dapat memahami dan mengevaluasi kinerja keuangan SKPD.
- b. *Memberikan Informasi yang Relevan dan Akurat*: Menyediakan data keuangan yang relevan, akurat, dan lengkap mengenai sumber daya ekonomi, posisi dan kondisi keuangan, perubahan dan potensi keuangan serta realisasi anggaran, aset, kewajiban, dan perubahan ekuitas untuk mendukung analisis dan evaluasi oleh pihak internal dan eksternal.
- c. *Mendukung Pengambilan Keputusan*: Menyajikan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, baik untuk perencanaan anggaran di masa depan maupun untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan saat ini.
- d. *Mematuhi Peraturan dan Standar Akuntansi*: Memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar akuntansi pemerintah, untuk menjaga integritas dan keandalan laporan.
- e. *Menilai Efektivitas Pengelolaan Anggaran*: Menyediakan ikhtisar mengenai pencapaian target anggaran dan evaluasi atas perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut.
- f. *Mencerminkan Kinerja Keuangan*: Menggambarkan hasil dari pengelolaan keuangan selama periode laporan, serta menyajikan informasi yang diperlukan untuk memahami pencapaian dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan anggaran.

Dengan adanya laporan keuangan ini, diharapkan dapat menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan /ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi keuangan SKPD di Kabupaten Lombok Tengah dan mendukung upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran di masa yang akan datang.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan kegiatan SKPD Kabupaten Lombok Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: *Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*);
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Indonesia Nomor 47;
3. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangun dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang di haruskan dan dianjurkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang di perlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Kebijakan Keuangan
- 2.2. Indikator pencapaian target kinerja Keuangan

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 1.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD/BLUD
- 1.2. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- 1.4. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD/BLUD

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN

BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR
PENCAPAIAN TARGET IKHTISAR dan KINERJA KEUANGAN

2.1 KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2024 disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 dan APBD Perubahan disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2024.

Terkait dengan Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran setelah Perubahan	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5=4-3	6=(5/3)*100
I	Pendapatan				
1	Pajak Daerah	178.960.899.220,00	181.460.899.220	2.500.000.000,00	1,38
	Jumlah Pendapatan	178.960.899.220,00	181.460.899.220,00	2.500.000.000,00	1,38
II	Belanja				
1	Belanja Pegawai	17.963.462.403,00	18.210.311.668,00	246.849.265,00	1,36
2	Belanja Barang dan Jasa	2.437.584.634,00	2.548.964.650,00	111.380.016,00	4,37
3	Belanja Modal	823.437.741,00	712.039.808,00	(Rp111.397.933,00)	(15,64)
	Jumlah Belanja	21.224.484.778,00	21.471.316.126,00	246.831.348,00	1,16
	Deficit/Surplus	158.559.852.183,00	160.701.622.902,00	2.141.770.719,00	1,35

Menyikapi Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan adanya perubahan APBD Tahun 2024 tersebut diatas, beberapa strategi yang ditempuh oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, dengan melakukan kebijakan antara lain:

- 1) Upaya peningkatan pendapatan yang menjadi leading sektor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, dengan melakukan kebijakan antara lain:
 - a. Memberdayakan Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan sebagai pengganti sedahan untuk melakukan pemungutan PBB-P2 di wilayah masing-masing.
 - b. Membentuk tim satgas PAD untuk mengoptimalkan pengelolaan penerimaan pajak daerah.

- c. Melakukan sensus pajak daerah PBJT hotel dan PBJT makanan dan minuman di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
 - d. Membagi seluruh bidang dan sekretariat lingkup Bapenda untuk mengkoordinir pengelolaan pajak daerah di masing-masing kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 2) Upaya penghematan Belanja, dengan melakukan kebijakan antara lain:
- a. Melakukan MOU pembayaran online pajak daerah dengan Bank NTB Syariah.
 - b. Memfasilitasi Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan secara bertahap mini printer bluetooth untuk kemudahan pembayaran PBB-P2.
- Ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan menjadi faktor pembatas dalam mewujudkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah antara lain:
- a. Kurangnya ketersediaan SDM pegawai Bapenda yang mengelola objek pajak. Jumlah SDM Bapenda tidak sebanding dengan potensi objek pajak yang dikelola.
 - b. Kendaraan roda 4 yang dimiliki sudah kurang layak untuk melakukan pengelolaan pajak daerah di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

2.2 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, dan mendukung berbagai kegiatan operasional lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kabupaten Lombok Tengah. Semua ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam konteks penganggaran berdasar Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 pada masing-masing program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yaitu:

1) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tujuan Program ini meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui pertumbuhan realisasi penerimaan PAD. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 (satu) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp. 1.176.989.387,00 terealisasi senilai Rp. 901.747.400,00 atau 76,61%

2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan Program ini mendukung peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui pertumbuhan realisasi PAD. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan ini 6 (enam) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp. 20.294.326.739,00 terealisasi senilai Rp. 16.358.036.894,00 atau 80,60%.

Ditinjau Dari konteks PP 71 Tahun 2010 terkait penyajian laporan keuangan sesuai SAP, target dan realisasi keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

Tabel 2.2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	% dari Anggaran
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100
I	Pendapatan				
1	PAD	178.960.899.220,00	181.460.899.220,00	183.860.737.486,12	101,32
	Jumlah Pendapatan	178.960.899.220,00	181.460.899.220,00	183.860.737.486,12	101,32
II	Belanja				
1	Belanja Operasi				
1.1	Belanja Pegawai	17.963.462.403,00	18.210.311.668,00	14.447.736.632,00	79,34
1.2	Belanja Barang	2.437.584.634,00	2.548.964.650,00	2.113.916.812,00	82,93
2	Belanja Modal				
2.2	Belanja Modal Peralatan Mesin	823.437.741,00	712.039.808,00	694.380.850,00	97,52
	Jumlah Belanja	21.224.484.778,00	21.471.316.126,00	17.256.034.294,00	80,37

Realisasi pendapatan lebih tinggi dari anggarannya senilai Rp. 2.399.838.266,12 atau 101.32%, hal ini terjadi karena:

- Realisasi beberapa jenis pajak yang nilainya besar melampaui lebih dari 100%.
- Frekuensi tim bapenda turun lapangan yang lebih banyak dan intens.

Realisasi Belanja lebih rendah dari anggarannya senilai Rp. 4.215.281.832,00 atau 80,37%, disebabkan karena:

- Perjalanan dinas dianggarkan dengan personal dengan biaya terbanyak (golongan IV) sementara realisasinya dilakukan juga oleh golongan III dan II.
- Petugas sensus pajak daerah hanya 39 orang dari anggaran 40 orang (1 orang mengundurkan diri)
- Target sensus pajak daerah 2.000 objek tidak tercapai.
- Terdapat selisih harga antara DPA dengan realisasi karena hasil negosiasi harga pembelian barang dan jasa dengan penyedia tanpa mengurangi spesifikasi dan realisasi fisik.

Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah atas pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam DPA/DPPA tahun anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.3. Realisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100
I	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatkan realisasi penerimaan PAD	100%		
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Input : 1.176.989.387,00	100%	901.747.400,00	76.61
		Output :	100%		
		Outcome : Persentase tata Kelola pendapatan daerah sesuai standar pengelolalan pendapatan	100%		
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	B Predikat		
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input : Rp.91.979.160,00	100%	Rp77.180.400,00	83.91
		Output :			
		Outcome : Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	33 dokumen		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Input : Rp18.220.577.348,00		Rp14.456.836.632,00	79.34
		Output :			
		Outcome : Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	23 dokumen		
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Input : Rp1.711.065.921,00		Rp1.607.764.130,00	

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
		Output :			
		Outcome : Laporan administrasi umum perangkat daerah	9 laporan		
4	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Input : Rp103.846.000,00	100%	Rp87.322.877,00	
		Output :			
		Outcome : Persentase layanan pemerintahan daerah	100%		
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Input : Rp166.858.310,00	100%	Rp128.932.855,00	
		Output :			
		Outcome : persentase barang milik daerah kondisi baik	100%		

(sumber data: DPA/DPPA, Laporan Kegiatan, LRA)

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SECARA UMUM

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelayanan masyarakat yang secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati. Pencapaian Kinerja Keuangan tergambar pada pencapaian realisasi anggaran tahun 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

Tabel 3.1. Pencapaian Realisasi Anggaran tahun 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi (Rp)		% Tahun 202n	
			Tahun 2024	Tahun 2023	Anggaran	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6=(4/3)*100	7=(4-5)/4*100
A	PENDAPATAN					
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	181.460.899.220,00	183.860.737.486,12	150.940.558.113,14	101,32	17,90%
2	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan		181.460.899.220,00	183.860.737.486,12	150.940.558.113,14	101,32	17,90%
B	BELANJA					
1	Belanja Operasi	20.759.276.318,00	16.561.653.444,00	15.619.566.664,00	79,78	5,69
2	Belanja Modal	712.039.808,00	694.380.850,00	629.452.400,00	97,52	9,35
Jumlah Belanja		21.471.316.126,00	17.256.034.294,00	16.249.019.064,00	80,37	5,84

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi (Rp)		% Tahun 202n	
			Tahun 2024	Tahun 2023	Anggaran	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6=(4/3)*100	7=(4-5)/4*100
A	Pendapatan Asli Daerah	181.460.899.220,00	183.860.737.486,12	150.940.558.113,14	101,32	17,90%
1	Pajak Daerah	181.460.899.220,00	182.328.157.865,50	147.240.146.529,07	100,48	19,24
2	Retribusi Daerah		975.000	1.024.808.000,00		-105008,5128
3	Lain-Lain PAD Yang sah		1.531.604.620,62	2.675.603.584,07		-74,69
Jumlah Pendapatan		181.460.899.220,00	183.860.737.486,12	150.940.558.113,14	101,32	17,90%
B	BELANJA					
1	Belanja Pegawai	18.210.311.668,00	14.447.736.632,00	13.777.145.811,00	79,34	4,64
2	Belanja Barang & Jasa	2.548.964.650,00	2.113.916.812,00	1.842.420.853,00	82,93	12,84

3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	712.039.808,00	694.380.850,00	629.452.400,00	97,52	9,35
	Jumlah Belanja	21.471.316.126,00	17.256.034.294,00	16.249.019.064,00	80,37	5,84

Pada bagian pendapatan terjadi pelampauan senilai Rp. 2.399.838.266,12 dari target yang ditetapkan yaitu dari anggaran setelah perubahan senilai Rp. **181.460.899.220,00**,00 terealisasi senilai Rp. **183.860.737.486,12**,00 atau **101,32%**

Sementara itu dari sisi belanja, terdapat penghematan/efisiensi pengeluaran senilai Rp. 4.215.281.832,00,00 yaitu dari anggaran setelah perubahan senilai Rp. **21.471.316.126,00**,00 terealisasi Rp. **17.256.034.294,00**,00 atau **80,37%**

Capaian bagian pendapatan senilai 101,33% terinci untuk masing-masing komponen pendapatan sebagai berikut:

- Pajak Daerah, target anggaran setelah perubahan senilai Rp. 181.460.899.220,00 terealisasi senilai Rp. 182.328.157.865,50 atau 100,48%
- Retribusi Daerah, target anggaran setelah perubahan senilai Rp. 0,00, terealisasi senilai Rp. 975.000,00
- Lain-lain PAD yang sah, target anggaran setelah perubahan senilai Rp.0,00 terealisasi senilai Rp. 1.531.604.620,62.

Capaian bagian belanja senilai 80,37% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- Belanja Pegawai, Target anggaran setelah perubahan senilai Rp. 18.210.311.668,00 terealisasi senilai Rp. 14.447.736.632,00 atau 79,34%
- Belanja Barang dan Jasa, Target anggaran setelah perubahan senilai Rp. 2.548.964.650,00 terealisasi senilai Rp. 2.113.916.812,00 atau 82,93%
- Belanja Modal, Target anggaran setelah perubahan senilai Rp. 712.039.808,00 terealisasi senilai Rp. 694.380.850,00 atau 97,52%

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, realisasi pendapatan 2024 mengalami kenaikan/penurunan 17,90%, yaitu dari Rp. 150.940.558.113,14 pada tahun 2023 menjadi Rp. 183.860.737.486,12 pada tahun 2024.

Dari sisi belanja, terjadi kenaikan realisasi senilai 5,84 yaitu Rp. 16.249.019.064,00 Pada tahun 2023 menjadi Rp. 17.256.034.294,00 Pada tahun 2024.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam Pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah terdapat hambatan dan Kendala dalam pelaksanaan pencapaian tersebut, yaitu:

- a. Kendala terkait dengan pencapaian target pendapatan antara lain:
 - Jumlah personal yang ada masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah objek pajak daerah se Kabupaten Lombok Tengah
 - Minimnya jumlah personal membuat banyak objek pajak yang belum di Kelola dengan optimal
 - Kurangnya jumlah kendaraan operasional, hal ini berdampak pada mobilitas karyawan yang terbatas
 - Dalam pengelolaan PBBP2 oleh para kepala dusun dan kepala lingkungan, belum seluruhnya kepala dusun dan kepala lingkungan menjalankan tugas sebagai pemungut pajak PBBP2 menjalankan tugasnya dengan optimal.
 - Kesadaran objek pajak untuk membayar pajak masih sangat kurang.
 - Banyak usaha yang melakukan pencatatan secara manual sehingga sulit untuk memastikan jumlah pajak yang harus dibayarkan.
- b. Kendala terkait dengan efisiensi belanja.

Dalam pencapaian efisiensi belanja, relatif tidak ada kendala yang dihadapi.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan sejak tahun 2016 juga telah mengalami perubahan.

4.1 ASUMSI DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

a. Asumsi Kemandirian Entitas;

Bahwa Unit Pemerintah Daerah sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk Menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan asset dan sumberdaya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidaknya program yang telah ditetapkan.

b. Asumsi Kestinambungan Entitas;

Berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksudkan untuk melakukan likuidasi.

c. Asumsi Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement);

Berarti bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Satuan uang yang digunakan adalah rupiah.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Basis Akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan yang diberlakukan untuk setiap SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

a. Basis Kas (cash basis) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

b. Basis Akrua (Accrual basis) untuk penyusunan Laporan Finansial

Basis Akrua untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis Akrua untuk Laporan Operasional, bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Sedangkan basis Akrua untuk Neraca, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada Keuangan Daerah, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayar.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan menggunakan **nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah**. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.3.1 Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang liquid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan.

4.3.2 Piutang/Tagihan ke Pihak Ketiga

Piutang merupakan hak atau klaim entitas pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan.

4.3.3 Persediaan

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa perlakuan persediaan sebagai berikut:

- a. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik diakhir periode
- b. Persediaan yang berasal dari pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan
- c. Persediaan yang berasal dari produksi sendiri dinilai berdasarkan biaya standar
- d. Persediaan yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar
- e. Saldo persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian akhir
- f. Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik dan perpetual.
- g. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

4.3.4 Pengukuran Aset Tetap secara Umum

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu asset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan asset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

- b. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan asset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- c. Asset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat asset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- d. Dalam pengakuan asset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- e. Berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- f. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian
- g. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian asset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai asset tetap berdasarkan tetap pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.
- h. Pelepasan Aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan asset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Asset tetap yang diperoleh karena pertukaran dinilai sebesar nilai wajar asset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- i. Penghapusan asset tetap dilakukan jika asset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang dan sebagainya. Penghapusan asset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- j. Perubahan nilai asset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

4.3.5 Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

4.3.6 Peralatan dan Mesin

- a. Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh alat-alat dan mesin sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini

- meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.
- b. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.
 - c. Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.

4.3.7 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4.3.8 Jalan, Jaringan dan Instalasi

- a. Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan siap untuk digunakan.
- b. Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap untuk digunakan.
- c. Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun irigasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.

4.3.9 Aset Tetap lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

4.3.10 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data aset lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara pengurus barang Kabupaten Lombok Tengah dengan Bagian Aset Setda Kabupaten Lombok Tengah, karena aset lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

4.3.11 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

4.3.12 Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan antara lain dengan pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca dan LRA. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

A. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi pendapatan antara lain:

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah;
- b. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas daerah;
- c. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- d. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs Tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan;
- e. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang pendapatan. Apabila pengembalian/koreksi pendapatan terjadi setelah periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar (SiLPA);
- f. Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah yang menjadi beban Daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas Daerah;

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi Belanja antara lain:

- a. Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
 - b. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu: belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil-transfer.
 - c. Belanja Operasi diklasifikasikan atas: belanja pegawai, belanja barang, belanja jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
 - d. Belanja modal diklasifikasikan atas: belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan, penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

B. Neraca - (pada SKPD menjadi point b, pada BLUD menjadi point c)

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan

operasional Pemerintah Daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah.

I.1. Aset Lancar

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar antara lain: Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Piutang Lainnya, dan Persediaan.

I.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

I.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

I.1.3 Piutang Pajak

Piutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Piutang pajak dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

I.1.4 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan piutang retribusi dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

I.1.5 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

I.1.6 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APIP.

I.1.7 Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

I.1.8 Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat senilai biaya perolehan apabila diperoleh

dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

I.2. Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya.

I.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah dan perolehan deviden dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dikapitalisir kembali. Penyertaan modal pemerintah dicatat senilai harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud.

Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

1.2.2 Investasi Permanen Lainnya-Dana Bergulir

Investasi Permanen Lainnya adalah investasi permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan kepada kelompok masyarakat untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan kembali. Investasi permanen lainnya dicatat senilai harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya. Investasi Dana Bergulir dinilai senilai jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

I.3 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

I.3.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

I.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

I.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional

pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

I.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai jalan, irigasi dan jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

I.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan hewan/taBAIQ ALUH WINDAYU WIRANOM, S.E., MM.n. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan

biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

I.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

I.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis aset tetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan.

I.4 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana Cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lain-lain.

1.4.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai senilai nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

1.4.2 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak berat). Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset

tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan senilai nilai perolehannya. Terhadap Aset lain-lain tidak dilakukan penyusutan.

II. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

II.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

II.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

II.1.2. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan yaitu adanya pendapatan yang telah diterima oleh SKPD tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca, misalnya jasa giro atas rekening bank setiap bendaharawan uang di SKPD, pendapatan yang diterima oleh Bendaharawan Penerimaan belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.

II.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

III. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal

dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

III.1. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA, Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

III.2. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

- a) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang.
- b) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- c) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.
- d) Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang.

D. Laporan Operasional (LO)-(pada SKPD point C, pada BLUD point D)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

2. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3. Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

5. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

E. Laporan Arus Kas (LAK)-(BLUD)

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun Anggaran yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non-keuangan, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non-Anggaran. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran dan saldo kas dan setara kas.

Metode penyusunan Laporan Arus Kas adalah Metode Langsung yaitu dilakukan dengan cara menyajikan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi secara lengkap, dilanjutkan dengan kegiatan aktivitas investasi aset non-keuangan, dan pembiayaan serta non anggaran.

Susunan dan isi Laporan Arus Kas terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas terdiri dari: rincian Pendapatan Asli Daerah, rincian Pendapatan Transfer, rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan Arus Keluar terdiri dari: rincian Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Bagi Hasil-Transfer.

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non-Keuangan

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi dari hasil penjualan aset tetap dan aset lainnya. Sedangkan Arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah belanja pembelian aset tetap dan aset lainnya.

3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang

bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas dan klaim terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk penyertaan modal, pembayaran Kembali pokok pinjaman.

4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus Kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Arus Kas dari aktivitas non-anggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari pembayaran melalui transfer atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga. Kiriman uang menggambarkan mutase kas antar rekening Kas Umum.

F. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)-(SKPD dan BLUD)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut.

5.1. PENJELASAN ATAS POS - POS LRA

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA OPD pada TA 2024 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1. PENDAPATAN LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pajak Daerah	181.460.899.220,00	182.328.157.865,50	100,48	147.240.146.529,07
2	Retribusi Daerah	0,00	975.000,00	0,00	1.024.808.000,00
3	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	1.531.604.620,62	0,00	2.675.603.584,07
TOTAL		181.460.899.220,00	183.860.737.486,12	101,32	183.865.987.486,12

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LRA untuk pos pendapatan pajak daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo pendapatan pajak daerah yang dianggarkan dan di serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a	Pajak Hotel	29.926.836.083,87	30.777.229.162,79	102,64	31.017.043.511,84
	Pajak Hotel	29.926.836.083,87	30.777.229.162,79	102,64	30.282.573.880,84
	Pajak Losmen	0,00	0,00	0,00	734.469.631,00
b	Pajak Restoran	26.557.660.472,48	27.212.701.343,48	102,47	26.121.087.581,04
	Pajak Restoran dan Sejenisnya	26.557.660.472,48	27.212.701.343,48	102,47	20.356.952.241,04
	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	775.504.668,00
	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	235.021.466,00
	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	4.753.609.206,00
c	Pajak Hiburan	639.694.120,00	635.378.016,00	99,33	8.813.025.350,00
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	236.639.706,00	247.754.986,00	104,70	8.342.278.951,00
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	342.160.788,00	291.261.919,00	85,12	315.763.889,00
	Pajak Pertandingan Olahraga	60.893.626,00	96.361.111,00	158,24	154.982.510,00
d	Pajak Reklame	2.631.245.928,00	1.947.094.265,00	74,00	2.474.103.456,00
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	2.631.245.928,00	1.947.094.265,00	74,00	2.465.103.456,00
	Reklame Kain	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
e	Pajak Penerangan Jalan	23.073.604.102,00	23.073.604.102,00	100,00	27.939.630.764,00
	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	23.073.604.102,00	23.073.604.102,00	100,00	27.939.630.764,00
f	Pajak Parkir	1.186.539.192,00	1.206.617.014,00	101,69	2.466.398.329,00
	Pajak Parkir	1.186.539.192,00	1.206.617.014,00	101,69	2.466.398.329,00
g	Pajak Air Tanah	10.775.373.200,00	487.944.413,00	4,53	327.308.567,00
	Pajak Air Tanah	10.775.373.200,00	487.944.413,00	4,53	327.308.567,00
h	Pajak Sarang Burung Walet	8.704.315.763,00	4.350.000,00	0,05	18.000.000,00
	Pajak Sarang Burung Walet	8.704.315.763,00	4.350.000,00	0,05	18.000.000,00
i	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.750.278.803,00	3.549.329.804,00	202,79	1.348.208.186,58
	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.750.278.803,00	3.549.329.804,00	202,79	1.348.208.186,58
j	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	24.110.079.000,00	16.013.894.795,00	66,42	17.149.230.084,61

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	PBBP2	24.110.079.000,00	16.013.894.795,00	69,22	17.149.230.084,61
k	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	29.000.000.000,00	35.702.051.083,00	123,11	29.566.110.699,00
	BPHTB-Pemindahan Hak	29.000.000.000,00	35.702.051.083,00	123,11	29.566.110.699,00
l	Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(,PBJT)	23.105.272.555,65	41.717.963.867,23	177,72	
	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	6.737.466.720,52	14.020.141.538,12	202,84	
	PBJT-Tenaga Listrik	7.548.879.315,00	8.208.720.449,00	108,74	
	PBJT-Jasa Perhotelan	5.441.341.044,13	14.740.134.763,61	265,66	
	PBJT-Jasa Parkir	226.766.596,00	419.398.114,00	184,95	
	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	3.150.818.880,00	4.329.569.002,50	136,86	
	TOTAL	181.460.899.220,00	182.328.157.865,50	0,00	0,00

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran anggaran tahun 2024 dan realisasi tahun 2024 di bandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebagai berikut:

- Terdapat banyak objek baru
- Pengelolaan pendapatan daerah yang lebih baik
- Insensitas tim bapenda yang lebih banyak turun lapangan ke objek objek pajak daerah

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Tabel 5.3. Anggaran dan Realisasi Jenis Pendapatan Retribusi Daerah

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Retribusi Daerah					
1	Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Jasa Usaha	0,00	975.000,00	0,00	1.024.808.000,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	975.000,00	0,00	1.024.808.000,00

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Retribusi Daerah					
1	Retribusi Jasa Usaha	0,00	975.000,00	0,00	1.024.808.000,00
	a Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	397.409.000,00
	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	627.399.000,00
	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	0,00	975.000,00	0,00	0,00
Total		0,00	975.000,00	0,00	1.024.808.000,00

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran tahun 2024 dan realisasi tahun 2023 di bandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebagai berikut:

- a. Mulai tahun 2024, Bapenda sudah tidak lagi mengelola Retribusi.

5.1.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPAD Yang Sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.5. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No.	Uraian	20224			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah					
1	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	736.441.127,07	0,00	1.826.356.903,53
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	736.441.127,07	0,00	1.826.356.903,53
2	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	795.163.493,55	0,00	849.246.680,54
	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	89.000.741,00	0,00	171.469.042,54
	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	32.164.963,70	0,00	112.423.542,00

No.	Uraian	20224			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	21.135.334,00
	Pendapatan Denda PBBP2	0,00	673.997.788,85	0,00	540.968.762,00
	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
	Total	0,00	1.531.604.620,62	0,00	2.675.603.584,07

Penjelasan:

Sebab-sebab rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran tahun 2023 dan realisasi tahun 2023 di bandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebagai berikut:

- a. Karena mulai tahun 2024, Bapenda sudah tidak lagi menjadi pemungut Retribusi daerah

5.1.2. BELANJA

Realisasi belanja daerah yang tertuang dalam perubahan APBD TA 2024 adalah sebesar Rp.17.256.034.294,00 mencapai 106,20% dari anggaran belanja daerah TA 2023 sebesar Rp.16.249.019.064,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Operasi	20.759.276.318,00	16.561.653.444,00	79,78	15.619.566.664,00
2.	Belanja Modal	712.039.808,00	694.380.850,00	97,52	629.452.400,00
	Jumlah	21.471.316.126,00	17.256.034.294,00	80,37	16.249.019.064,00

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp. 16.561.653.444,00 atau mencapai 106,03% dari anggaran Belanja Operasi TA 2023 sebesar Rp. 15.619.566.664,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.7. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	18.210.311.668,00	14.447.736.632,00	79,34	13.777.145.811,00
2	Belanja Barang Jasa	2.548.964.650,00	2.113.916.812,00	82,93	1.842.420.853,00
	Jumlah	20.759.276.318,00	16.561.653.444,00	79,78	15.619.566.664,00

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2024 terealisasi sebesar Rp. 14.447.736.632,00 atau mencapai 104,87% dari anggaran Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp. 13.777.145.811,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.8. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Pegawai	18.210.311.668,00	14.447.736.632,00	79,34	13.777.145.811,00
	a. Gaji dan Tunjangan	6.640.635.629,00	6.441.166.886,00	97,00	6.212.402.203,00
	1 Belanja Gaji Pokok ASN	5.278.323.021,00	5.191.670.668,00	98,36	4.994.725.060,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	5.278.323.021,00	5.191.670.668,00	98,36	4.994.725.060,00
	2 Belanja Tunjangan Keluarga ASN	517.889.586,00	516.363.234,00	99,71	509.142.062,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	517.889.586,00	516.363.234,00	99,71	509.142.062,00
	3 Belanja Tunjangan Jabatan ASN	134.599.872,00	126.030.000,00	93,63	138.990.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	134.599.872,00	126.030.000,00	93,63	138.990.000,00
	4 Belanja Tunjangan Fungsional ASN	142.482.526,00	79.340.000,00	55,68	0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	142.482.526,00	79.340.000,00	55,68	0,00
	5 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	238.838.336,00	224.770.000,00	94,11	239.835.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	238.838.336,00	224.770.000,00	94,11	239.835.000,00
	5 Belanja Tunjangan Beras ASN	324.409.156,00	298.949.760,00	92,15	322.993.200,00
	Belanja Tunjangan Beras ASN	324.409.156,00	298.949.760,00	92,15	322.993.200,00
	6 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.012.329,00	3.971.051,00	98,97	6.634.957,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.012.329,00	3.971.051,00	98,97	6.634.957,00
	7 Belanja Pembulatan Gaji ASN	80.803,00	72.173,00	89,32	81.924,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	80.803,00	72.173,00	89,32	81.924,00
	b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.483.149.078,00	2.416.623.721,00	97,32	2.363.742.345,00
	1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.483.149.078,00	2.416.623.721,00	97,32	2.363.742.345,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.483.149.078,00	2.416.623.721,00	97,32	2.363.742.345,00
	c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.086.526.961,00	5.589.946.025,00	61,52	5.201.001.263,00
	1 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	9.073.044.961,00	5.576.464.025,00	61,46	5.152.856.387,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	896.626.075,00	896.626.075,00	100,00	904.705.374,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	690.809.962,00	690.809.962,00	100,00	630.434.062,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	131.562.296,00	59.208.618,00	45,00	85.802.301,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	917.511.943,00	917.511.943,00	100,00	1.297.590.641,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	15.849.793,00	15.849.793,00	100,00	82.250.515,00

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	538.768.660,00	4.130.595,00	0,77	9.638.061,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	435.215.788,00	0,00	0,00	198.747,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	87.513.940,00	80.013.927,00	91,43	62.513.934,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.205.503.950,00	0,00	0,00	824.722.760,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.450.000.000,00	1.404.999.998,00	96,90	1.254.999.992,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [PBJT]	2.703.682.554,00	1.507.313.114,00	55,75	0,00
	2 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	34.662.876,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	1.166.906,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	33.495.970,00
	3 Belanja Honorarium	13.482.000,00	13.482.000,00	100,00	13.482.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.482.000,00	13.482.000,00	100,00	13.482.000,00
	Jumlah	18.210.311.668,00	14.447.736.632,00	79,34	13.777.145.811,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2024 dan realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Jumlah objek pajak bertambah
2. Lebih efektifnya pengelolaan pendapatan daerah tahun 2024

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa TA 2024 terealisasi sebesar Rp. 2.113.916.812,00 atau mencapai 114,74% dari anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp. 1.842.420.853,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.9. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Barang Jasa				
1	Belanja Barang	1.577.393.340,00	1.360.306.950,00	86,24	1.004.623.510,00
	a. Belanja Bahan Pakai Habis	1.577.393.340,00	1.360.306.950,00	86,24	1.004.623.510,00
2	Belanja Jasa	527.992.310,00	390.771.482,00	74,01	641.552.265,00

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	a. Belanja Jasa Kantor	522.052.310,00	384.831.482,00	73,72	240.644.033,00
	b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00	1.440.000,00
	c. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Pemeliharaan	48.750.000,00	38.750.000,00	79,49	118.260.000,00
	a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48.750.000,00	38.750.000,00	79,49	118.260.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	394.829.000,00	324.088.380,00	82,08	77.985.078,00
	a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	394.829.000,00	324.088.380,00	82,08	77.985.078,00
	Jumlah	2.548.964.650,00	2.113.916.812,00	82,93	1.842.420.853,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2024 dan realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Terdapat kegiatan sensus pajak daerah khususnya pajak hotel dan restoran di tahun 2024.

5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp. 694.380.850,00 atau mencapai 110,32% dari anggaran Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp. 629.452.400,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.10. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	712.039.808,00	694.380.850,00	97,52	629.452.400,00
	Jumlah	712.039.808,00	694.380.850,00	97,52	629.452.400,00

Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut.

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Pada Tahun 2024 tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja modal Tanah.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2024 di realisasikan sebesar Rp. 694.380.850,00 atau mencapai 110,32% dari anggaran Belanja Modal Peralatan

dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 629.452.400,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.11. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	2024			2025
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Peralatan dan Mesin				
1	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	444.000.000
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	444.000.000
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	444.000.000
2	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	406.840.448,00	406.031.850,00	99,80	5.116.000,00
	Belanja Modal Alat Kantor	240.823.504,00	240.302.850,00	99,78	0,00
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	240.823.504,00	240.302.850,00	99,78	0,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	166.016.944,00	165.729.000,00	99,83	5.116.000,00
	Belanja Modal Mebel	164.285.200,00	164.001.000,00	99,83	5.116.000,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.731.744,00	1.728.000,00	99,78	0,00
3	Belanja Modal Komputer	305.199.360,00	288.349.000,00	94,48	170.220.400,00
	Belanja Modal Komputer Unit	154.915.500,00	147.270.000,00	95,06	140.736.000,00
	Belanja Modal Personal Computer	74.760.000,00	74.520.000,00	99,68	53.238.000,00
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	80.155.500,00	72.750.000,00	90,76	87.498.000,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer	150.283.860,00	141.079.000,00	93,88	29.484.400,00
	Belanja Modal Peralatan Jaringan	252.900,00	250.000,00	98,85	
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	150.030.960,00	140.829.000,00	93,87	29.484.400,00
	Jumlah	712.039.808,00	694.380.850,00	97,52	629.452.400,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

1. Terdapat pembelian mobil dinas di tahun 2024

5.1.2. SURPLUS/(DEFISIT)-LRA

Realisasi Pendapatan TA 2024 sebesar Rp. 183.865.987.486,12 dan Belanja Daerah sebesar Rp. 17.256.034.294,00, sehingga terjadi Surplus realisasi APBD sebesar Rp. 166.609.953.192,12 atau (104,14)% dari anggaran sebesar (Rp. 159.989.583.094,00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.12. Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) LRA

No.	Uraian	2024		%	2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	181.460.899.220,00	183.865.987.486,12	101,33	150.940.558.113,14
2	Belanja	21.471.316.126,00	17.256.034.294,00	80,37	16.249.019.064,00
Surplus/ (Defisit)		159.989.583.094,00	166.609.953.192,12	104,14	134.691.539.049,14

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas Per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

5.2.1. ASET

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Saldo Aset Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 38.585.930.317,95 dan Rp. 42.424.128.527,14 Berikut daftar rincian saldo Aset:

Tabel 5.13. Rincian Aset

No	Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
1	Aset Lancar	34.973.588.378,12	39.154.782.750,31
2	Aset Tetap	3.500.959.335,11	3.157.963.172,11
3	Aset Lainnya	111.382.604,72	111.382.604,72
	Jumlah	38.585.930.317,95	42.424.128.527,14

Berikut rincian per item aset.

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, Piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.34.973.588.378,12 dan Rp. 39.154.782.750,31. Berikut daftar rincian Aset Lancar:

Tabel 5.14. Rincian Aset Lancar

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kas dan setara Kas	0,00	3.909.000
2	Piutang	88.187.517.626,14	80.096.311.526,81
3	Penyisihan Piutang	(53.499.211.507,02)	(41.227.059.459,50)
4	Persediaan	285.282.259,00	281.621.683,00
	Jumlah	34.973.588.378,12	39.154.782.750,31

Berikut ini adalah rincian aset lancar.

5.2.1.1.1. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau simpanan bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek

yang sangat liquid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya dicatat sebesar nilai rupiahnya.

Saldo Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.0,0 dan Rp. 3.909.000,00. Berikut rincian Kas dan Setara Kas:

Tabel 5.15. Rincian Kas dan Setara Kas

No	Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
1	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	3.909.0000
	Jumlah	0,00	3.909.0000

5.2.1.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan yang belum di setorkan ke kas daerah.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang di terima bendahara penerimaan dari para wajib pajak/retribusi/lain – lain PAD yang sah per tanggal Neraca belum di setorkan ke kas daerah Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 0,00 dan Rp. 3.909.000,- di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.16. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No	Uraian Pendapatan	No STS dan tanggal STS	Jumlah
1	RK	0,00	3.909.000,-
	Jumlah	0,00	3.909.000,-

5.2.1.1.2 Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah namun sampai akhir periode pelaporan belum dilunasi.

Saldo Piutang Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 8.187.517.626,14 dan Rp. 80.096.311.526,81 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.17. Rincian Piutang Pendapatan

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)			31 Desember 2023 (Rp)
		Nilai Piutang	Penyisihan	NRV	
1	Piutang Pajak Daerah	86.378.017.612,07	(51.785.777.032,68)	0,00	78.286.811.512,74
2	Piutang Retribusi	1.713.434.474,33	(1.713.434.474,34)	0,00	1.713.434.474,33
4	Piutang Lain-lain PAD yg sah	96.065.539,74	0,00	0,00	96.065.539,74
	Jumlah	88.187.517.626,14	0,00	0,00	80.096.311.526,81

Berikut ini adalah rincian Piutang:

5.2.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Piutang pajak adalah Piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan yang belum dilunasi oleh wajib pajak sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Saldo Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 86.378.017.612,07 dan Rp. 78.286.811.512,74. Berikut rincian Piutang pajak daerah:

Tabel 5.18. Daftar Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)			31 Desember 2023 (Rp)
		Nilai Piutang	Penyisihan	NRV	
1	Piutang Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	33.693.750,00	(1.037.718,75)	0,00	27.576.481,67
2	Piutang Pajak Air Tanah	22.596.200,00	(112.981,00)	0,00	14.415.214,00
3	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	86.321.727.662,07	(51.784.626.332,93)	0,00	78.244.819.817,07
	Jumlah	87.065.755.207,99	(51.785.777.032,68)	0,00	78.286.811.512,74

Daftar Piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada Lampiran 2

5.2.1.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah

Piutang retribusi adalah Piutang yang timbul akibat pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya namun wajib retribusi belum melunasi sampai dengan akhir periode laporan Keuangan.

Saldo Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.1.713.434.474,33 dan Rp. 1.713.434.474,33 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.19. Daftar Piutang Retribusi

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)			31 Desember 2023 (Rp)
		Nilai Piutang	Penyisihan	NRV	
1	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	49.525.000,00	(49.525.000,00)	0,00	49.525.000,00

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)			31 Desember 2023 (Rp)
		Nilai Piutang	Penyisihan	NRV	
2	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	459.415.983,33	(459.415.983,34)	0,00	459.415.983,33
3	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.204.493.491,00	(1.204.493.491,00)	0,00	1.204.493.491,00
Jumlah		1.713.434.474,33	(1.713.434.474,34)	0,00	1.713.434.474,33

Daftar Mutasi Piutang Retribusi dapat dilihat pada Lampiran 2

5.2.1.1.2.3 Piutang Lain-lain PAD yang sah

Piutang lain-lain PAD yang sah adalah Piutang yang timbul dari pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan antara lain bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan, denda, penggunaan aset/pemberian jasa pemerintah daerah dan sebagainya yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang sah Per 31 Desember 2024 dan 2023 senilai Rp.96.065.539,74 dan Rp. 96.065.539,74 Berikut Rincian Piutang Lain-lain PAD yang sah.

Tabel 5.20. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

NO	Uraian	31-Des-24 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	8.751.826,36	8.751.826,36
2	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran	12.063.713,38	12.063.713,38
3	Piutang Pendapatan Denda Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	75.250.000,00	75.250.000,00
	TOTAL	96.065.539,74	96.065.539,74

Daftar Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah dapat dilihat pada Lampiran 2

5.2.1.1.3 Penyisihan Piutang

Tarif penyisihan piutang dilakukan dengan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

5.2.1.1.3.1 Penyisihan Piutang Pendapatan

Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.(53.499.211.507,02) dan Rp. (41.227.059.459,50). Penyisihan piutang pendapatan terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak senilai Rp. (51.785.777.032,68) dan Penyisihan Piutang Retribusi senilai Rp. (1.713.434.474,34)

5.2.1.1.4 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.285.282.259,00 dan Rp. 281.621.683,00. Persediaan tersebut merupakan persediaan barang pakai habis yang masih tersisa di SKPD berdasarkan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berikut rinciannya.

Tabel 5.21 Persediaan

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor (Bahan Cetak)	285.282.259,00	281.621.683,00
	Jumlah	285.282.259,00	281.621.683,00

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Lampiran 2

5.2.1.2 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap setelah penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 3.500.959.335,11 dan Rp. 3.157.963.172,11 Saldo Aset Tetap terdiri dari:

Tabel 5.22. Daftar Nilai Aset Tetap

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Tanah	400.000.000,00	400.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	6.283.718.804,23	5.598.030.954,23
3	Gedung dan Bangunan	3.032.648.378,00	3.032.648.378,00
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	284.666.000,00	284.666.000,00
	Jumlah Aset Tetap sebelum penyusutan	10.001.033.182,33	9.315.345.332,23
7	Akumulasi Penyusutan	(6.500.073.847,12)	(6.157.382.160,12)
	Jumlah Bersih	3.509.663.169,11	3.157.963.172,11

Rincian Aset Tetap berdasarkan objek Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebagai berikut;

5.2.1.2.2 Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 400.000.000,00 dan Rp. 400.000.000,00. Rincian aset tetap tanah per 31 Desember 2024 sebagai mana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.23. Daftar Nilai Aset Tetap Tanah

Kode	Uraian Aset Tetap Tanah	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.1	Tanah		
1.3.1.01	Tanah		
1.3.1.01.01	Tanah Persil	400.000.000	400.000.000
1.3.1.01.01.01	Tanah Bangunan Kantor	400.000.000	400.000.000

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tidak berubah karena tidak ada penambahan asset tanah di tahun 2024.

5.2.1.2.3 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebelum penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 6.283.718.804,23 dan Rp. 5.598.030.954,23. Rincian aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.24 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.2	Peralatan Dan Mesin	6.292.411.804,23	5.598.030.954,23
1.3.2.02	Alat Angkutan	2.988.927.981,53	2.988.927.981,53
1.3.2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	43.650.000,00	43.650.000,00
1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.354.992.622,70	975.978.772,70
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	20.538.000,00	20.538.000,00
1.3.2.08	Alat Laboratorium	14.087.000,00	14.087.000,00
1.3.2.09	Alat Persenjataan	2.450.000	2.450.000,00
1.3.2.10	Komputer	1.859.073.200,00	1.552.399.200,00

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp. 694.380.850,00 dan pengurangan senilai Rp. 8.693.000,00 disajikan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 5.25. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024

No	Uraian		Nilai (RP)
I	Saldo Awal		5.598.030.954,23
II	Penambahan		
	1	Belanja Modal TA 2024	694.380.850,00
	2	Mutasi antar OPD	-
	3	Reklasifikasi Antar KIB	-
	4	Aset yang yang di Peroleh dari Belanja Barang dan Jasa	-
	5	Reklasifikasi dari Aset Lainnya/RR/RB	-
	6	Aset Tetap Yang di Peroleh dai Hibah	-
	7	Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD	-
	Jumlah Mutasi Tambah		694.380.850,00
III	Pengurangan		
	1	Aset yang dikeluarkan (Barang Habis Pakai berupa alat kebersihan) dan Barang diserahkan ke Masyarakat	-
	2	Ekstracomtabel	-
	3	Dihibahkan ke masyarakat /Pihak Ke III dan Instansi Lain	-
	4	Reklas ke KIB Lainnya	8.693.000,00
	5	Mutasi antar OPD	-
	6	Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD	-
	Jumlah Mutasi Kurang		8.693.000,00
IV	Saldo Akhir		6.283.718.804,23

5.2.1.2.4 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Termasuk dalam bangunan dan gedung adalah teralis yang digunakan untuk sarana pendukung gedung tersebut.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 3.032.648.378,00 dan Rp. 3.032.648.378,00. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel : 5.26. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.3	Gedung Dan Bangunan		
1.3.3.01	Bangunan Gedung	3.004.648.378,00	3.004.648.378,00
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	28.000.000,00	28.000.000,00

Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.27. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Uraian		Nilai (RP)
I	Saldo Awal		3.032.648.378,00
II	Penambahan		0,00
	1	Belanja Modal TA 2024	
	2	Nilai Taksiran	
	3	Aset yang di peroleh dari Hibah	

No	Uraian	Nilai (RP)
4	Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa	
5	Reklasifikasi Dari KIB Lainnya	
6	Hutang Kepada Pihak Ke Tiga	
7	Belanja Modal Melalui BTT	
8	Mutasi antar OPD	
9	Reklas Dari DED/aset lainnya	
	Jumlah Mutasi Tambah	
III	Pengurangan	0,00
1	Aset Tetap yang sudah diakui Tahun sebelumnya melalui Hutang Kepada Pihak Ke Tiga	
2	Mutasi antar OPD	
3	Dihibahkan ke masyarakat/Instansi Lainnya	
4	Reklasifikasi ke KIB Lainnya	
5	Extracomptable	
6	Tidak memenuhi kreterian aset tetap/direklas ke beban barang dan jasa	
7	Reklas Ke Aset Lainnya/RB	
8	Reklas ke Aset Lainnya karna Kurang Volume	
9	Reklas ke Persediaan	
	Jumlah Mutasi Kurang	0,00
IV	Saldo Akhir	3.032.648.378,00

5.2.1.2.5 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebelum penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 284.666.000,00 dan Rp. 284.666.000,00 dengan Rincian nilai aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 5.28 Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.4	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	284.666.000,00	284.666.000,00
1.3.4.03	Instalasi	27.600.000,00	27.600.000,00
1.3.4.04	Jaringan	257.066.000,00	257.066.000,00

Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebagaimana rincian dalam tabel berikut.

Tabel 5.29 Penambahan dan Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	284.666.000,00
II	Penambahan	0,00
1	Belanja Modal TA 2024	
2	Penyesuaian/ Reklas antar KIB	
3	Hutang Kepada Pihak Ke Tiga	
4	Penerimaan Hibah	
5	Mutasi antar OPD	
6	Nilai Taksiran	

No	Uraian	Nilai (RP)
	Jumlah Mutasi Tambah	
III	Pengurangan	0,00
1	Mutasi antar OPD	
2	Reklas ke KDP	
3	Kurang Volume Pekerjaan	
	Jumlah Mutasi Kurang	
IV	Saldo Akhir	284.666.000,00

5.2.1.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penyusutan Aset Tetap. Saldo Penyusutan aset tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. (6.500.073.847,12) dan Rp (6.157.382.160,12).

5.2.1.3 Aset Lainnya

Saldo bersih Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.111.382.604,72 dan Rp. 111.382.604,72. Rincian Aset Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.30. Daftar Aset Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Aset Lain-lain :		
	Aset Rusak Berat/Usang	35.321.429,72	35.321.429,72
	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	76.061.175,00	76.061.175,00
	Jumlah	111.382.604,72	111.382.604,72

5.2.2 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban di klasifikasi menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Nilai Kewajiban Per 31 Desember 20224 dan 2023 masing-masing senilai Rp.171.469.811,00 dan Rp. 2.388.993.763,92. Rincian kewajiban sebagai berikut.

Tabel 5.31. Rincian Kewajiban

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	171.469.811,00	2.388.993.763,92
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
	Jumlah	171.469.811,00	2.388.993.763,92

5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Posisi kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.171.469.811,00 dan Rp. 2.388.993.763,92. Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

Tabel 5.32. Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	687.737.595,92
2	Utang Belanja	171.469.811,00	1.701.256.168,00
	Jumlah	171.469.811,00	2.388.993.763,92

5.2.2.1.1 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah Utang yang timbul karena Pemerintah Daerah menerima penerimaan pembayaran dimuka atas penyerahan barang/jasa dari pihak lain. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.0,00 dan Rp. 687.737.595,92.

Daftar rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut.

Tabel 5.33. Pendapatan Diterima Dimuka

NO	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Billboard/Videotron/Megatron Papan/	0,00	687.737.595,92
	Jumlah	0,00	687.737.595,92

5.2.2.1.2 Utang Belanja dan Transfer

Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.171.469.811,00 dan Rp. 1.701.256.168,00. Utang Belanja dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.34. Rincian Utang Belanja

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	169.498.145,00	1.700.605.163,00

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	1.971.666,00	651.005,00
	Total	171.469.811,00	1.701.256.168,00

5.2.2.1.2.1. Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.169.498.145,00 dan Rp. 1.700.605.163,00. Berikut rincian utang belanja pegawai.

Tabel 5.35. Rincian Utang Belanja Pegawai

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)
1	Utang Gaji dan Tunjangan	234.780,00	1.574.502,00
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan	169.253.974,00	178.122.398,00
3	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.391,00	0,00
4	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	1.520.908.263,00
	Total	169.498.145,00	1.700.605.163,00

5.2.2.1.2.2. Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.1.971.666,00 dan Rp. 651.005,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.36. Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	591.304,00	651.005,00
2	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.380.362,00	0,00
	Total	1.971.666,00	651.005,00

5.2.3 EKUITAS

Nilai ekuitas akhir Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.38.414.460.506,95 dan Rp. 40.035.134.763,22. Nilai ekuitas menurun senilai Rp.1.620.674.256,27 atau sebesar 4,05% di dibandingkan dengan saldo nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp. 40.035.134.763,22

5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Program dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1 Pendapatan Daerah - LO

Pendapatan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 192.639.681.181,37 dan senilai Rp. 152.515.911.185,91. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Badan Pendapatan Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.37. Rincian Pendapatan - LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Asli Daerah – LO	192.639.681.181,37	152.515.911.185,91
Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	0,00	0,00
Jumlah	192.639.681.181,37	152.515.911.185,91

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 192.639.681.181,37 dan Rp. 152.515.911.185,91. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LO yang diakui oleh Badan Pendapatan Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.38. Pendapatan Asli Daerah – LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Pajak Daerah – LO	191.107.101.560,75	148.750.476.819,82
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	975.000,00	1.102.180.000,00
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	0,00
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	1.531.604.620,62	2.663.254.366,09
Jumlah	192.639.681.181,37	152.515.911.185,91

Berikut rincian masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah yang sah yang dimaksud.

Tabel 5.39. Rincian Pendapatan Asli Daerah

Uraian		Tahun 2024	Tahun 2023
1	Pajak Daerah-LO	191.107.101.560,75	148.750.476.819,82
	a. Pajak Hotel	30.777.229.162,79	29.619.675.398,84
	b. Pajak Restoran	27.212.701.343,48	25.414.723.607,04
	c. Pajak Hiburan	635.378.016,00	8.800.496.168,00
	d. Pajak Reklame	2.640.949.129,25	1.807.404.216,75
	e. Pajak Penerangan Jalan	23.073.604.102,00	25.514.569.522,00
	f. Pajak Parkir	1.206.617.014,00	2.232.379.229,00
	g. Pajak Air Tanah	496.125.399,00	330.716.024,00
	h. Pajak Sarang Burung Walet	4.350.000,00	18.000.000,00
	i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.549.329.804,00	1.348.208.186,58
	j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	24.090.802.640,00	24.098.193.768,61
	k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	35.702.051.083,00	29.566.110.699,00
	l. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	41.717.963.867,23	0,00
2	Retribusi Daerah-LO	975.000,00	1.102.180.000,00
	a. Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00
	b. Retribusi Jasa Usaha	975.000,00	1.102.180.000,00
	c. Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00
3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	1.531.604.620,62	2.663.254.366,09
	a. Jasa Giro	0,00	3.260.926,14
	b. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	736.441.127,07	1.826.356.903,53
	c. Pendapatan Denda Pajak Daerah	795.163.493,55	833.636.536,42
	Jumlah	191.107.101.560,75	152.515.911.185,91

Berikut rincian lebih lanjut Pendapatan pajak Daerah LO:

5.3.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah LRA tahun 2024 senilai Rp. 182.328.157.865,50 sedangkan Pendapatan Pajak Daerah LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 191.107.101.560,75 dan Rp. 148.750.476.819,82. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah - LO yang diakui oleh Badan Pendapatan Daerah selama melakukan kegiatan operasional tahun 2024.

Tabel 5.40. Rincian Pendapatan Pajak Daerah– LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
A	Pajak Hotel	30.777.229.162,79	29.619.675.398,84
1	Pajak Hotel	30.777.229.162,79	28.961.569.275,84
2	Pajak Losmen	0,00	658.106.123,00
3	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	0,00	0,00
B	Pajak Restoran	27.212.701.343,48	25.414.723.607,04
	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	27.212.701.343,48	19.673.763.017,04
	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya		752.329.918,00
	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya		235.021.466,00
	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya		4.753.609.206,00
C	Pajak Hiburan-LO	635.378.016,00	8.800.496.168,00
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	247.754.986,00	8.342.278.951,00
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	291.261.919,00	305.355.207,00
	Pajak Pertandingan Olahraga-LO	96.361.111,00	152.862.010,00
D	Pajak Reklame-LO	2.640.949.129,25	1.807.404.216,75
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	2.640.949.129,25	1.798.404.216,75
	Pajak Reklame Kain		9.000.000,00
E	Pajak Penerangan Jalan-LO	23.073.604.102,00	25.514.569.522,00
	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	23.073.604.102,00	25.514.569.522,00
F	Pajak Parkir-LO	1.206.617.014,00	2.232.379.229,00
	Pajak Parkir-LO	1.206.617.014,00	2.232.379.229,00
G	Pajak Air Tanah-LO	496.125.399,00	330.716.024,00
	Pajak Air Tanah-LO	496.125.399,00	330.716.024,00
H	Pajak Sarang Burung Walet-LO	4.350.000,00	18.000.000,00
	Pajak Sarang Burung Walet-LO	4.350.000,00	18.000.000,00
I	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	3.549.329.804,00	1.348.208.186,58
	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	3.549.329.804,00	1.348.208.186,58
J	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	24.090.802.640,00	24.098.193.768,61
	PBBP2-LO	24.090.802.640,00	24.098.193.768,61
K	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	35.702.051.083,00	29.566.110.699,00
	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	35.702.051.083,00	29.566.110.699,00
K	Pajak Barang dan Jasa Tertentu [PBJT]-LO	41.717.963.867,23	0,00
	Pajak Barang dan Jasa Tertentu [PBJT]-LO	41.717.963.867,23	0,00
	TOTAL	191.107.101.560,75	148.750.476.819,82

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pajak Daerah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Bertambahnya jumlah objek pajak daerah
 - b. Pengelolaan pemungutan pajak daerah di tahun 2024 lebih efektif dibandingkan dengan tahun 2023

2. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2024 ini lebih lebih besar dari saldo Pendapatan Pajak Daerah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp. 8.778.943.695,25. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.41. Penjelasan Selisih Pendapatan Pajak Daerah - LO

No	Uraian	Nilai
1	Selisih LO – LRA	8.778.943.695,25
	Penjelasan Selisih:	
2	Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
A	Sisa Piutang Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 2023 ditahun 2024	687.737.595,92
B	Penambahan Piutang Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 2024	29.293.750,00
C	Penambahan Piutang Air Tanah ditahun 2024	22.596.200,00
D	Penambahan Piutang PBBP2 ditahun 2024	24.082.761.379,00
3	Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
A	Pembayaran Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO 2023 di tahun 2024	23.176.481,67
B	Pembayaran Piutang Pajak Air Tanah 2023 di Tahun 2024	14.415.214,00
C	Pembayaran Piutang Pajak PBBP2 2023 di Tahun 2024	16.005.853.534,00
Jumlah Penjelasan Selisih		8.778.943.695,25

5.3.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 975.000,00 dan Rp. 1.102.180.000,00. Sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah LRA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 senilai Rp 975.000,00 sehingga terdapat perbedaan senilai Rp. 0,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LO yang diakui oleh Badan Pendapatan Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.42. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah– LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
A	Retribusi Jasa Usaha-LO	975.000,00	1.102.180.000,00
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		399.424.000,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	975.000,00	702.756.000,00
TOTAL		975.000,00	1.102.180.000,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Retribusi Daerah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Pada tahun 2024, Bapenda sudah tidak lagi menjadi pengelola pemungutan retribusi

2. Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2024 ini sama dengan saldo Pendapatan Pajak Retribusi Daerah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp. 975.000,00.

5.3.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp. 1.531.604.620,62 sedangkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 1.531.604.620,62 dan Rp.2.663.254.366,09.

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO yang diakui oleh Badan Pendapatan Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.43. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Jasa Giro – LO	0,00	3.260.926,14
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LO	736.441.127,07	1.826.356.903,53
Pendapatan Denda Pajak Daerah	795.163.493,55	833.636.536,42
Jumlah	1.531.604.620,62	2.663.254.366,09

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Di tahun 2024, jasa giro sudah dikeluarkan dari laporan keuangan
 - b. Berkurangnya jumlah pendapatan denda pajak daerah dan komisi tahun 2024

5.3.1.3.2. BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 28.228.421.134,00 dan Rp. 22.569.470.693,10. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban yang diakui oleh Badan Pendapatan Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.44. Rincian Beban

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Beban Operasional	28.228.421.134,00	22.569.470.693,10
2	Beban Transfer	0,00	0,00
3	Beban Tak Terduga	0,00	0,00
	Jumlah	28.228.421.134,00	22.569.470.693,10

5.3.1.1 OPERASIONAL

Beban Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 28.228.421.134,00 dan Rp. 22.569.470.693,10. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh Badan Pendapatan Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.45. Rincian Beban Operasional

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Beban Pegawai	12.916.629.614,00	14.594.367.457,00
2	Beban Barang dan Jasa	2.120.269.897,00	2.072.367.819,00
3	Beban Penyisihan Piutang	12.848.829.936,00	5.681.161.256,10
4	Beban Penyusutan dan Amortisasi	342.691.687,00	221.574.161,00
Jumlah		28.228.421.134,00	22.569.470.693,10

5.3.1.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk tahun 2024 dan 2023 senilai Rp. 12.916.629.614,00 dan Rp. 14.594.367.457,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.46. Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	6.439.836.555,00	6.212.328.639,00
a.	Beban Gaji Pokok ASN	5.190.513.188,00	4.994.458.166,00
b.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	516.181.064,00	509.335.412,00
c.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	126.030.000,00	138.990.000,00
d.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	79.340.000,00	
e.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	224.770.000,00	239.835.000,00
f.	Beban Tunjangan Beras ASN	298.949.760,00	322.993.200,00
g.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.971.051,00	6.634.957,00
h.	Beban Pembulatan Gaji ASN	72.101,00	81.904,00
i.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.391,00	
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.407.755.297,00	2.357.453.158,00
a.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.407.755.297,00	2.357.453.158,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.069.037.762,00	6.024.585.660,00
a.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	4.055.555.762,00	5.976.440.784,00
b.	Beban bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		34.662.876,00
c.	Beban Honorarium	13.482.000,00	13.482.000,00
Jumlah		12.916.629.614,00	14.594.367.457,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Tahun 2024 tidak ada insentif retribusi daerah karena Bapenda sudah tidak lagi mengelola retribusi daerah.
 - b. Jumlah pegawai tahun 2023 lebih banyak daripada tahun 2024
2. Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2024 sebesar Rp. 1.531.107.018,00. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.47. Penjelasan Selisih Beban Pegawai LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	1.531.107.018,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Beban LO:	
Utang Gaji Pokok PNS	223.600,00
Utang Tunjangan Keluarga PNS	11.180,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan PNS	9.391,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	169.253.974,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.520.908.263,00
Pengurangan Beban LO:	
Utang Belanja Pegawai (N-1)	
Utang Belanja Gaji Pokok PNS	1.381.080,00
Utang Tunjangan Keluarga PNS	193.350,00
Utang Beban Pembulatan Gaji PNS	72,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	178.122.398,00
Jumlah Penjelasan Selisih	1.531.107.018,00

5.3.1.1.2 Beban Barang dan Jasa

Nilai beban barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 masing senilai Rp. 2.120.269.897,00 dan Rp. 2.072.367.819,00. Rincian Nilai Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.48 Rincian Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
A	Beban Barang	1.360.306.950,00	1.234.553.717,00
1	Beban Barang Pakai Habis	1.360.306.950,00	1.234.553.717,00
B	Beban Jasa	390.771.482,00	641.569.024,00
1	Beban Jasa Kantor	384.831.482,00	240.660.792,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	1.440.000,00	1.440.000,00

3	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi		399.468.232,00
4	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.500.000,00	
C	Beban Pemeliharaan	38.750.000,00	118.260.000,00
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.750.000,00	118.260.000,00
D	Belana Perjalanan Dinas	324.088.380,00	77.985.078,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	324.088.380,00	77.985.078,00
Jumlah		2.120.269.897,00	2.072.367.819,00

Belanja Barang dan Jasa – LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp. 2.113.916.812,00, Sedangkan Realisasi Beban Barang dan Jasa - LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp. 2.120.269.897,00.

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Pada tahun 2024, tidak ada beban jasa konsultasi non konstruksi
2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2024 sebesar Rp. 6.353.085,00. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.49 Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa-LO

No	Uraian	Nilai
1	Selisih LO – LRA	6.353.085,00
Penjelasan Selisih:		
2	Penambahan Beban LO:	
a	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	281.621.683,00
b.	Beban Tagihan Air	591.304,00
c.	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.380.362,00
d.	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	8.693.000,00
3	Pengurangan Beban LO:	
a	Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	285.282.259,00
b.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	651.005,00
Jumlah Penjelasan Selisih		6.353.085,00

5.3.1.2 Beban Penyisihan Piutang

Berikut Rincian Beban penyisihan piutang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 senilai Rp. 1.027.981,00 dan Rp. 5.681.161.256,10. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.50 Rincian Beban Penyisihan

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	12.848.829.936,00	5.681.161.256,10
Jumlah	12.848.829.936,00	5.681.161.256,10

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut: Terjadi penyisihan piutang PBBP2 senilai Rp. 12.452.583.159,58. Dan penyisihan piutang pajak reklame Rp. 1.015.718,75 dan penyisihan piutang pajak air tanah Rp.112.981,00
2. Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO Tahun 2024 ini lebih banyak daripada selisih/perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 dalam Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 7.167.668.679,90.

5.3.1.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 dan 2023 senilai masing-masing Rp. 342.691.687,00 dan Rp.221.574.161,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Badan Pendapatan Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.51 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	283.909.894,00	162.792.368,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	51.410.550,00	51.410.550,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	7.371.243,00	7.371.243,00
Jumlah	342.691.687,00	221.574.161,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Lebih banyak mesin yang mengalami penyusutan di tahun 2024
2. Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2024 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 dalam Neraca per 31 Desember 2024 diungkapkan dalam CaLK.

5.3.2 SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Berdasarkan Pendapatan dan Beban Operasional yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui Surplus Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai masing-masing Rp. 164.411.260.047,37 dan Rp. 129.946.440.492,81 terdiri dari:

Tabel 5.52 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pendapatan-LO	192.639.681.181,37	152.515.911.185,91
2	Beban-LO	28.228.421.134,00	22.569.470.693,10
Surplus/(Defisit) Operasional		164.411.260.047,37	129.946.440.492,81

5.3.3 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional menghasilkan Surplus/(Defisit) dari kegiatan Non Operasional yang terdiri dari:

5.3.3.1 Surplus Non Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non-Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Surplus Non-Operasional yang diakui oleh Badan Pendapatan Daerah selama melakukan kegiatan nonoperasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.53 Rincian Surplus Non Operasional

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	576.677.888,48	787.001.369,11
· Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO (Surplus Penyisihan Piutang Terbayar)	576.677.888,48	787.001.369,11
Jumlah	576.677.888,48	787.001.369,11

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Surplus Non-Operasional Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Adanya pembayaran atas Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah senilai Rp. 115.882,41
 - b. Adanya pembayaran atas Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah senilai Rp. 72.076,07
 - c. Adanya pembayaran atas Penyisihan Piutang PBBP2 senilai Rp. 576.489.930,00

5.3.3.2 Defisit Non Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non-Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Defisit Non-Operasional yang diakui oleh Badan Pendapatan Daerah selama melakukan kegiatan nonoperasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.54 Rincian Defisit Non Operasional

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	576.677.888,48	787.001.369,11
Jumlah	576.677.888,48	787.001.369,11

5.3.4 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas Pemerintah Daerah. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pos Luas Biasa Tahun 2024 dan 2023 yaitu saldo Pos Luar Biasa yang merupakan Beban Luar Biasa yang diakui oleh Badan Pendapatan Daerah di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.55 Rincian Beban Luar Biasa

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

5.3.5 SURPLUS/(DEFISIT) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

Tabel 5.56 Rincian Surplus/(Defisit) – LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kegiatan Operasional		
➤ Pendapatan Daerah – LO	192.639.681.181,37	152.515.911.185,91
✓ Pendapatan Asli Daerah – LO	192.639.681.181,37	152.515.911.185,91
✓ Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	0,00	0,00
➤ Beban Operasional	28.228.421.134,00	22.569.470.693,10
✓ Beban Operasional	28.228.421.134,00	22.569.470.693,10
➤ Beban Transfer	0,00	0,00
✓ Beban Transfer	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) dari kegiatan Operasional	164.411.260.047,37	129.946.440.492,81
Kegiatan Non-Operasional		
➤ Surplus Non-Operasional	576.677.888,48	787.001.369,11
✓ Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	-	-

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
✓ Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya – LO	576.677.888,48	787.001.369,11
➤ Defisit Non-Operasional	0,00	0,00
✓ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	0,00	0,00
✓ Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) Non Operasional	576.677.888,48	787.001.369,11
Pos Luar Biasa	0,00	0,00
✓ Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
✓ Beban Luar Biasa	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah	164.987.937.935,85	130.733.441.861,92

5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.57 Ekuitas Awal - LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Ekuitas Awal	40.035.134.763,23	44.032.719.876,58

5.4.2 Surplus/(Defisit)-LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.58 Surplus/(Defisit)-LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	164.411.260.047,37	129.946.440.492,81
Surplus/(Defisit) dari kegiatan Non Operasional	576.677.888,48	787.001.369,11
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) – LO	164.987.937.935,85	130.733.441.861,92

Pada Tahun 2024 dan 2023 Badan Penadapatan Daerah memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan non operasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 202N. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada *point 5.4.6*

5.4.3 Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Dinas/Badan/Kantor Per 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.59 Rincian Ekuitas Akhir

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo Ekuitas Akhir	38.414.460.506,95	40.035.134.763,23

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca *Point*

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Badan Pendapatan Daerah berperan sebagai unsur pelaksana kewenangan otonomi daerah. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merumuskan Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 70 Tahun 2016, yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di jelaskan di atas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan fungsi: penunjang keuangan lingkup pengelolaan pajak

6.2. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah

6.2.1. Kantor

Badan Pendapatan Daerah memiliki kantor di Pusat Kantor Bupati Lombok Tengah Gedung A Lantai 1. Selain itu, terdapat kantor BKP (Bendahara Khusus Penerimaan) di setiap Kecamatan.

Bapenda juga memberikan pelayanan di MPP (Mall Pelayanan Publik) Kabupaten Lombok Tengah.

6.2.2. Pegawai

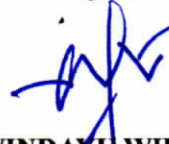
Berikut daftar pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah:

BAB VI
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan CALK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 secara keseluruhan.

Praya, Januari 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,



BAIQ ALUH WINDAYU WIRANOM, S.E., MM.
NIP. 197307291997032008



**PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH**

Badan Pendapatan Daerah
LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN TH 2024



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat: JL. Raden Puguh, Gedung Sholah Lantai 1 Kode Pos
Website: <https://Bapendalomboktengahkab.go.id>

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN

Pada hari ini **Selasa*** tanggal **tiga puluh satu*** bulan **Desember*** tahun 2024, telah dilakukan Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah oleh Tim pemeriksa Badan Pendapatan Daerah, dengan perhitungan kas sebagai berikut :

Saldo buku yang ditetapkan

Penerimaan periode 1 Januari s/d 31 Des 2024 Rp. 17.286.708.171,00

Pengeluaran periode sama Rp. 17.286.708.171,00

Saldo buku Rp. -

Saldo kas Bendahara Pengeluaran, terdiri dari: Rp. -

Uang tunai di brankas

Uang kertas (Jika ada, harus dirincikan) Rp. 0,00

Uang logam (Jika ada, harus dirincikan) Rp. 0,00

Uang di Rekening Rp. -

Jumlah Kas Rp. -

Selisih Kas Rp. -

Penjelasan atas selisih kas: -

Catatan:

Terdiri dari:

		RINCIAN UANG TUNAI	
1. Uang Kertas	: - Lembar	@..... Lembar	= RP.
	- Lembar	@..... Lembar	= RP.
	- Lembar	@..... Lembar	= RP.
	- Lembar	@..... Lembar	= RP.
		TOTAL:	= Rp. ...
2. Uang Kertas	: - Lembar	@..... Lembar	= RP.
	- Lembar	@..... Lembar	= RP.
	- Lembar	@..... Lembar	= RP.
	- Lembar	@..... Lembar	= RP.
		TOTAL:	= Rp. ...
3.			

Bendahara Pengeluaran
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah

(KURRATA AINI, S.E.)
NIP. 198012312006042018

Mengetahui,
Kepala Badan pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah

(Hj. BAIQ ALUH WINDAYU W, S.E., M.M.)
NIP. 197307291997032008



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Raden Pugu Komplek Kantor Bupati Gedung A Lantai I

BERITA ACARA PEMERIKSAAN STOCK OPNAME BARANG KUASI

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh empat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : BAIQ ALUH WINDAYU WIRANOM, S.E.,M.M
NIP : 197307291997032008
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2007, kami melakukan pemeriksaan terhadap persediaan barang habis pakai kepada :

Nama Lengkap : NANA HERLIANA, A.Md
NIP : 199412232020122015
Jabatan : Bendahara Barang pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Tengah

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut :

Jumlah barang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga Satuan	Total
1	Karcis Retribusi Rawat Inap pada Puskesmas	123	Buku	3,250	399,750
2	Karcis Retribusi Rawat Jalan UGD pada Puskesmas	152	Buku	3,250	494,000
3	Karcis Retribusi Kunjungan Pengobatan pada Puskesmas	134	Buku	3,250	435,500
4	Karcis Retribusi Parkir Alat Berat	855	Buku	4,000	3,420,000
5	Karcis Retribusi Parkir Mobil	740	Buku	2,800	2,072,000
6	Karcis Retribusi Parkir Sepeda Motor	948	Buku	4,000	3,792,000
7	Karcis Retribusi Sampah (Rp. 50.000)	81	Buku	4,000	324,000
8	Karcis Retribusi Sampah (Rp. 30.000)	90	Buku	4,000	360,000
9	Karcis Retribusi Sampah (Rp. 20.000)	50	Buku	4,000	200,000
10	Karcis Retribusi Sampah (Rp. 15.000)	35	Buku	4,000	140,000
11	Karcis Retribusi Sampah (Rp. 10.000)	24	Buku	4,000	96,000
12	Karcis Retribusi Sampah (Rp. 7.500)	51	Buku	4,000	204,000
13	Karcis Retribusi Sampah (Rp. 5.000)	70	Buku	4,000	280,000
14	Karcis Retribusi Sampah (Rp. 3.000)	178	Buku	4,000	712,000
15	Karcis Retribusi Sampah (Rp. 2.000)	75	Buku	4,000	300,000
16	Karcis Retribusi Sampah (Rp. 1.000)	75	Buku	4,000	300,000
17	Karcis Retribusi Sampah (Rp. 500)	594	Buku	4,000	2,376,000
18	Karcis Retribusi Sampah (Rp. 200)	1,046	Buku	3,250	3,399,500

19	Karcis Retribusi Sampah (Rp. 100)	830	Buku	3,250	2,697,500
20	Karcis Retribusi RPH Betina Rp. 28.000	83	Buku	4,000	332,000
21	Karcis Retribusi RPH Jantan Rp. 23.000	139	Buku	4,000	556,000
22	Karcis Retribusi Jual Beli Ternak Besar Rp. 3.000	79	Buku	4,000	316,000
23	Karcis Retribusi Pemasukan Ternak Kecil	270	Buku	4,000	1,080,000
24	Karcis Retribusi pasar Umum (Pink)	890	Buku	7,527	6,699,030
25	Karcis Retribusi Pasar Umum (Biru)	30	Buku	7,527	225,810
26	Karcis Retribusi Pasar Umum (Kuning)	800	Buku	7,770	6,216,000
	Karcis Retribusi Pasar Umum (Kuning)	712	Buku	7,527	5,359,224
27	Bill Rumah Makan / Restoran	31	Buku	31,500	976,500
28	Kwitansi Satuan Kerja	125	Buku	15,000	1,875,000
29	Kwitansi TPR	96	Buku	15,000	1,440,000
30	Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP)	49	Buku	15,000	735,000
31	Buku Kas Umum	62	Buku	22,575	1,399,650
32	Surat Tanda Setoran (STS) PAD	64	Buku	81,000	5,184,000
33	Tanda Bukti Pembayaran (TBP)	48	Buku	81,000	3,888,000
34	Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	174	Buku	45,000	7,830,000
35	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	320	Buku	81,000	25,920,000
	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	107	Buku	81,543	8,725,101
36	TTS Pajak BGGC	390	Buku	15,000	5,850,000
37	SSPD-BPHTB (Surat Setoran Pajak Daerah)	52	Buku	81,000	4,212,000
38	SPTPD-BPHTB (surat pemberitahuan pajak daerah)	170	Buku	40,000	6,800,000
39	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)	16	Buku	81,000	1,296,000
40	Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	22	Buku	81,000	1,782,000
41	Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)	100	Buku	45,000	4,500,000
42	STPD Pajak Hotel	55	Buku	45,000	2,475,000
43	STPD Pajak Restoran	52	Buku	45,000	2,340,000
44	SKPD - KB (Surat Ketetapan Pajak Daerah - Kurang Bayar)	8	Buku	35,000	280,000
45	SKPD - LB (Surat Ketetapan Pajak Daerah - Lebih Bayar)	14	Buku	35,000	490,000
46	STTS PBB - 12 (Surat Tanda Terima Sementara)	399	Buku	45,000	17,955,000
47	Kupon Undian PBB	2,693	Buku	5,000	13,465,000
48	TPS PBB (Tanda Pembayaran Sementara)	150	Buku	81,000	12,150,000
	TPS PBB (Tanda Pembayaran Sementara)	210	Buku	81,543	17,124,030
49	STPT-PBB-P2 (Surat Tanda Pembayaran Tunggal)	209	Buku	81,000	16,929,000
50	STS - PBB - P2 (Surat Tanda Setoran)	138	Buku	81,000	11,178,000
51	DPH-PBB-P2 (Daftar Penerimaan Harian)	40	Buku	81,000	3,240,000
52	Karcis Masuk Pengunjung Taman Wisata Aik Bukak Dewasa	46	Buku	7,527	346,242
53	Karcis Masuk Pengunjung Taman Wisata Aik Bukak Anak	148	Buku	5,000	740,000
54	Kwitansi Sedahan ke BKP	33	Buku	30,000	990,000
55	Kwitansi BKP ke Bendahara Khusus	24	Buku	30,000	720,000
56	BLANKO SOP-PBB-P2	19	Buku	81,000	1,539,000

57	Blanko LSPOP (Lampiran Pemberitahuan Obyek Pajak)	27	Buku	81,000	2,187,000
58	Blanko Surat Pernyataan Wajib Pajak	39	Buku	45,000	1,755,000
59	Blanko Permohonan Pendaftaran Obyek Pajak Baru	30	Buku	45,000	1,350,000
60	Blanko Permohonan Mutasi Pecahan /sebagian Obyek PBB-P2	13	Buku	45,000	585,000
61	Blanko Permohonan Mutasi Gabung Obyek PBB-P2	13	Buku	45,000	585,000
62	Blanko Perhitungan Bersama SSPD-BPHTB	70	Buku	81,543	5,708,010
63	Kartu Tanda Pembayaran Retribusi Parkir di Tepi Jalan (Sepeda Motor)	551	Buku	9,500	5,234,500
64	Kartu Tanda Pembayaran Retribusi Parkir di Tepi Jalan (Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya)	563	Buku	10,000	5,630,000
65	Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir(Sepeda Motor)	535	Buku	9,500	5,082,500
66	Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir (Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya)	293	Buku	9,500	2,783,500
67	Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir (Mikro Bus, Bus, Truck dan sejenisnya)	100	Buku	10,000	1,000,000
68	Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir (Tronton, Trailer dan sejenisnya)	45	Buku	10,000	450,000
69	Karcis Pasar Khusus Type A	1,134	Buku	7,500	8,505,000
70	Karcis Retribusi Persampahan Untuk Kelompok Perumahan (Rp. 5.000)	500	Buku	7,527	3,763,500
71	Karcis Retribusi Persampahan Untuk Kelompok Perumahan (Rp. 3.000)	200	Buku	7,527	1,505,400
72	Karcis Retribusi Persampahan Untuk Kelompok Perumahan (Rp. 2.000)	100	Buku	7,527	752,700
73	Karcis Retribusi Persampahan Untuk Kelompok Perkantoran	50	Buku	7,527	376,350
74	Karcis Retribusi Persampahan Untuk Kelompok Perkantoran (Rp. 5.000)	484	Buku	7,527	3,643,068
75	Karcis Retribusi Persampahan Untuk Kelompok Perkantoran (Rp. 10.000)	20	Buku	7,527	150,540
76	Karcis Retribusi Persampahan Untuk Kelompok Perkantoran (Rp. 50.000)	20	Buku	7,527	150,540
77	Karcis Retribusi Persampahan Untuk Kelompok Perkantoran (Rp. 30.000)	16	Buku	7,527	120,432
78	Karcis Retribusi Persampahan Untuk Kelompok Perkantoran (Rp. 250.000)	19	Buku	7,527	143,013
79	Karcis Retribusi Persampahan Untuk Kelompok Rumah Makan (Rp. 7.500)	98	Buku	7,527	737,646
80	Karcis Retribusi Persampahan Untuk Kelompok Rumah Makan (Rp. 100.000)	19	Buku	7,527	143,013
81	Karcis Retribusi Persampahan Untuk Kelompok Rumah Makan (Rp. 4.000)	50	Buku	7,527	376,350
82	Karcis Retribusi Persampahan Untuk Kelompok Pedagang (Rp. 5.000)	71	Buku	7,527	534,417

83	Karcis Retribusi Persampahan Untuk Kelompok Pedagang (Rp. 10.000)	226	Buku	7,527	1,701,102
84	Karcis Retribusi Persampahan Untuk Kelompok Pedagang (Rp. 7.500)	47	Buku	7,527	353,769
85	Karcis Retribusi Persampahan Untuk Kelompok Pedagang (Rp. 15.000)	29	Buku	7,500	217,500
86	Karcis Retribusi Persampahan Untuk Kelompok Pedagang (Rp. 30.000)	9	Buku	7,500	67,500
87	Karcis Retribusi Persampahan Untuk Kelompok Pedagang (Rp. 3.000)	82	Buku	7,527	617,214
88	Karcis Retribusi Persampahan Untuk Kelompok Pedagang (Rp. 9.000)	49	Buku	7,527	368,823
89	Karcis Retribusi Persampahan Untuk Kelompok Pendidikan (Rp. 5.000)	191	Buku	7,527	1,437,657
90	Karcis Retribusi Persampahan Untuk Kelompok Pendidikan (Rp. 50.000)	14	Buku	7,527	105,378
TOTAL					285,282,259

Menyetujui
Pengurus Barang
BAPENDA Kab. Lombok Tengah


NANA HERLIANA, A.Md.
NIP. 199412232020122015

Mengetahui
Kepala BAPENDA
Kabupaten Lombok Tengah


BAIQ ALUH WINDAYU WIRANOM, S.E., M.M.
NIP. 197307291997032008

**BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK DAERAH
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

NOMOR : 024/928 / BAPENDA / 2024

Pada hari ini senin tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : NANA HERLIANA, A.Md
NIP : 19941223 202012 2 015
Jabatan : Pengurus Barang
dalam hal ini bertindak selaku Pengurus Barang pada Badan Pendapatan Daerah, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;

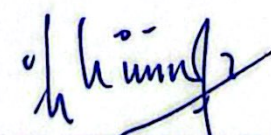
- II. Nama : ZAFRULLAH HARIADI, S.P
NIP : 19830614 200604 1 010
Jabatan : Kasubbag Umum kepegawaian dan Keuangan
dalam hal ini bertindak selaku Kasubbag Umum kepegawaian dan Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Menyatakan telah melakukan rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah untuk Triwulan IV (Oktober s/d Desember) Tahun Anggaran 2024 pada Badan Pendapatan Daerah dengan cara membandingkan data Pengadaan dan data Penghapusan Barang Milik Daerah pada Laporan Barang Pengguna yang disusun oleh Pengguna barang dengan Laporan Rekapitulasi Data Pengadaan dan Data Penghapusan Barang Milik Daerah dengan hasil sesuai data yang disajikan dalam lampiran Berita Acara ini, dan merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan
Keuangan

ZAFRULLAH HARIADI, S.P
NIP. 198306142006041010

Pengurus Barang

NANA HERLIANA, A.Md
NIP. 19941223 2020122015

**BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK DAERAH
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR : 024/112-a / BAPENDA / 2024**

Pada hari ini Rabu tanggal delapan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : BAIQ ALUH WINDAYU WIRANOM, S.E., M.M.
NIP : 197307291997032008
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab Pengguna Barang pada Badan Pendapatan Daerah, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

- II. Nama : TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt., M.Sc., M.Eng.
NIP : 197305101999021001
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lombok Tengah
dalam hal ini bertindak selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah untuk Tahun Anggaran 2024 pada lingkup Badan Pendapatan Daerah dengan cara membandingkan data Pengadaan dan Data Penghapusan Barang Milik Daerah pada Laporan Barang Pengguna yang disusun oleh Pengguna Barang dengan Laporan Rekapitulasi Data Pengadaan dan Data Penghapusan Barang Daerah yang disusun oleh Bidang Aset Daerah untuk Triwulan IV (Oktober s/d Desember) dengan hasil sesuai data yang disajikan dalam lampiran Berita Acara ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala Badan Keuangan Aset Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,

TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt., M.Sc., M.Eng.

NIP. 197305101999021001

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,

BAIQ ALUH WINDAYU W., SE., MM.

NIP. 197307291997032008

UNIT PENGGUNA BARANG : BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN/KOTA : LOMBOK TENGAH
 PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT
 KODE LOKASI : 12.15.02.13.01.01.01

DAFTAR PENGADAAN BARANG
 DARI TANGGAL JANUARI S/D DESEMBER 2024

No.	Jenis Barang yang dibeli	SPK/Perjanjian/Kontrak		DPA/SP2D/Kwitansi		BAST			Jumlah			Dipergunakan pada unit
		Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Banyaknya Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)		
1	Printer Dot Matrix LQ 310	05 Februari 2024	01/SP/Bapenda/2024	08 Maret 2024	001/BPK-LS/BAPENDA/2024	06 Februari 2024	01/BAPB/Bapenda/2024	15 bh	4,850,000.00	72,750,000.00	Bapenda Lombok Tengah	
2	Almari Dokumen/Gredensa	05 Maret 2024	03/SP/Bapenda/2024	28 Maret 2024	003/LS/BPK-BAPENDA/2024	18 Maret 2024	03/BAPB/Bapenda/2024	1 bh	14,490,000.00	14,490,000.00	Bapenda Lombok Tengah	
3	Kursi Rapat	05 Maret 2024	03/SP/Bapenda/2024	28 Maret 2024	003/LS/BPK-BAPENDA/2024	18 Maret 2024	03/BAPB/Bapenda/2024	12 bh	1,102,700.00	13,232,400.00	Bapenda Lombok Tengah	
4	Lemari	05 Maret 2024	03/SP/Bapenda/2024	28 Maret 2024	003/LS/BPK-BAPENDA/2024	18 Maret 2024	03/BAPB/Bapenda/2024	2 bh	5,000,000.00	10,000,000.00	Bapenda Lombok Tengah	
5	Meja Rapat Bundar	05 Maret 2024	03/SP/Bapenda/2024	28 Maret 2024	003/LS/BPK-BAPENDA/2024	18 Maret 2024	03/BAPB/Bapenda/2024	1 set	26,647,600.00	26,647,600.00	Bapenda Lombok Tengah	
6	Sofa + Meja	05 Maret 2024	03/SP/Bapenda/2024	28 Maret 2024	003/LS/BPK-BAPENDA/2024	18 Maret 2024	03/BAPB/Bapenda/2024	1 set	10,000,000.00	10,000,000.00	Bapenda Lombok Tengah	
7	Sofa	16 April 2024	36/SP/BAPENDA/2024	30 April 2024	0105/BPK-GU/BAPENDA/2024	18 April 2024	40/BAPB/BAPENDA/2024	1 set	5,837,850.00	5,837,850.00	Bapenda Lombok Tengah	
8	Smart TV 98" Samsung LED	24 April 2024	12/SP/Bapenda/2024	07 Juni 2024	008/LS/BPK-BAPENDA/2024	06 Mei 2024	12/BAPB/Bapenda/2024	1 Unit	86,000,000.00	86,000,000.00	Bapenda Lombok Tengah	

No.	Jenis Barang yang dibeli	SPK/Perjanjian/Kontrak		DPA/SP2D/Kwitansi		BAST		Jumlah			Dipergunakan pada unit
		Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Banyaknya Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Personal Komputer, AIO Lenovo Idea Centre3 22/AP7-F0GG6BID, Core i3, RAM 8GB, 256GB SSD, Windows 11 Home Black	24 April 2024	09/SP/Bapenda/2024	10 JUNI 2024	009/LS/BPK- BAPENDA/2024	06 Mei 2024	09/BAPB/Bapenda/2024	2 Unit	10,680,000.00	21,360,000.00	Bapenda Lombok Tengah
10	Laptop, Acer Aspire 3 A314 36M-37EE Intel Core i3 N305 (Core 8) / RAM 8GB / 512 SSD Windows 11 + OHS / 14 FHID	24 April 2024	11/SP/Bapenda/2024	10 JUNI 2024	010/LS/BPK- BAPENDA/2024	06 Mei 2024	11/BAPB/Bapenda/2024	4 Unit	10,116,000.00	40,464,000.00	Bapenda Lombok Tengah
11	WIFI EXTENDER	12 Agustus 2024	79/SP/BAPENDA/2024	14 AGUSTUS 2024	237/BPK- GU/BAPENDA/2024	13 AGUSTUS 2024	79/BAPB/BAPENDA/2024	1 Unit	250,000.00	250,000.00	Bapenda Lombok Tengah
12	ASUS Dekstop L4NDEU4	24 April 2024	09/SP/Bapenda/2024	28 AGUSTUS 2024	017/LS/BPK/BAPENDA/2024	06 Mei 2024	09/BAPB/Bapenda/2024	1 Unit	10,680,000.00	10,680,000.00	Bapenda Lombok Tengah
13	Personal Komputer, AIO Lenovo Idea Centre3 22/AP7-F0GG6BID, Intel Celeron 7305, RAM 8GB	24 April 2024	09/SP/Bapenda/2024	28 AGUSTUS 2024	017/LS/BPK/BAPENDA/2024	06 Mei 2024	09/BAPB/Bapenda/2024	1 Unit	10,680,000.00	10,680,000.00	Bapenda Lombok Tengah
14	Scanner ADF Epson DS-970	03 Oktober 2024	23/SP/Bapenda/2024	31 Oktober 2024	024/LS/BPK- Bapenda/2024	14 Oktober 2024	23/BAPB/Bapenda/2024	1 Unit	25,290,000.00	25,290,000.00	Bapenda Lombok Tengah
15	Printer Dot Matrix LQ 310	03 Oktober 2024	27/SP/Bapenda/2024	31 Oktober 2024	023/LS/BPK- Bapenda/2024	14 Oktober 2024	27/BAPB/Bapenda/2024	8 buah	4,950,000.00	39,600,000.00	Bidang Pendapatan Daerah

No.	Jenis Barang yang dibeli	SPK/Perjanjian/Kontrak		DPA/SP2D/Kwitansi		BAST			Jumlah			Dipergunakan pada unit
		Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Banyaknya Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16	Printer Epson L3210	03 Oktober 2024	27/SP/Bapenda/2024	31 Oktober 2024	023/LS/BPK-Bapenda/2024	14 Oktober 2024	27/BAPB/Bapenda/2024	4 buah	3,600,000.00	14,400,000.00	Bidang Pendapatan Daerah dan Sekretariat	
17	Papan Nama Organisasi	21 November 2024	128/SP/BAPEND A/2024	25 November 2024	0416/BPK-GU/BAPENDA/2024	22 November 2024	128/BAPB/BAPENDA /2024	1 buah	650,000.00	650,000.00	Di Pelayanan Mail Pelayanan Publik	
18	Laptop Acer Aspire Go AG14 Intel Core i3 N305 (Core 8) / RAM 8GB / 512 SSD Windows 11 + _ OHS / 14 FHD	03 Oktober 2024	28/SP/Bapenda/2024	22 November 2024	025/LS/BPK-Bapenda/2024	14 Oktober 2024	28/BAPB/Bapenda/2024	2 Unit	10,100,000.00	20,200,000.00	Bidang Pendapatan dan Bid. Pengendalian	
19	Penataan Ruang Pelayanan Pajak Daerah	14 Oktober 2024	027/02/SPK/BAP ENDA/2024	11 Desember 2024	026/LS/BPK-Bapenda/2024	16 Desember 2024	01/BAFHO/BAPEND A/2024	1 set	115,000,000.00	115,000,000.00	Bidang Pendapatan dan Bid. Pengendalian	
20	Curtain Vertical Blind	21 November 2024	127/SP/BAPEND A/2024	26 November 2024	0431/BPK-GU/BAPENDA/2024	25 November 2024	127/BAPB/BAPENDA /2024	10.75 m2	700,000.00	7,525,000.00	Ruang Kepala Badan	
21	Meja Rapat Custom Design	27 November 2024	133/SP/BAPEND A/2024	29 November 2024	0445/BPK-GU/BAPENDA/2024	28 November 2024	133/BAPB/BAPENDA /2024	1 unit	5,059,000.00	5,059,000.00	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	

No.	Jenis Barang yang dibeli	SPK/Perjanjian/Kontrak		DPA/SP2D/Kwitansi		BAST		Jumlah			Dipergunakan pada unit
		Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Banyaknya Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Epson Ribbon Catridge	19 November 2024	124.a/PPBJ/BAP ENDA/2024	20 November 2024	0443/BPK-GU/BAPENDA/2024	20 November 2024	124.a/BAPB/BAPEN DA/2024	79 pcs	85.000.00	6,715,000.00	Bidang Pendapatan Daerah
23	Kalkulator Besar	15 November 2024	123.a/PPBJ/BAP ENDA/2024	29 November 2024	0444/BPK-GU/BAPENDA/2024	18 November 2024	123.a/BAPB/BAPEN DA/2024	12 buah	144.000.00	1,728,000.00	Bidang Pendapatan Daerah
24	Meja Pelayanan Type 1	03 Oktober 2024	31/SP/Bapenda/2024	04 Desember 2024	027/LS/BPK-Bapenda/2024	21 Oktober 2024	31/BAPB/Bapenda/2024	1 Unit	17,700,000.00	17,700,000.00	Bidang Pendapatan Daerah
25	Meja Pelayanan type 2	03 Oktober 2024	31/SP/Bapenda/2024	04 Desember 2024	027/LS/BPK-Bapenda/2024	21 Oktober 2024	31/BAPB/Bapenda/2024	1 Unit	23,300,000.00	23,300,000.00	Bidang Pendapatan Daerah
26	Biaya Pengawasan penataan Ruang	09 Oktober 2024	32/SP/Bapenda/2024	04 Desember 2024	028/LS/BPK-Bapenda/2024	13 November 2024	32/BAPB/Bapenda/2024	1 buah	8,380,284.00	8,380,000.00	Bidang Pendapatan Daerah
27	Biaya Perencanaan penataan Ruang	9/26/2024	027/30.a/Bapenda/2024	04 Desember 2024	029/LS/BPK-Bapenda/2024	02 Oktober 2024	30.a/BAPB/Bapenda/2024	1 buah	13,892,000.00	13,892,000.00	Bidang Pendapatan Daerah

No.	Jenis Barang yang dibeli	SPK/Perjanjian/Kontrak		DPA/SP2D/Kwitansi		BAST		Jumlah			Dipergunakan pada unit
		Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Banyaknya Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Rak Buku Type A7	01 Oktober 2024	027/26/Bapenda/2024	09 Desember 2024	032/LS/BPK-Bapenda/2024	14 Oktober 2024	26/BAPB/Bapenda/2024	5 Unit	3.700.000,00	18.500.000,00	Bidang Pendapatan Daerah
29	Rak Buku Type A8	01 Oktober 2024	027/26/Bapenda/2024	09 Desember 2024	032/LS/BPK-Bapenda/2024	14 Oktober 2024	26/BAPB/Bapenda/2024	1 Unit	2.800.000,00	2.800.000,00	Bidang Pendapatan Daerah
30	Laptop, Asus BG1409CVA Intel Core i7 / RAM 16 GB / ITB SSD / Windows 11 Home	13 November 2024	37/SP/Bapenda/2024	12 Desember 2024	035/LS/BPK-Bapenda/2024	11/20/2024	37/BAPB/Bapenda/2024	1 Unit	19.450.000,00	19.450.000,00	Bapenda Lombok Tengah
31	PC All In One Acer Aio Aspire C24-1800	17 Desember 2024	41/SP/Bapenda/2024	18 Desember 2024	039/LS/BPK-Bapenda/2024	20 Desember 2024	41/BAPB/Bapenda/2024	3 Unit	10.600.000,00	31.800.000,00	Bapenda Lombok Tengah
JUMLAH KIB B										694.380.850,00	
Total Pengadaan Belanja Modal										694.380.850,00	

Mengetahui,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

BAIQ ALUH WINDAYU W. SE..MM.
 NIP. 197307291997032008

Pengurus Barang



NANA HERLIANA, A.Md
 NIP. 19941223 202012 2 015

**REKAPITULASI DAN CATATAN ATAS REKONSILIASI NILAI ASET TRW I,II,III,IV
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NAMA OPD : Badan Pendapatan Daerah
KODE LOKASI : 12.15.02.13.01.01.01

No	AKUN NERACA	NERACA AWAL 2023	NERACA SESUAI 108	LRA TRIWULAN I,II,III,IV	PENAMBAHAN			PENGURANGAN			NILAI AKHIR NERACA TW I,II,III,IV 2024	KET	
					REKLAS	HIBAH	MUTASI	REKLAS	HIBAH	MUTASI			EKSTRA
A	ASET LANCAR												
1	Persediaan												
A	ASET TETAP	9,315,345,332.23	9,315,345,332.23	694,380,650.00					8,693,000.00			10,001,033,182.23	
1	KIB A (Tanah)	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00								400,000,000.00	
2	KIB B (Peralatan dan Mesin)	5,598,030,954.23	5,598,030,954.23	694,380,650.00					8,693,000.00			6,283,718,804.23	
3	KIB C (Gedung dan Bangunan)	3,032,648,378.00	3,032,648,378.00	0.00								3,032,648,378.00	
4	KIB D (Jalan, rigasi, dan Jaringan)	284,666,000.00	284,666,000.00	0.00								284,666,000.00	
5	KIB E (Aset Tetap Lainnya)	0.00	0.00	0.00								0.00	
6	KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan)	0.00	0.00	0.00								0.00	
B	ASET LAINNYA	279,394,562.51	279,394,562.51	0.00								279,394,562.51	
1	Aset Tidak Berwujud												
2	Aset Lain-lain	279,394,562.51	279,394,562.51	0.00									
C	TOTAL (A+B)	9,594,739,894.74	9,594,739,894.74	694,380,650.00				0.00	8,893,000.00			10,200,427,744.74	

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

TAUFIKKURAHMAN PUJA NOTE, S.P.L., M.Sc., M.Eng
NIP. 197305101999021001



BAIQ ALUH WINDAYU W., SE., MM,
NIP. 197307291997032008

CATATAN ATAS REKONSILIASI NILAI ASET :

- 1 Ekstrakomptable berupa :
 - Wifi Extender sebanyak 1 buah, dengan harga satuan Rp.250.000.
 - Epson Ribbon Cartridge sebanyak 79 buah, dengan harga satuan Rp.85.000.- Total harga Rp.6.715.000.-
 - Kalkulator Besar sebanyak 12 buah, dengan harga satuan Rp.144.000.- Total harga Rp.1.728.000.-

BERITA ACARA REKONSILIASI

Pada hari ini **Selasa** tanggal **empat belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh lima** telah disenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan perubahan Ekuitas dan Neraca antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut pengguna Anggaran, dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku SKPKD, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah/PPKD. Pengguna Anggaran telah menyampaikan laporan/data sebagai bahan rekonsiliasi, berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran Sampai Dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2024
2. Laporan Operasional Sampai Dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2024
3. Laporan Perubahan Ekuitas Per Tanggal 31 Desember 2024
4. Neraca Per Tanggal 31 Desember 2024
5. Laporan Perubahan SAL (Khusus BLUD) Per Tanggal 31 Desember 2024
6. Laporan Arus Kas (Khusus BLUD) Per Tanggal 31 Desember 2024

Selanjutnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku SKPKD menyediakan data transaksi dan laporan terkait yang diproses berdasarkan SP2D/STS dan bukti transaksi keuangan lainnya yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Kesalahan / ketidakcocokkan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, akan dijadikan dasar perbaikan terhadap data dan laporan keuangan di kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



WIDYA ASTUTI, S.E., M.Si.
NIP: 19750302 200003 2 006

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,



BAIQ ALUH WINDAYU W., S.E., MM.
NIP. 197307291997032008

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LRA
 BULAN DESEMBER 2024
 TAHUN ANGGARAN 2024

No Urut	Uraian / Rincian Pos-pos LRA	LRA Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LRA Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
1	PENDAPATAN DAERAH	183.860.737.486,12	183.860.737.486,12				183.860.737.486,12
a.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	183.860.737.486,12	183.860.737.486,12				183.860.737.486,12
	Pajak Daerah	182.328.157.865,50	182.328.157.865,50				182.328.157.865,50
	Retribusi Daerah	975.000,00	975.000,00				975.000,00
	Lain-lain PAD yang Sah	1.531.604.620,62	1.531.604.620,62				1.531.604.620,62
2	BELANJA DAERAH	17.256.034.294,00	17.256.034.294,00				17.256.034.294,00
a.	BELANJA OPERASI	16.561.653.444,00	16.561.653.444,00				16.561.653.444,00
	Belanja Pegawai	14.447.736.632,00	14.447.736.632,00				14.447.736.632,00
	Belanja Barang dan Jasa	2.113.916.812,00	2.113.916.812,00				2.113.916.812,00
b.	BELANJA MODAL	694.380.850,00	694.380.850,00				694.380.850,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	694.380.850,00	694.380.850,00				694.380.850,00

Praya, 14 Januari 2024

a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan


WIDYA ASTUTI, S.E., M.Si.
NIP: 19750302 200003 2 006

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,


BAIQ ALUH WINDAYU W., S.E., MM.
NIP. 197307291997032008

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI NERACA
 BULAN DESEMBER 2024
 TAHUN ANGGARAN 2024

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos Neraca	NERACA Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		NERACA Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
A	ASET	38.585.930.317,95	38.585.930.317,95				38.585.930.317,95
1	ASET LANCAR	34.973.588.378,12	34.973.588.378,12				34.973.588.378,12
	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00				0,00
	Piutang	88.187.517.626,14	88.187.517.626,14				88.187.517.626,14
	Penyisihan Piutang	(53.499.211.507,02)	(53.499.211.507,02)				(53.499.211.507,02)
	Persediaan	285.282.259,00	285.282.259,00				285.282.259,00
2	INVESTASI JANGKA PANJANG						
3	ASET TETAP	3.500.959.335,11	3.500.959.335,11				3.500.959.335,11
	Tanah	400.000.000,00	400.000.000,00				400.000.000,00
	Peralatan dan Mesin	6.283.718.804,23	6.283.718.804,23				6.283.718.804,23
	Gedung dan Bangunan	3.032.648.378,00	3.032.648.378,00				3.032.648.378,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	284.666.000,00	284.666.000,00				284.666.000,00
	Akumulasi Penyusutan	(6.500.073.847,12)	(6.500.073.847,12)				(6.500.073.847,12)
4	ASET LAINNYA	111.382.604,72	111.382.604,72				111.382.604,72
B	KEWAJIBAN	171.469.811,00	171.469.811,00				171.469.811,00
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	171.469.811,00	171.469.811,00				171.469.811,00
C	EKUITAS	38.414.460.506,95	38.414.460.506,95				38.414.460.506,95
D	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	38.585.930.317,95	38.585.930.317,95				38.585.930.317,95

Praya, 14 Januari 2024

a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



WIDYA ASTUTI, S.E., M.Si.
NIP: 19750302 200003 2 006

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,



BAIQ ALUH WINDAYU W., S.E., MM.
NIP. 197307291997032008

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN OPERASIONAL
 BULAN DESEMBER 2024
 TAHUN ANGGARAN 2024

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos LO	LO Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LO Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
A	PENDAPATAN DAERAH - LO	192.639.681.181,37	192.639.681.181,37				192.639.681.181,37
	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	192.639.681.181,37	192.639.681.181,37				192.639.681.181,37
	Pajak Daerah - LO	191.107.101.560,75	191.107.101.560,75				191.107.101.560,75
	Retribusi Daerah - LO	975.000,00	975.000,00				975.000,00
	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	1.531.604.620,62	1.531.604.620,62				1.531.604.620,62
B	BEBAN DAERAH	28.228.421.134,00	28.228.421.134,00				28.228.421.134,00
	BEBAN OPERASI	28.228.421.134,00	28.228.421.134,00				28.228.421.134,00
	Beban Pegawai	12.916.629.614,00	12.916.629.614,00				12.916.629.614,00
	Beban Barang dan Jasa	2.120.269.897,00	2.120.269.897,00				2.120.269.897,00
	Beban Penyisihan Piutang	12.848.829.936,00	12.848.829.936,00				12.848.829.936,00
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	342.691.687,00	342.691.687,00				342.691.687,00
C	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	164.411.260.047,37	164.411.260.047,37				164.411.260.047,37
D	KEGIATAN NON OPEASIONAL	576.677.888,48	576.677.888,48				576.677.888,48
	SURPLUS NON OPERASIONAL	576.677.888,48	576.677.888,48				576.677.888,48
	DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00	0,00				0,00
E	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON - OPERASIONAL	576.677.888,48	576.677.888,48				576.677.888,48
F	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00				0,00
G	SURPLUS/DEFISIT LO	164.987.937.935,85	164.987.937.935,85				164.987.937.935,85

Praya, 14 Januari 2024

a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

WIDYA ASTUTI, S.E., M.Si.
NIP: 19750302 200003 2 006

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,

BAIQ ALUH WINDAYU W., S.E., MM.
NIP. 197307291997032008

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BULAN DESEMBER 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos LPE	LPE Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LPE Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
A	EKUITAS AWAL	40.035.134.763,23	40.035.134.763,23				40.035.134.763,23
	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	164.987.937.935,85	164.987.937.935,85				164.987.937.935,85
	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:						
	RK PPKD	(166.608.612.192,12)	(166.608.612.192,12)				(166.608.612.192,12)
	EKUITAS AKHIR	38.414.460.506,95	38.414.460.506,95				38.414.460.506,95

Praya, 14 Januari 2024

a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan


WIDYA ASTUTI, S.E., M.Si.
NIP: 19750302 200003 2 006

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,


BAIQ ALUH WINDAYU W., S.E., MM.
NIP. 197307291997032008



PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	181.460.899.220,00	183.860.737.486,12	101,32	150.940.558.113,14
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	181.460.899.220,00	183.860.737.486,12	101,32	150.940.558.113,14
4.1.01	Pajak Daerah	181.460.899.220,00	182.328.157.865,50	100,48	147.240.146.529,07
4.1.01.06	Pajak Hotel	29.926.836.083,87	30.777.229.162,79	102,84	31.017.043.511,84
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	29.926.836.083,87	30.777.229.162,79	102,84	30.282.573.880,84
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	29.926.836.083,87	30.777.229.162,79	102,84	30.282.573.880,84
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	0,00	0,00	0,00	734.469.631,00
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen				734.469.631,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	26.557.660.472,48	27.212.701.343,48	102,47	26.121.087.581,04
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	26.557.660.472,48	27.212.701.343,48	102,47	20.356.952.241,04
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	26.557.660.472,48	27.212.701.343,48	102,47	20.356.952.241,04
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	775.504.668,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya				775.504.668,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	235.021.466,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya				235.021.466,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	4.753.609.206,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya				4.753.609.206,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	639.694.120,00	635.378.016,00	99,33	8.813.025.350,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	236.639.706,00	247.754.986,00	104,70	8.342.278.951,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	236.639.706,00	247.754.986,00	104,70	8.342.278.951,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	342.160.788,00	291.261.919,00	85,12	315.763.889,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	342.160.788,00	291.261.919,00	85,12	315.763.889,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	60.893.626,00	96.361.111,00	158,24	154.982.510,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	60.893.626,00	96.361.111,00	158,24	154.982.510,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.631.245.928,00	1.947.094.265,00	74,00	2.474.103.456,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.631.245.928,00	1.947.094.265,00	74,00	2.465.103.456,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.631.245.928,00	1.947.094.265,00	74,00	2.465.103.456,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain				9.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	23.073.604.102,00	23.073.604.102,00	100,00	27.939.630.764,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	23.073.604.102,00	23.073.604.102,00	100,00	27.939.630.764,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	23.073.604.102,00	23.073.604.102,00	100,00	27.939.630.764,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	1.186.539.192,00	1.206.617.014,00	101,69	2.466.398.329,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	1.186.539.192,00	1.206.617.014,00	101,69	2.466.398.329,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	1.186.539.192,00	1.206.617.014,00	101,69	2.466.398.329,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	10.775.373.200,00	487.944.413,00	4,53	327.308.567,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	10.775.373.200,00	487.944.413,00	4,53	327.308.567,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	10.775.373.200,00	487.944.413,00	4,53	327.308.567,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	8.704.315.763,00	4.350.000,00	0,05	18.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	8.704.315.763,00	4.350.000,00	0,05	18.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	8.704.315.763,00	4.350.000,00	0,05	18.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.750.278.803,00	3.549.329.804,00	202,79	1.348.208.186,58
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.750.278.803,00	3.549.329.804,00	202,79	1.348.208.186,58
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.750.278.803,00	3.549.329.804,00	202,79	1.348.208.186,58
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	24.110.079.000,00	16.013.894.795,00	66,42	17.149.230.084,61
4.1.01.15.01	PBBP2	24.110.079.000,00	16.013.894.795,00	66,42	17.149.230.084,61
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	24.110.079.000,00	16.013.894.795,00	66,42	17.149.230.084,61
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	29.000.000.000,00	35.702.051.083,00	123,11	29.566.110.699,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	29.000.000.000,00	35.702.051.083,00	123,11	29.566.110.699,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	29.000.000.000,00	35.702.051.083,00	123,11	29.566.110.699,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu ([],PBJT),	23.105.272.555,65	41.717.963.867,23	180,56	0,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	6.737.466.720,52	14.020.141.538,12	208,09	0,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	5.802.179.592,18	11.595.812.719,12	199,85	

4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	935.287.128,34	2.424.328.819,00	259,21	
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	7.548.879.315,00	8.208.720.449,00	108,74	0,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.548.879.315,00	8.208.720.449,00	108,74	
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	5.441.341.044,13	14.740.134.763,61	270,89	0,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	3.986.335.568,03	11.280.418.876,44	282,98	
4.1.01.19.03.0002	PBJT-Hostel	497.392.444,61	280.158.591,00	56,33	
4.1.01.19.03.0003	PBJT-Vila	896.918.503,93	2.964.977.501,97	330,57	
4.1.01.19.03.0006	PBJT-Losmen	24.768.086,56	214.479.794,20	865,95	
4.1.01.19.03.0008	PBJT-Pesanggarahan	35.926.441,00	100.000,00	0,28	
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	226.766.596,00	419.398.114,00	184,95	0,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	226.766.596,00	419.398.114,00	184,95	
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	3.150.818.880,00	4.329.569.002,50	137,41	0,00
4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	0,00	37.020,00		
4.1.01.19.05.0007	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	3.000.000.000,00	3.695.696.870,00	123,19	
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	20.297.875,33	382.993.627,50	1.886,87	
4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	30.521.004,67			
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	100.000.000,00	250.841.485,00	250,84	
4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	975.000,00	0,00	1.024.808.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas				
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis				
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran				
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los				
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus				
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi				
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	0,00	975.000,00	0,00	1.024.808.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	397.409.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				397.409.000,00
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah				
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan				
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium				
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat				
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	627.399.000,00
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan				627.399.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan				
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan				
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan				
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga				
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman				
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan				
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan				

4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	0,00	975.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya		975.000,00		
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol				
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung				
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)				
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	1.531.604.620,62	0,00	2.675.603.584,07
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara				
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai				
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	736.441.127,07	0,00	1.826.356.903,53
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	736.441.127,07	0,00	1.826.356.903,53
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		736.441.127,07		1.826.356.903,53
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan				
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	795.163.493,55	0,00	849.246.680,54
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	89.000.741,00	0,00	171.469.042,54
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel		89.000.741,00		165.798.321,54
4.1.04.12.06.0003	Pendapatan Denda Pajak Losmen				5.670.721,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	32.164.963,70	0,00	112.423.542,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya		32.164.963,70		101.016.786,00
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya				9.616.176,00
4.1.04.12.07.0003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya				1.790.580,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	21.135.334,00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir				21.135.334,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	673.997.788,85	0,00	540.968.762,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2		673.997.788,85		540.968.762,00
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak				3.250.000,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.13.01.0001	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya				
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.13.03.0001	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan				
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan				
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa				
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS				
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS				
4.1.04.15.10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.10.0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tamsil Guru PNSD				
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.15.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0041	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik				
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD				
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan				
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain				
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro				
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	181.460.899.220,00	183.860.737.486,12	101,32	150.940.558.113,14
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis				
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD				
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	181.460.899.220,00	183.860.737.486,12	101,32	150.940.558.113,14
5	BELANJA DAERAH	21.471.316.126,00	17.256.034.294,00	80,37	16.249.019.064,00
5.1	BELANJA OPERASI	20.759.276.318,00	16.561.653.444,00	79,78	15.619.566.664,00
5.1.01	Belanja Pegawai	18.210.311.668,00	14.447.736.632,00	79,34	13.777.145.811,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.640.635.629,00	6.441.166.886,00	97,00	6.212.402.203,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	5.278.323.021,00	5.191.670.668,00	98,36	4.994.725.060,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	5.278.323.021,00	5.191.670.668,00	98,36	4.994.725.060,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK				
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	517.889.586,00	516.363.234,00	99,71	509.142.062,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	517.889.586,00	516.363.234,00	99,71	509.142.062,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK				
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	134.599.872,00	126.030.000,00	93,63	138.990.000,00

5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	134.599.872,00	126.030.000,00	93,63	138.990.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	142.482.526,00	79.340.000,00	55,68	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	142.482.526,00	79.340.000,00	55,68	0,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK				
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	238.838.336,00	224.770.000,00	94,11	239.835.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	238.838.336,00	224.770.000,00	94,11	239.835.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK				
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	324.409.156,00	298.949.760,00	92,15	322.993.200,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	324.409.156,00	298.949.760,00	92,15	322.993.200,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK				
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.012.329,00	3.971.051,00	98,97	6.634.957,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.012.329,00	3.971.051,00	98,97	6.634.957,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	80.803,00	72.173,00	89,32	81.924,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	80.803,00	72.173,00	89,32	81.924,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK				
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS				
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK				
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS				
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK				
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS				
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK				
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.483.149.078,00	2.416.623.721,00	97,32	2.363.742.345,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.483.149.078,00	2.416.623.721,00	97,32	2.363.742.345,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.483.149.078,00	2.416.623.721,00	97,32	2.363.742.345,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK				
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.086.526.961,00	5.589.946.025,00	61,52	5.201.001.263,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	9.073.044.961,00	5.576.464.025,00	61,46	5.152.856.387,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	896.626.075,00	896.626.075,00	100,00	904.705.374,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	690.809.962,00	690.809.962,00	100,00	630.434.062,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	131.562.296,00	59.208.618,00	45,00	85.802.301,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	917.511.943,00	917.511.943,00	100,00	1.297.590.641,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	15.849.793,00	15.849.793,00	100,00	82.250.515,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	538.768.660,00	4.130.595,00	0,77	9.638.061,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	435.215.788,00	0,00	0,00	198.747,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	87.513.940,00	80.013.927,00	91,43	62.513.934,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.205.503.950,00	0,00	0,00	824.722.760,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.450.000.000,00	1.404.999.998,00	96,90	1.254.999.992,00
5.1.01.03.01.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(J),PBJT],	2.703.682.554,00	1.507.313.114,00	55,75	0,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	34.662.876,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan				
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan				
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar				
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor				

5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi				
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah				1.166.906,00
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan				33.495.970,00
5.1.01.03.02.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan				
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan				
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga				
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah				
5.1.01.03.02.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol				
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Peretujuan Bangunan Gedung				
5.1.01.03.02.0032	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)				
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD				
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD				
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	13.482.000,00	13.482.000,00	100,00	13.482.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.482.000,00	13.482.000,00	100,00	13.482.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)				
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan				
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan				
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD				
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD				
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD				
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD				
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD				
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD				
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD				
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD				
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD				
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD				
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD				
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD				
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD				
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD				
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD				
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH				
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH				
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH				
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH				
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH				
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH				
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH				
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH				
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH				
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD				
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH				
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS				
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.548.964.650,00	2.113.916.812,00	82,93	1.842.420.853,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.577.393.340,00	1.360.306.950,00	86,24	1.004.623.510,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.577.393.340,00	1.360.306.950,00	86,24	1.004.623.510,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	34.307.556,00	21.259.400,00	61,97	0,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia				
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	354.616.800,00	275.741.050,00	77,76	359.260.350,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku				
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman				
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas				
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan				
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya				
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan				
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar				
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran				
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian				
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel				
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	67.201.550,00	66.639.000,00	99,16	266.257.180,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	140.207.760,00	90.768.000,00	64,74	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	574.512.420,00	525.481.500,00	91,47	268.009.980,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.290.000,00	990.000,00	76,74	40.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	46.958.982,00	36.926.000,00	78,63	35.406.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.204.552,00	3.192.000,00	99,61	2.100.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata				
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat				

5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	13.108.720,00	13.080.000,00	99,78	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya				
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura				
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan				
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya				
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	331.985.000,00	316.230.000,00	95,25	68.550.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh				
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan				
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH				
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD				
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)				
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)				
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga				
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional				
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga				
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka				
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00	0,00		0,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya				
5.1.02.01.04.0207	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah				
5.1.02.01.04.0545	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman				
5.1.02.02	Belanja Jasa	527.992.310,00	390.771.482,00	74,01	641.552.265,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	522.052.310,00	384.831.482,00	73,72	240.644.033,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00
5.1.02.02.01.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan				
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.220.000,00	5.110.000,00	29,67	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	90.750.000,00	0,00	0,00	99.000.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara				
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan				
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan				
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian				
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan				
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan				
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan				
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium				
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan				
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	300.000.000,00	287.450.000,00	95,82	60.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli				
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan				
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir				
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO				
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan				
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias				
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi				
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan				
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0,00	0,00	0,00	49.700.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara				
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi				
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi				
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	37.200.000,00	37.200.000,00	100,00	0,00

5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon				
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	9.828.000,00	7.308.871,00	74,37	7.348.094,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	8.280.000,00	512.500,00	6,19	1.000.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah				
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	24.298.000,00	18.061.506,00	74,33	0,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman				
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya				
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	26.276.310,00	20.988.605,00	79,88	22.395.939,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah				
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up				
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN				
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00	1.440.000,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa				
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI				
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3				
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3				
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	635.760,00	635.760,00	100,00	635.760,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	804.240,00	804.240,00	100,00	804.240,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.03.0030	Belanja Sewa Tanah untuk Latihan				
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator				
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang				
5.1.02.02.04.0112	Belanja Sewa Alat Pengolahan Lainnya				
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya				
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio				
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya				
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor				
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga				
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel				
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya				
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya				
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural				
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya				
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur				
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian				
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00	399.468.232,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00	0,00	0,00	399.468.232,00
5.1.02.02.09.0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataaan				
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1				
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan				
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi				
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	48.750.000,00	38.750.000,00	79,49	118.260.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48.750.000,00	38.750.000,00	79,49	118.260.000,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator				
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya				
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	30.500.000,00	28.000.000,00	91,80	91.500.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua				

5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga				
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor				
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya				
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin				
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	18.250.000,00	10.750.000,00	58,90	26.760.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan				
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer				
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer				
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya				
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar				
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum				
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman				
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.04.0023	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya				
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi				
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya				
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	394.829.000,00	324.088.380,00	82,08	77.985.078,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	394.829.000,00	324.088.380,00	82,08	77.985.078,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	107.699.000,00	91.608.380,00	85,06	33.065.078,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	287.130.000,00	232.480.000,00	80,97	44.920.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan				
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)				
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian				
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain				
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS				
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD				
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat				
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				

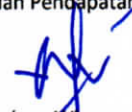
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar				
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan				
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik				
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS				
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD				
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan				
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu				
	JUMLAH BELANJA OPERASI	20.759.276.318,00	16.561.653.444,00	79,78	15.619.566.664,00
5.2	BELANJA MODAL	712.039.808,00	694.380.850,00	97,52	629.452.400,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	712.039.808,00	694.380.850,00	97,52	629.452.400,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa				
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor				
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya				
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	444.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	444.000.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan				
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	444.000.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga				
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus				
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya				
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)				
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal				
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara				
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor				
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan				
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya				
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	406.840.448,00	406.031.850,00	99,80	5.116.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	240.823.504,00	240.302.850,00	99,78	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	240.823.504,00	240.302.850,00	99,78	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	166.016.944,00	165.729.000,00	99,83	5.116.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	164.285.200,00	164.001.000,00	99,83	5.116.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin				
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.731.744,00	1.728.000,00	99,78	0,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran				
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat				
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat				
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	10.116.000,00

5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	10.116.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	10.116.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film				
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya				
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF				
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya				
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum				
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak				
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic				
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU				
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya				
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya				
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi				
5.2.02.08.01.0019	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi				
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya				
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah				
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya				
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah				
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	305.199.360,00	288.349.000,00	94,48	170.220.400,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	154.915.500,00	147.270.000,00	95,06	140.736.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	74.760.000,00	74.520.000,00	99,68	53.238.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	80.155.500,00	72.750.000,00	90,76	87.498.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	150.283.860,00	141.079.000,00	93,88	29.484.400,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer				
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	252.900,00	250.000,00	98,85	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	150.030.960,00	140.829.000,00	93,87	29.484.400,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric				
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan				
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.17.01.0026	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya				
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar				
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar				
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan				
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS				
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler				
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor				
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan				
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan				
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan				
5.2.03.01.01.0028	Belanja Modal Bangunan Industri				

5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan				
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum				
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir				
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman				
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya				
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar				
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD				
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten				
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya				
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten				
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa				
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya				
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor				
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.01.0004	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dangkal				
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya				
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)				
5.2.04.03.05.0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya				
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.06.0004	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya				
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya				
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum				
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik				
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.08.01.0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise				
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS				
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software				
	JUMLAH BELANJA MODAL	712.039.808,00	694.380.850,00	97,52	629.452.400,00
	JUMLAH BELANJA	21.471.316.126,00	17.256.034.294,00	80,37	16.249.019.064,00
	SURPLUS/DEFISIT	159.989.583.094,00	166.604.703.192,12	104,13	134.691.539.049,14
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja				
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD				
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	159.989.583.094,00	166.604.703.192,12	104,13	134.691.539.049,14

Kab. Lombok Tengah, 31 Desember 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah



Baiq Aluh Windayu Wiranom, S.E.,M.M.
NIP. 197307291997032008

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
NERACA



PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Kode Rekening	URAIAN	NERACA 2024	Penyesuaian		NERACA 2023
			Debet	Kredit	
	ASET				
1.1	ASET LANCAR				
1.1.01	Kas dan Setara Kas	-			3.909.000,00
1.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah	-			
1.1.01.02.01	Kas Bendahara Penerimaan	-		3.909.000,00	3.909.000,00
1.1.01.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	-			
1.1.01.04.01	Kas di BLUD	-			
1.1.01.05.01	Kas di Bendahara BOS	-			
1.1.01.06.01	Kas di bendahara Puskesmas (FKTP)	-			
1.1.01.07.01	Kas Lainnya	-			
1.1.01.09.01	Kas Dana Desa	-			
1.1.01.10.01	Kas Dana BOSP	-			
1.1.01.11.01	Kas Dana BOK Puskesmas	-			
1.1.02	Investasi Jangka Pendek	-			-
	Investasi Jangka Pendek	-			
	Piutang Pendapatan	34.688.306.119,12			38.869.252.067,31
1.1.03	Piutang Pajak	86.378.017.612,07			78.286.811.512,74
1.1.03.06.01.0001	Piutang Pajak Hotel	-			
1.1.03.06.03.0001	Piutang Pajak Losmen	-			
1.1.03.06.07.0001	Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	-			
1.1.03.07.01.0001	Piutang pajakRestoran dan sejenisnya	-			
1.1.03.07.02.0001	Piutang Pajak Rumah Makan dan sejenisnya	-			
1.1.03.07.03.0001	Piutang pajak Cafeteria dan sejenisnya	-			
1.1.03.07.07.0001	Piutang Pajak Jasa Boga/Catring dan sejenisnya	-			
1.1.03.08.02.0001	Piutang Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	-			
1.1.03.08.03.0001	Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	-			
1.1.03.08.08.0001	Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	-			
1.1.03.08.09.0001	Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	-			
1.1.03.08.10.0001	Piutang Pajak Pertandingan Olahraga	-			
1.1.03.09.01.0001	Piutang Reklame Papan/Billboard/Videotron/ M	33.693.750,00	29.293.750,00	23.176.481,67	27.576.481,67
1.1.03.09.02.0001	Piutang pajak Reklame Kain	-			
1.1.03.09.03.0001	Piutang Reklame Melekat/Stiker	-			
1.1.03.10.01.0001	Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Send	-			
1.1.03.11.01.0001	Piutang Pajak Parkir	-			
1.1.03.12.01.0001	Piutang Pajak Air Tanah	22.596.200,00	22.596.200,00	14.415.214,00	14.415.214,00
1.1.03.15.01.0001	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	86.321.727.662,07	24.082.761.379,00	16.005.853.534,00	78.244.819.817,07
1.1.04	Piutang Retribusi	1.713.434.474,33			1.713.434.474,33
1.1.04.01.01.0001	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	-			
1.1.04.01.01.0006	Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang Sejenis	-			
1.1.04.01.13.0001	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-			
1.1.04.02.01.0001	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangun	49.525.000,00			49.525.000,00
1.1.04.02.01.0002	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	459.415.983,33			459.415.983,33
1.1.04.02.02.0002	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.204.493.491,00			1.204.493.491,00

1.1.05	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-			-
1.1.05.02.01.0001	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	-			
1.1.05.02.03.0001	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	-			
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	96.065.539,74			96.065.539,74
1.1.06.09.01.0001	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-			
1.1.06.11.01.0001	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-			
1.1.06.12.06.0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	8.751.826,36			8.751.826,36
1.1.06.12.07.0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran	12.063.713,38			12.063.713,38
1.1.06.12.16.0001	Piutang Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	75.250.000,00			75.250.000,00
	Piutang Pendapatan Denda PBBP2	-			
1.1.06.13.01.0045	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-			
1.1.06.13.02.0001	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-			
1.1.06.13.03.0016	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	-			
1.1.06.15.03.0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-			
1.1.06.16.02.0001	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	-			
1.1.07	Piutang Transfer Pemerintah Pusat				
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	-			-
1.1.08.01.01	Piutang Bagi Hasil Pajak	-			-
1.1.08.01.01.0001	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-			
1.1.08.01.01.0002	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-			
1.1.08.01.01.0003	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-			
1.1.08.01.01.0004	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	-			
1.1.09	Piutang Lainnya	-			-
1.1.09.05	Uang Muka	-			-
1.1.09.05.01	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	-			-
1.1.09.05.01.0001	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	-			
1.1.10	Penyisihan Piutang	(53.499.211.507,02)			(41.227.059.459,50)
1.1.10.01.01	Penyisihan Piutang Pajak	(51.785.777.032,68)			(39.908.743.061,83)
1.1.10.01.01.0102	Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	(1.037.718,75)	115.882,41	1.015.718,75	(137.882,41)
1.1.10.01.01.0115	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(112.981,00)	72.076,07	112.981,00	(72.076,07)
1.1.10.01.01.0154	Penyisihan Piutang PBBP2	(51.784.626.332,93)	576.489.930,00	12.452.583.159,58	(39.908.533.103,35)
1.1.10.01.02	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.713.434.474,34)			(1.318.316.397,67)
1.1.10.01.02.0006	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di	-			
1.1.10.01.02.0032	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara	-			
1.1.10.01.02.0033	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan	(49.525.000,00)		5.925.000,00	(43.600.000,00)
1.1.10.01.02.0034	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan	(459.415.983,34)		179.795.416,67	(279.620.566,67)

1.1.10.01.02.0041	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan	(1.204.493.491,00)		209.397.660,00	(995.095.831,00)
	Penyisihan Piutang Hasil Pengeloan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-			
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	-			
	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah	-			
	Uang Muka Kerja	-			
1.1.11	Beban di bayar dimuka	-			-
1.1.11.02.02.0138	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat	-			
1.1.11.02.03.0001	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan	-			
1.1.12	Persediaan	285.282.259,00			281.621.683,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	285.282.259,00			281.621.683,00
1.1.12.01.01	Bahan	-			-
1.1.12.01.01.0005	Bahan Baku	-			
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas	-			
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-			
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	-			
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	285.282.259,00			281.621.683,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	-			
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	285.282.259,00	285.282.259,00	281.621.683,00	281.621.683,00
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	-			
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	-			
1.1.12.01.04	Obat-obatan	-			-
1.1.12.01.04.0001	Obat	-			
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	-			
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	-			-
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	-			
	JUMLAH ASET LANCAR	34.973.588.378,12			39.154.782.750,31
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG				
1.2.01	Investasi Non Permanen	-			-
1.2.01.05	Dana Bergulir	-			-
1.2.01.05.02.0001	Dana Bergulir	-			
	Penyisihan	-			
1.2.02	Investasi Permanen	-			-
1.2.02.01.01	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten	-			-
1.2.02.01.01.0001	Penyertaan Modal kepada BUMD /Perusahaan Daerah	-			
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	-			-
1.3	ASET TETAP				
1.3.01	Tanah	400.000.000,00			400.000.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	6.283.718.804,23	694.380.850,00	8.693.000,00	5.598.030.954,23

1.3.07.01	<i>Akm peny peralatan dan mesin</i>	(5.071.855.006,23)		283.909.894,00	(4.787.945.112,23)
1.3.03	Gedung dan Bangunan	3.032.648.378,00			3.032.648.378,00
1.3.07.02	<i>Akm peny gedung dan bangunan</i>	(1.323.854.553,89)		51.410.550,00	(1.272.444.003,89)
1.3.04	Jalan, Irigasi, dan Jembatan	284.666.000,00			284.666.000,00
1.3.07.03	<i>Akm peny jalan, irigasi dan jembatan</i>	(104.364.287,00)		7.371.243,00	(96.993.044,00)
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	-			
1.3.06	Konstruksi dalam Pengerjaan	-			
	JUMLAH ASET TETAP	3.500.959.335,11			3.157.963.172,11
1.6	PROPERTI INVESTASI	-			-
1.6.01	Properti Investasi Tanah	-			
1.6.02	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	-			
1.6.04	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-			
	DANA CADANGAN	-			-
	Dana Cadangan	-			-
	JUMLAH DANA CADANGAN	-			-
1.5	ASET LAINNYA				
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	-			-
1.5.01.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-			-
1.5.01.02.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah thd PN Bukan Bendahara	-			
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah thd Pihak Ketiga	-			
	Penyisihan TGR	-			
1.5.03	Aset Tak Berwujud	-			-
1.5.03.01.01.0005	Aset Tak Berwujud Lainnya	-			
	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	-			
1.5.04	Aset Lain-lain	111.382.604,72			111.382.604,72
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	35.321.429,72			35.321.429,72
1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	76.061.175,00			76.061.175,00
1.5.08.01.01	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-			-
1.5.08.01.01.	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-			-
1.5.08.01.01.0001	Dana Bagi Hasil TDF	-			
	JUMLAH ASET LAINNYA	111.382.604,72			111.382.604,72
	RK - SKPD				
	TOTAL ASET	38.585.930.317,95			42.424.128.527,14
2	KEWAJIBAN	-			-
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-			-
2.1.01.05.01.0001	Utang PPh 21	-			
2.1.01.05.02.0001	Utang PPh 22	-			
2.1.01.05.03.0001	Utang PPh 23	-			

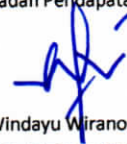
2.1.01.06.01.0001	Utang PPN Pusat	-			
2.1.02	Utang Bunga	-			-
2.1.02.01.02.0001	Utang Bunga kepada pemerintah pusat	-			
2.1.04	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-			-
2.1.04.01.01.0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-			
2.1.05	Pendapatan diterima dimuka	-			687.737.595,92
2.1.05.01.01.0001	Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III	-			
2.1.05.04.01.0002	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung	-			
2.1.05.04.01.0004	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat	-			
2.1.05.05.01.0001	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	-	687.737.595,92		687.737.595,92
2.1.06	Utang Belanja	171.469.811,00			1.701.256.168,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	169.498.145,00			1.700.605.163,00
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	234.780,00			1.574.502,00
2.1.06.01.01.0001	PNS	223.600,00	1.381.080,00	223.600,00	1.381.080,00
2.1.06.01.01.0002	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	-			
2.1.06.01.01.0003	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	11.180,00	193.350,00	11.180,00	193.350,00
2.1.06.01.01.0004	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK	-			
2.1.06.01.01.0005	Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	-			
2.1.06.01.01.0007	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	-			
2.1.06.01.01.0009	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	-			
2.1.06.01.01.0010	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PPPK	-			
2.1.06.01.01.0011	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	-			
2.1.06.01.01.0012	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PPPK	-			
2.1.06.01.01.0013	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS	-			
2.1.06.01.01.0015	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	-	72,00		72,00
2.1.06.01.01.0016	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PPPK	-			
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	169.253.974,00			178.122.398,00
2.1.06.01.02.0001	berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	169.253.974,00	178.122.398,00	169.253.974,00	178.122.398,00
2.1.06.01.03	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	9.391,00			-
2.1.06.01.03.0015	Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Bumi Bangunan dan Bangunan Perdesaan dan	-			
2.1.06.01.03.0022	Pemungutan Retribusi Daerah-Pengujian Kendaraan Bermotor	-			
2.1.06.01.03.0047	Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD- Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	-			
2.1.06.01.03.0049	(Tamsil) Guru PNSD-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	-			
2.1.06.01.03.0050	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	9.391,00		9.391,00	

2.1.06.01.05	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-			1.520.908.263,00
2.1.06.01.05.0038	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	-	1.520.908.263,00		1.520.908.263,00
2.1.06.01.99	Utang Belanja Pegawai BLUD	-			-
2.1.06.01.99.9999	Utang Belanja Pegawai BLUD	-			
2.1.06.02	Utang Belanja barang dan Jasa	1.971.666,00			651.005,00
2.1.06.02.01	Utang Belanja Barang	-			-
2.1.06.02.01.0010	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	-			
2.1.06.02.01.0012	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	-			
2.1.06.02.01.0015	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	-			
2.1.06.02.01.0016	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	-			
2.1.06.02.01.0037	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	-			
2.1.06.02.01.0038	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	-			
2.1.06.02.01.0039	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-			
2.1.06.02.01.0052	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	-			
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	1.971.666,00			651.005,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	591.304,00	651.005,00	591.304,00	651.005,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-			
2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.380.362,00		1.380.362,00	
2.1.06.02.02.0069	Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah	-			
2.1.06.02.02.0078	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-			
2.1.06.02.02.0233	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kantor Lainnya	-			
2.1.06.02.03	Utang Belanja Pemeliharaan	-			-
2.1.06.02.03.0070	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Dinas	-			
2.1.06.02.03.0152	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat	-			
2.1.06.02.03.0156	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat	-			
2.1.06.02.04	Utang Belanja Perjalanan Dinas	-			-
2.1.06.02.04.0001	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-			
2.1.06.08	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-			-
2.1.06.08.01	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	-			-
2.1.06.08.01.0001	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-			
2.1.06.12	Utang Belanja Bagi Hasil	-			-
2.1.06.12.03.0001	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	-			
2.1.06.12.04.0001	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	-			
2.1.06.13	Utang Belanja Bantuan Keuangan	-			-
2.1.06.13.09.0003	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	-			
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	171.469.811,00			2.388.993.763,92

2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
2.2.01	Utang kepada Pemerintah Pusat	-			-
2.2.01.01	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri	-			-
2.2.01.01.02.0001	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	-			
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-			-
	TOTAL KEWAJIBAN	171.469.811,00			2.388.993.763,92
	EKUITAS				
	TOTAL EKUITAS	38.414.460.506,95			40.035.134.763,22
	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA	38.585.930.317,95			42.424.128.527,14

Kab. Lombok Tengah, 31 Desember 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah



Baiq Aluh Windayu Wiranom, S.E.,M.M.

NIP. 197307291997032008



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL



...TUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Kode LRA	Kode Rekening	Uraian	LRA RINCI	PENYESUAIAN		LO 2024
				D	K	
		KEGIATAN OPERASIONAL				
	7	PENDAPATAN	183.860.737.486,12			192.639.681.181,37
	7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	183.860.737.486,12			192.639.681.181,37
	7.1.01	Pajak Daerah-LO	182.328.157.865,50			191.107.101.560,75
	7.1.01.06	Pajak Hotel-LO	30.777.229.162,79			30.777.229.162,79
	7.1.01.06.01	Pajak Hotel-LO	30.777.229.162,79			30.777.229.162,79
	7.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel-LO	30.777.229.162,79			30.777.229.162,79
	7.1.01.06.03	Pajak Losmen-LO	0,00			0,00
	7.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen-LO	0,00			0,00
	7.1.01.07	Pajak Restoran-LO	27.212.701.343,48			27.212.701.343,48
	7.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	27.212.701.343,48			27.212.701.343,48
4.1.01.07.01.0001	7.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	27.212.701.343,48			27.212.701.343,48
	7.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	0,00			0,00
4.1.01.07.02.0001	7.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	0,00			0,00
	7.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO	0,00			0,00
4.1.01.07.03.0001	7.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO	0,00			0,00
	7.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	0,00			0,00
4.1.01.07.07.0001	7.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	0,00			0,00
	7.1.01.08	Pajak Hiburan-LO	635.378.016,00			635.378.016,00
	7.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	247.754.986,00			247.754.986,00
4.1.01.08.08.0001	7.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	247.754.986,00			247.754.986,00
	7.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	291.261.919,00			291.261.919,00
4.1.01.08.09.0001	7.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	291.261.919,00			291.261.919,00
	7.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga-LO	96.361.111,00			96.361.111,00
4.1.01.08.10.0001	7.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga-LO	96.361.111,00			96.361.111,00
	7.1.01.09	Pajak Reklame-LO	1.947.094.265,00			2.640.949.129,25
	7.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	1.947.094.265,00			2.640.949.129,25
4.1.01.09.01.0001	7.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	1.947.094.265,00	23.176.481,67	717.031.345,92	2.640.949.129,25
	7.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain-LO	0,00			0,00
4.1.01.09.02.0001	7.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain-LO	0,00			0,00
	7.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan-LO	23.073.604.102,00			23.073.604.102,00
	7.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	23.073.604.102,00			23.073.604.102,00
4.1.01.10.01.0001	7.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	23.073.604.102,00			23.073.604.102,00
	7.1.01.11	Pajak Parkir-LO	1.206.617.014,00			1.206.617.014,00
	7.1.01.11.01	Pajak Parkir-LO	1.206.617.014,00			1.206.617.014,00
4.1.01.11.01.0001	7.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir-LO	1.206.617.014,00			1.206.617.014,00
	7.1.01.12	Pajak Air Tanah-LO	487.944.413,00			496.125.399,00
	7.1.01.12.01	Pajak Air Tanah-LO	487.944.413,00			496.125.399,00
4.1.01.12.01.0001	7.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah-LO	487.944.413,00	14.415.214,00	22.596.200,00	496.125.399,00
	7.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet-LO	4.350.000,00			4.350.000,00

	7.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet-LO	4.350.000,00			4.350.000,00
4.1.01.13.01.0001	7.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet-LO	4.350.000,00			4.350.000,00
	7.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	3.549.329.804,00			3.549.329.804,00
	7.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	3.549.329.804,00			3.549.329.804,00
4.1.01.14.37.0001	7.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	3.549.329.804,00			3.549.329.804,00
	7.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	16.013.894.795,00			24.090.802.640,00
	7.1.01.15.01	PBBP2-LO	16.013.894.795,00			24.090.802.640,00
4.1.01.15.01.0001	7.1.01.15.01.0001	PBBP2-LO	16.013.894.795,00	16.005.853.534,00	24.082.761.379,00	24.090.802.640,00
	7.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	35.702.051.083,00			35.702.051.083,00
	7.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	35.702.051.083,00			35.702.051.083,00
4.1.01.16.01.0001	7.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	35.702.051.083,00			35.702.051.083,00
	4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu [PBJT]-LO	41.717.963.867,23			41.717.963.867,23
	4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO	14.020.141.538,12			14.020.141.538,12
4.1.01.19.01.0001	4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran-LO	11.595.812.719,12			11.595.812.719,12
4.1.01.19.01.0002	4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO	2.424.328.819,00			2.424.328.819,00
	4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik-LO	8.208.720.449,00			8.208.720.449,00
4.1.01.19.02.0001	4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain-LO	8.208.720.449,00			8.208.720.449,00
	4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan-LO	14.740.134.763,61			14.740.134.763,61
4.1.01.19.03.0001	4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel-LO	11.280.418.876,44			11.280.418.876,44
4.1.01.19.03.0002	4.1.01.19.03.0002	PBJT-Hostel-LO	280.158.591,00			280.158.591,00
4.1.01.19.03.0003	4.1.01.19.03.0003	PBJT-Vila-LO	2.964.977.501,97			2.964.977.501,97
4.1.01.19.03.0006	4.1.01.19.03.0006	PBJT-Losmen-LO	214.479.794,20			214.479.794,20
4.1.01.19.03.0008	4.1.01.19.03.0008	PBJT-Pesanggarahan-LO	100.000,00			100.000,00
	4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir-LO	419.398.114,00			419.398.114,00
4.1.01.19.04.0001	4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO	419.398.114,00			419.398.114,00
	4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	4.329.569.002,50			4.329.569.002,50
4.1.01.19.05.0001	4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	37.020,00			37.020,00
4.1.01.19.05.0007	4.1.01.19.05.0007	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor-LO	3.695.696.870,00			3.695.696.870,00
4.1.01.19.05.0009	4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran-LO	382.993.627,50			382.993.627,50
4.1.01.19.05.0011	4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi-LO	0,00			0,00
4.1.01.19.05.0012	4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa-LO	250.841.485,00			250.841.485,00
	7.1.02	Retribusi Daerah-LO	975.000,00			975.000,00
	7.1.02.01	Retribusi Jasa Umum-LO	0,00			0,00
	7.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	0,00			0,00
7.1.02.01.01.0001	7.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO				0,00
7.1.02.01.01.0006	7.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO				0,00
	7.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	0,00			0,00
7.1.02.01.02.0001	7.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO				0,00
	7.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	0,00			0,00

7.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO				0,00
7.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	0,00			0,00
7.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran-LO				0,00
7.1.02.01.05.0002	Retribusi Los-LO				0,00
7.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	0,00			0,00
7.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO				0,00
7.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	0,00			0,00
7.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO				0,00
7.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	0,00			0,00
7.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO				0,00
7.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha-LO	975.000,00			975.000,00
7.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	0,00			0,00
7.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO				0,00
7.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah-LO				0,00
7.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO				0,00
7.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO				0,00
7.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat-LO				0,00
7.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	0,00			0,00
7.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan-LO				0,00
7.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO				0,00
7.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan-LO	0,00			0,00
7.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO				0,00
7.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	0,00			0,00
7.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO				0,00
7.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	0,00			0,00
7.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO				0,00
7.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	0,00			0,00
7.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO				0,00
7.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO				0,00
7.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan-LO				0,00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	975.000,00			975.000,00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	975.000,00			975.000,00
7.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	0,00			0,00
7.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO	0,00			0,00

7.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO				0,00
7.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	0,00			0,00
7.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO				0,00
7.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0,00			0,00
7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO				0,00
7.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	0			0
7.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	0			0,00
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00			0,00
7.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	0,00			0,00
7.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	0,00			0,00
7.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO				0,00
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	1.531.604.620,62			1.531.604.620,62
7.1.04.05	Jasa Giro-LO	0,00			0,00
7.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	0,00			0,00
7.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO				0,00
7.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	0			0
7.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	0			0,00
7.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	0,00			0,00
7.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO				0,00
7.1.04.07	Pendapatan Bunga-LO	0,00			0,00
7.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	0,00			0,00
7.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO				0,00
7.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	0,00			0,00
7.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	0			0
7.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	0			0,00
7.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	0,00			0,00
7.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO				0,00
7.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	736.441.127,07			736.441.127,07
7.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	736.441.127,07			736.441.127,07
7.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	736.441.127,07			736.441.127,07

7.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	0,00			0,00
7.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	0,00			0,00
7.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO				0,00
7.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	795.163.493,55			795.163.493,55
7.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	89.000.741,00			89.000.741,00
7.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	89.000.741,00			89.000.741,00
7.1.04.12.06.0003	Pendapatan Denda Pajak Losmen-LO				0,00
7.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO	32.164.963,70			32.164.963,70
7.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	32.164.963,70			32.164.963,70
7.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO				0,00
7.1.04.12.07.0003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO				0,00
7.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	0,00			0,00
7.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO				0,00
7.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	673.997.788,85			673.997.788,85
7.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2-LO	673.997.788,85			673.997.788,85
7.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	0,00			0,00
7.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak-LO				0,00
7.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	0,00			0,00
7.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-LO	0,00			0,00
7.1.04.13.01.0013	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO				0,00
7.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-LO	0,00			0,00
7.1.04.13.03.0001	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO				0,00
7.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian-LO	0,00			0,00
7.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	0,00			0,00
7.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO				0,00
7.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	0,00			0,00
7.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO				0,00
7.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO	0,00			0,00
7.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS-LO	0			0,00

7.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS-LO				0,00
7.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO	0,00			0,00
7.1.04.15.15.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas-LO				0,00
7.1.04.16	Pendapatan dari BLUD-LO	0,00			0,00
7.1.04.16.01	Pendapatan dari BLUD-LO	0,00			0,00
7.1.04.16.01.0001	Pendapatan dari BLUD-LO				0,00
7.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	0			0
7.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	0			0,00
7.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	0,00			0,00
7.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	0,00			0,00
7.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO				0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	183.860.737.486,12			192.639.681.181,37
					0,00
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00			0,00
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00			0,00
7.2.01.01	Dana Perimbangan-LO	0,00			0,00
7.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	0,00			0,00
7.2.01.01.01.0001	DBH PBB-LO				0,00
7.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21-LO				0,00
7.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO				0,00
7.2.01.01.01.0004	DBH CHT-LO				0,00
7.2.01.01.01.0008	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO				0,00
7.2.01.01.01.0009	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO				0,00
7.2.01.01.01.0010	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO				0,00
7.2.01.01.01.0013	DBH SDA Perikanan-LO				0,00
7.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	0,00			0,00
7.2.01.01.02.0001	DAU-LO				0,00
7.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	0			0,00
7.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	0			0,00
7.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum-LO	0			0,00
7.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	0,00			0,00
7.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO				0,00
7.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO				0,00
7.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO				0,00
7.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO				0,00

7.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO				0,00
7.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO				0,00
7.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO				0,00
7.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO				0,00
7.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO				0,00
7.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO				0,00
7.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO				0,00
7.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO				0,00
7.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO				0,00
7.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO				0,00
7.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO				0,00
7.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup-LO				0,00
7.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit-LO				0,00
7.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO				0,00
7.2.01.01.03.0062	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan-LO				0,00
7.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	0,00			0,00
7.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO				0,00
7.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO				0,00
7.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO				0,00
7.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO				0,00
7.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	0			0,00
7.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	0			0,00
7.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO				0,00
7.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas-LO				0,00
7.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO				0,00
7.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO				0,00
7.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata-LO				0,00
7.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO				0,00
7.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				0,00
7.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian				0,00
7.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM-LO				0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	0,00			0,00
					0,00

	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				0,00
7.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	0,00			0,00
7.2.01.02.01	DID-LO	0,00			0,00
7.2.01.02.01.0001	DID-LO				0,00
7.2.01.05	Dana Desa-LO	0			0
7.2.01.05.01	Dana Desa-LO	0			0,00
7.2.01.05.01.0001	Dana Desa-LO	0			0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	0,00			0,00
					0,00
7.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah- LO	0,00			0,00
7.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil-LO	0,00			0,00
7.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	0,00			0,00
7.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO				0,00
7.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO				0,00
7.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO				0,00
7.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO				0,00
7.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- LO				0,00
7.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00			0,00
7.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00			0,00
7.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi				0,00
	JUMLAH Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00			0,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER- LO	0,00			0,00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0,00			0,00
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	0,00			0,00
7.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00			0,00
7.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00			0,00
7.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO				0,00
7.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00			0,00
7.3.01.02.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00			0,00
7.3.01.02.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO				0,00
7.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis- LO	0,00			0,00
7.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis- LO	0,00			0,00
7.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis- LO				0,00
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00			0,00
7.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	0,00			0,00
7.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	0,00			0,00
7.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD-LO	0			0,00
7.3.03.02.01.0002	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD-LO				0,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0,00			0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	183.860.737.486,12			192.639.681.181,37

8	BEBAN	16.561.653.444,00			28.228.421.134,00
8.1	BEBAN OPERASI	16.561.653.444,00			27.885.729.447,00
8.1.01	Beban Pegawai	14.447.736.632,00			12.916.629.614,00
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	6.441.166.886,00			6.439.836.555,00
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	5.191.670.668,00			5.190.513.188,00
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	5.191.670.668,00	223.600,00	1.381.080,00	5.190.513.188,00
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK				0,00
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	516.363.234,00			516.181.064,00
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	516.363.234,00	11.180,00	193.350,00	516.181.064,00
8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK				0,00
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	126.030.000,00			126.030.000,00
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	126.030.000,00			126.030.000,00
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	79.340.000,00			79.340.000,00
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	79.340.000,00			79.340.000,00
8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK				0,00
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	224.770.000,00			224.770.000,00
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	224.770.000,00			224.770.000,00
8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK				0,00
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	298.949.760,00			298.949.760,00
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	298.949.760,00			298.949.760,00
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK				0,00
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.971.051,00			3.971.051,00
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.971.051,00			3.971.051,00
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	72.173,00			72.101,00
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	72.173,00		72,00	72.101,00
8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK				0,00
8.1.01.01.09	Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	0,00			9.391,00
8.1.01.01.09.0001	Beban luran Jaminan Kesehatan PNS	0,00	9.391,00		9.391,00
8.1.01.01.09.0002	Beban luran Jaminan Kesehatan PPPK				0,00
8.1.01.01.10	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	0,00			0,00
8.1.01.01.10.0001	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS				0,00
8.1.01.01.10.0002	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK				0,00
8.1.01.01.11	Beban luran Jaminan Kematian ASN	0,00			0,00
8.1.01.01.11.0001	Beban luran Jaminan Kematian PNS				0,00
8.1.01.01.11.0002	Beban luran Jaminan Kematian PPPK				0,00
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.416.623.721,00			2.407.755.297,00
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.416.623.721,00			2.407.755.297,00
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.416.623.721,00	169.253.974,00	178.122.398,00	2.407.755.297,00
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0			0
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	0			0,00
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.589.946.025,00			4.069.037.762,00
8.1.01.03.01	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	5.576.464.025,00			4.055.555.762,00
8.1.01.03.01.0004	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan				0,00
8.1.01.03.01.0006	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	896.626.075,00		387.730.883,00	508.895.192,00
8.1.01.03.01.0007	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	690.809.962,00		270.186.036,00	420.623.926,00

8.1.01.03.01.0009	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	59.208.618,00		36.772.414,00	22.436.204,00
8.1.01.03.01.0010	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	917.511.943,00		413.334.155,00	504.177.788,00
8.1.01.03.01.0011	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	15.849.793,00			15.849.793,00
8.1.01.03.01.0012	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	4130595		4.130.595,00	0,00
8.1.01.03.01.0013	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	0,00			0,00
8.1.01.03.01.0014	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	80.013.927,00		18.754.180,00	61.259.747,00
8.1.01.03.01.0015	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0,00			0,00
8.1.01.03.01.0016	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.404.999.998,00		390.000.000,00	1.014.999.998,00
5.1.01.03.01.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu ([],PBJT),	1.507.313.114,00			1.507.313.114,00
8.1.01.03.02	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00			0,00
8.1.01.03.02.0001	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan				0,00
8.1.01.03.02.0002	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pelayanan Persampahan/Kebersihan				0,00
8.1.01.03.02.0004	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum -Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				0,00
8.1.01.03.02.0005	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Pelayanan Pasar				0,00
8.1.01.03.02.0006	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor				0,00
8.1.01.03.02.0013	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi				0,00
8.1.01.03.02.0014	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pemakaian Kekayaan Daerah				0,00
8.1.01.03.02.0015	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pasar Grosir dan/atau Pertokoan				0,00
8.1.01.03.02.0016	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan				0,00
8.1.01.03.02.0020	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan				0,00
8.1.01.03.02.0022	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga				0,00
8.1.01.03.02.0024	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah				0,00
8.1.01.03.02.0026	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol				0,00

8.1.01.03.02.0031	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung				0,00
8.1.01.03.03	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00			0,00
8.1.01.03.03.0001	Beban TPG PNSD				0,00
8.1.01.03.05	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00			0,00
8.1.01.03.05.0001	Beban Tamsil Guru PNSD				0,00
8.1.01.03.06	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00			0,00
8.1.01.03.06.0001	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN				0,00
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	13.482.000,00			13.482.000,00
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.482.000,00			13.482.000,00
8.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				0,00
8.1.01.03.07.0003	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)				0,00
8.1.01.03.08	Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00			0,00
8.1.01.03.08.0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan				0,00
8.1.01.04	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00			0,00
8.1.01.04.01	Beban Uang Representasi DPRD	0,00			0,00
8.1.01.04.01.0001	Beban Uang Representasi DPRD				0,00
8.1.01.04.02	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	0,00			0,00
8.1.01.04.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga DPRD				0,00
8.1.01.04.03	Beban Tunjangan Beras DPRD	0,00			0,00
8.1.01.04.03.0001	Beban Tunjangan Beras DPRD				0,00
8.1.01.04.04	Beban Uang Paket DPRD	0,00			0,00
8.1.01.04.04.0001	Beban Uang Paket DPRD				0,00
8.1.01.04.05	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	0,00			0,00
8.1.01.04.05.0001	Beban Tunjangan Jabatan DPRD				0,00
8.1.01.04.07	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00			0,00
8.1.01.04.07.0001	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD				0,00
8.1.01.04.08	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00			0,00
8.1.01.04.08.0001	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD				0,00
8.1.01.04.09	Beban Tunjangan Reses DPRD	0,00			0,00
8.1.01.04.09.0001	Beban Tunjangan Reses DPRD				0,00
8.1.01.04.10	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00			0,00
8.1.01.04.10.0001	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD				0,00
8.1.01.04.12	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00			0,00
8.1.01.04.12.0001	Beban Jaminan Kesehatan DPRD				0,00
8.1.01.04.12.0002	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD				0,00
8.1.01.04.12.0003	Beban Jaminan Kematian DPRD				0,00
8.1.01.04.12.0004	Beban Tunjangan Perumahan DPRD				0,00
8.1.01.04.13	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	0,00			0,00
8.1.01.04.13.0001	Beban Tunjangan Transportasi DPRD				0,00
8.1.01.04.14	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00			0,00
8.1.01.04.14.0001	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD				0,00
8.1.01.05	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00			0,00

8.1.01.05.01	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	0,00		0,00
8.1.01.05.01.0001	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH			0,00
8.1.01.05.02	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0,00		0,00
8.1.01.05.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH			0,00
8.1.01.05.03	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	0,00		0,00
8.1.01.05.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH			0,00
8.1.01.05.04	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	0,00		0,00
8.1.01.05.04.0001	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH			0,00
8.1.01.05.05	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0,00		0,00
8.1.01.05.05.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH			0,00
8.1.01.05.06	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0		0
8.1.01.05.06.0001	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH			0,00
8.1.01.06	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	0,00		0,00
8.1.01.06.01	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	0,00		0,00
8.1.01.06.01.0001	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD			0,00
8.1.01.06.02	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	0,00		0,00
8.1.01.06.02.0001	Beban Dana Operasional KDH/WKDH			0,00
8.1.01.88	Beban Pegawai BOS	0,00		0,00
8.1.01.88.88	Beban Pegawai BOS	0,00		0,00
8.1.01.88.88.8888	Beban Pegawai BOS			0,00
8.1.01.99	Beban Pegawai BLUD	0,00		0,00
8.1.01.99.99	Beban Pegawai BLUD	0,00		0,00
8.1.01.99.99.9999	Beban Pegawai BLUD			0,00
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	2.113.916.812,00		2.120.269.897,00
8.1.02.01	Beban Barang	1.360.306.950,00		1.365.339.374,00
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	1.360.306.950,00		1.356.646.374,00
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	21.259.400,00		21.259.400,00
8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia			0,00
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	275.741.050,00		275.741.050,00
8.1.02.01.01.0005	Beban Bahan-Bahan Baku			0,00
8.1.02.01.01.0008	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman			0,00
8.1.02.01.01.0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas			0,00
8.1.02.01.01.0011	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan			0,00
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya			0,00
8.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan			0,00
8.1.02.01.01.0014	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar			0,00
8.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran			0,00
8.1.02.01.01.0016	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium			0,00
8.1.02.01.01.0019	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian			0,00
8.1.02.01.01.0020	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel			0,00
8.1.02.01.01.0023	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya			0,00
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	66.639.000,00		66.639.000,00
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	90.768.000,00		90.768.000,00

8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	525.481.500,00	281.621.683,00	285.282.259,00	521.820.924,00
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	990.000,00			990.000,00
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	36.926.000,00			36.926.000,00
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.192.000,00			3.192.000,00
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				0,00
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	10.000.000,00			10.000.000,00
8.1.02.01.01.0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga				0,00
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata				0,00
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				0,00
8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat				0,00
8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	13.080.000,00			13.080.000,00
8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				0,00
8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura				0,00
8.1.02.01.01.0044	Beban Natura dan Pakan-Pakan				0,00
8.1.02.01.01.0045	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya				0,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	316.230.000,00			316.230.000,00
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu				0,00
8.1.02.01.01.0054	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh				0,00
8.1.02.01.01.0056	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan				0,00
8.1.02.01.01.0059	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH				0,00
8.1.02.01.01.0060	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD				0,00
8.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)				0,00
8.1.02.01.01.0068	Beban Pakaian Siaga				0,00
8.1.02.01.01.0074	Beban Pakaian Adat Daerah				0,00
8.1.02.01.01.0075	Beban Pakaian Batik Tradisional				0,00
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga				0,00
8.1.02.01.01.0077	Beban Pakaian Paskibraka				0,00
8.1.02.01.04	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00			8.693.000,00
8.1.02.01.04.0039	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga		8.693.000,00		8.693.000,00
8.1.02.02	Beban Jasa	390.771.482,00			392.092.143,00
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	384.831.482,00			386.152.143,00
8.1.02.02.01.0001	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.200.000,00			1.200.000,00
8.1.02.02.01.0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan				0,00
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.110.000,00			5.110.000,00
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00			0,00
8.1.02.02.01.0005	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara				0,00

8.1.02.02.01.0006	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan				0,00
8.1.02.02.01.0007	Beban Honorarium Rohaniwan				0,00
8.1.02.02.01.0009	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian				0,00
8.1.02.02.01.0011	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan				0,00
8.1.02.02.01.0012	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah				0,00
8.1.02.02.01.0013	Beban Jasa Tenaga Pendidikan				0,00
8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan				0,00
8.1.02.02.01.0015	Beban Jasa Tenaga Laboratorium				0,00
8.1.02.02.01.0017	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				0,00
8.1.02.02.01.0025	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan				0,00
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	7.000.000,00			7.000.000,00
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	287.450.000,00			287.450.000,00
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli				0,00
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan				0,00
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan				0,00
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir				0,00
8.1.02.02.01.0035	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik				0,00
8.1.02.02.01.0036	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO				0,00
8.1.02.02.01.0037	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan				0,00
8.1.02.02.01.0038	Beban Jasa Tata Rias				0,00
8.1.02.02.01.0039	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi				0,00
8.1.02.02.01.0042	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan				0,00
8.1.02.02.01.0046	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi				0,00
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara				0,00
8.1.02.02.01.0048	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi				0,00
8.1.02.02.01.0050	Beban Jasa Kalibrasi				0,00
8.1.02.02.01.0051	Beban Jasa Pengolahan Sampah				0,00
8.1.02.02.01.0052	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi				0,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	37.200.000,00			37.200.000,00
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon				0,00
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	7.308.871,00	591.304,00	651.005,00	7.249.170,00
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	512.500,00			512.500,00
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah				0,00
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	18.061.506,00	1.380.362,00		19.441.868,00
8.1.02.02.01.0064	Beban Paket/Pengiriman				0,00
8.1.02.02.01.0065	Beban Penambahan Daya				0,00
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	20.988.605,00			20.988.605,00
8.1.02.02.01.0069	Beban Pengolahan Air Limbah				0,00
8.1.02.02.01.0073	Beban Medical Check Up				0,00
8.1.02.02.01.0077	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN				0,00
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	1.440.000,00			1.440.000,00
8.1.02.02.02.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa				0,00
8.1.02.02.02.0002	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI				0,00
8.1.02.02.02.0003	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3				0,00

8.1.02.02.02.0004	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3			0,00
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			0,00
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	635.760,00		635.760,00
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	804.240,00		804.240,00
8.1.02.02.03	Beban Sewa Tanah	0,00		0,00
8.1.02.02.03.0001	Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal			0,00
8.1.02.02.03.0030	Beban Sewa Tanah untuk Latihan			0,00
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	0,00		0,00
8.1.02.02.04.0003	Beban Sewa Excavator			0,00
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			0,00
8.1.02.02.04.0090	Beban Sewa Alat Ukur Lain-Lain			0,00
8.1.02.02.04.0112	Beban Sewa Alat Pengolahan Lainnya			0,00
8.1.02.02.04.0123	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			0,00
8.1.02.02.04.0132	Beban Sewa Peralatan Studio Audio			0,00
8.1.02.02.04.0411	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya			0,00
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	0,00		0,00
8.1.02.02.05.0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor			0,00
8.1.02.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan			0,00
8.1.02.02.05.0043	Beban Sewa Hotel			0,00
8.1.02.02.05.0050	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya			0,00
8.1.02.02.07	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00		0,00
8.1.02.02.07.0031	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya			0,00
8.1.02.02.09	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00		0,00
8.1.02.02.09.0002	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural			0,00
8.1.02.02.09.0018	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur			0,00
8.1.02.02.10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00		0,00
8.1.02.02.10.0012	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik			0,00
8.1.02.02.12	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00		0,00
8.1.02.02.12.0002	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2			0,00
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.500.000,00		4.500.000,00
8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan			0,00
8.1.02.02.13.0002	Beban Sosialisasi			0,00
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	4.500.000,00		4.500.000,00
8.1.02.02.13.0004	Beban Diklat Kepemimpinan			0,00
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	38.750.000,00		38.750.000,00
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.750.000,00		38.750.000,00
8.1.02.03.02.0012	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya			0,00
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			0,00

8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	28.000.000,00			28.000.000,00
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua				0,00
8.1.02.03.02.0096	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor				0,00
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya				0,00
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin				0,00
8.1.02.03.02.0123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.750.000,00			10.750.000,00
8.1.02.03.02.0204	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum				0,00
8.1.02.03.02.0404	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan				0,00
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer				0,00
8.1.02.03.02.0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer				0,00
8.1.02.03.02.0411	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya				0,00
8.1.02.03.02.0492	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar				0,00
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00			0,00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				0,00
8.1.02.03.03.0036	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman				0,00
8.1.02.03.04	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00			0,00
8.1.02.03.04.0002	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi				0,00
8.1.02.03.04.0026	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi				0,00
8.1.02.03.04.0083	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya				0,00
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	324.088.380,00			324.088.380,00
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	324.088.380,00			324.088.380,00
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	91.608.380,00			91.608.380,00
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	232.480.000,00			232.480.000,00
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00			0,00
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00			0,00

8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan				0,00
8.1.02.05.01.0005	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)				0,00
8.1.02.05.01.0006	Beban Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian				0,00
8.1.02.05.01.0012	Beban Uang yang Diberikan kepada Posyandu				0,00
8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00			0,00
8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain				0,00
8.1.02.88	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00			0,00
8.1.02.88.88	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00			0,00
8.1.02.88.88.8888	Beban Barang dan Jasa BOS				0,00
8.1.02.89	Beban Barang dan Jasa BOSP	0			0
8.1.02.89.01	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	0			0
8.1.02.89.01.0001	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	0			0,00
8.1.02.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	0			0
8.1.02.99.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	0			0
8.1.02.99.99.9999	Beban Barang dan Jasa BLUD	0			0,00
8.1.03	Beban Bunga	0,00			0,00
8.1.03.01	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00			0,00
8.1.03.01.02	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	0,00			0,00
8.1.03.01.02.0001	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang				0,00
8.1.05	Beban Hibah	0,00			0,00
8.1.05.01	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00			0,00
8.1.05.01.01	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00			0,00
8.1.05.01.01.0001	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat				0,00
8.1.05.01.02	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00			0,00
8.1.05.01.02.0001	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat				0,00
8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00			0,00
8.1.05.05.01	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00			0,00
8.1.05.05.01.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				0,00
8.1.05.05.02	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00			0,00
8.1.05.05.02.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar				0,00
8.1.05.05.03	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00			0,00

8.1.05.05.03.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan				0,00
8.1.05.05.03.0002	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan				0,00
8.1.05.07	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	0,00			0,00
8.1.05.07.01	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	0,00			0,00
8.1.05.07.01.0001	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik				0,00
8.1.05.08	Beban Hibah Dana BOSP	0			0
8.1.05.08.01	Beban Hibah Dana BOSP-BOS	0			0
8.1.05.08.01.0001	Beban Hibah Dana BOSP-BOS	0			0,00
8.1.05.08.02	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	0			0
8.1.05.08.02.0001	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	0			0,00
8.1.05.08.03	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	0			0
8.1.05.08.03.0001	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	0			0,00
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	0,00			0,00
8.1.06.01	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	0,00			0,00
8.1.06.01.01	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0,00			0,00
8.1.06.01.01.0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu				0,00
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	0,00			12.848.829.936,00
8.1.07.01	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	0,00			12.453.711.859,33
8.1.07.01.09	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame				1.015.718,75
8.1.07.01.09.0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame		1.015.718,75		1.015.718,75
8.1.07.01.12	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah				112.981,00
8.1.07.01.12.0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah		112.981,00		112.981,00
8.1.07.01.15	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00			12.452.583.159,58
8.1.07.01.15.0001	Beban Penyisihan Piutang PBBP2		12.452.583.159,58		12.452.583.159,58
8.1.07.02	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	0,00			395.118.076,67
8.1.07.02.01	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	0,00			0,00
8.1.07.02.01.0006	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis				0,00
8.1.07.02.01.0032	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi				0,00
8.1.07.02.02	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	0,00			395.118.076,67
8.1.07.02.02.0001	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan				
			5.925.000,00		5.925.000,00
8.1.07.02.02.0002	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah				
			179.795.416,67		179.795.416,67

8.1.07.02.02.0009	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan		209.397.660,00		209.397.660,00
	JUMLAH BEBAN OPERASI	16.561.653.444,00			27.885.729.447,00
					0,00
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00			342.691.687,00
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00			283.909.894,00
8.1.08.01.01	Beban Penyusutan Alat Besar	0,00			0,00
8.1.08.01.01.0001	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor				0,00
8.1.08.01.01.0003	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Excavator				0,00
8.1.08.01.01.0005	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Hauler				0,00
8.1.08.01.01.0006	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Asphalt Equipment				0,00
8.1.08.01.01.0007	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Compacting Equipment				0,00
8.1.08.01.01.0008	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Aggregate and Concrete Equipment				0,00
8.1.08.01.01.0010	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat				0,00
8.1.08.01.01.0011	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses				0,00
8.1.08.01.01.0012	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya				0,00
8.1.08.01.01.0013	Beban Penyusutan Alat Besar Apung-Dredger				0,00
8.1.08.01.01.0019	Beban Penyusutan Alat Bantu-Alat Penarik				0,00
8.1.08.01.01.0022	Beban Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set				0,00
8.1.08.01.01.0023	Beban Penyusutan Alat Bantu-Pompa				0,00
8.1.08.01.01.0024	Beban Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor				0,00
8.1.08.01.01.0025	Beban Penyusutan Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan				0,00
8.1.08.01.01.0028	Beban Penyusutan Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan				0,00
8.1.08.01.01.0030	Beban Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan				0,00
8.1.08.01.01.0032	Beban Penyusutan Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering				0,00
8.1.08.01.01.0033	Beban Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Intelijen				0,00
8.1.08.01.01.0034	Beban Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya				0,00
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	0,00			101.179.612,00
8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan				0,00
8.1.08.01.02.0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		63.428.572,00		63.428.572,00
8.1.08.01.02.0003	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang				0,00
8.1.08.01.02.0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua		37.751.040,00		37.751.040,00
8.1.08.01.02.0005	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga				0,00

8.1.08.01.02.0006	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus				0,00
8.1.08.01.02.0008	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel				0,00
8.1.08.01.02.0009	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya				0,00
8.1.08.01.02.0010	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang				0,00
8.1.08.01.02.0011	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang				0,00
8.1.08.01.02.0012	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor				0,00
8.1.08.01.02.0013	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya				0,00
8.1.08.01.02.0014	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang				0,00
8.1.08.01.02.0015	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang				0,00
8.1.08.01.02.0016	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus				0,00
8.1.08.01.03	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00			294.167,00
8.1.08.01.03.0001	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi		219.167,00		219.167,00
8.1.08.01.03.0002	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)		75.000,00		75.000,00
8.1.08.01.03.0003	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik				0,00
8.1.08.01.03.0004	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service				0,00
8.1.08.01.03.0006	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu				0,00
8.1.08.01.03.0007	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus				0,00
8.1.08.01.03.0008	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las				0,00
8.1.08.01.03.0009	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es				0,00
8.1.08.01.03.0011	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam				0,00
8.1.08.01.03.0015	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (Standard Tools)				0,00
8.1.08.01.03.0016	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)				0,00
8.1.08.01.03.0017	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja				0,00
8.1.08.01.03.0018	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi				0,00

8.1.08.01.03.0020	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu				0,00
8.1.08.01.03.0021	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting				0,00
8.1.08.01.03.0022	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam				0,00
8.1.08.01.03.0024	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal				0,00
8.1.08.01.03.0027	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain				0,00
8.1.08.01.03.0028	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Kalibrasi				0,00
8.1.08.01.03.0030	Beban Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester				0,00
8.1.08.01.03.0031	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding				0,00
8.1.08.01.03.0032	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain				0,00
8.1.08.01.03.0033	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara				0,00
8.1.08.01.03.0034	Beban Penyusutan Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara				0,00
8.1.08.01.03.0040	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam				0,00
8.1.08.01.03.0041	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan				0,00
8.1.08.01.03.0044	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya				0,00
8.1.08.01.04	Beban Penyusutan Alat Pertanian	0,00			0,00
8.1.08.01.04.0001	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman				0,00
8.1.08.01.04.0002	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak				0,00
8.1.08.01.04.0003	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Panen				0,00
8.1.08.01.04.0004	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian				0,00
8.1.08.01.04.0005	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian				0,00
8.1.08.01.04.0006	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Processing				0,00
8.1.08.01.04.0008	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan				0,00
8.1.08.01.04.0009	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan				0,00
8.1.08.01.04.0010	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya				0,00
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00			38.678.922,00
8.1.08.01.05.0001	Beban Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik				0,00
8.1.08.01.05.0002	Beban Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah				0,00
8.1.08.01.05.0003	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)				0,00
8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor		6.011.668,00		6.011.668,00
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya		1.043.016,00		1.043.016,00
8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel		13.922.041,00		13.922.041,00

8.1.08.01.05.0007	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu				0,00
8.1.08.01.05.0008	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih				0,00
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin				0,00
8.1.08.01.05.0010	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur				0,00
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		14.047.197,00		14.047.197,00
8.1.08.01.05.0012	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran				0,00
8.1.08.01.05.0013	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat				0,00
8.1.08.01.05.0014	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat				0,00
8.1.08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat		1.240.000,00		1.240.000,00
8.1.08.01.05.0016	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat				0,00
8.1.08.01.05.0017	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat				0,00
8.1.08.01.05.0018	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat				0,00
8.1.08.01.05.0019	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat		2.415.000,00		2.415.000,00
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00			229.600,00
8.1.08.01.06.0001	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio				0,00
8.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film		229.600,00		229.600,00
8.1.08.01.06.0003	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Gambar				0,00
8.1.08.01.06.0004	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak				0,00
8.1.08.01.06.0005	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah				0,00
8.1.08.01.06.0006	Beban Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya				0,00
8.1.08.01.06.0007	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone				0,00
8.1.08.01.06.0011	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF				0,00
8.1.08.01.06.0012	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial				0,00
8.1.08.01.06.0013	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi				0,00
8.1.08.01.06.0015	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional				0,00
8.1.08.01.06.0016	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit				0,00
8.1.08.01.06.0017	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya				0,00
8.1.08.01.06.0023	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW				0,00

8.1.08.01.06.0027	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola				0,00
8.1.08.01.06.0036	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher Antena				0,00
8.1.08.01.06.0037	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena				0,00
8.1.08.01.06.0038	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Feeder				0,00
8.1.08.01.06.0040	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Program Input Equipment				0,00
8.1.08.01.06.0051	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF				0,00
8.1.08.01.06.0062	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan				0,00
8.1.08.01.06.0063	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio				0,00
8.1.08.01.06.0064	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga				0,00
8.1.08.01.07	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan		0,00		0,00
8.1.08.01.07.0001	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum				0,00
8.1.08.01.07.0002	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi				0,00
8.1.08.01.07.0003	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana				0,00
8.1.08.01.07.0004	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah				0,00
8.1.08.01.07.0005	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan				0,00
8.1.08.01.07.0006	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT				0,00
8.1.08.01.07.0007	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata				0,00
8.1.08.01.07.0008	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam				0,00
8.1.08.01.07.0010	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak				0,00
8.1.08.01.07.0011	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik				0,00
8.1.08.01.07.0012	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis				0,00
8.1.08.01.07.0013	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)				0,00
8.1.08.01.07.0014	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung				0,00
8.1.08.01.07.0015	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic				0,00
8.1.08.01.07.0016	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi Anatomy				0,00

8.1.08.01.07.0017	Beban Penyusutan Alat Kedokteran- Alat Kedokteran Transfusi Darah				0,00
8.1.08.01.07.0018	Beban Penyusutan Alat Kedokteran- Alat Kedokteran Radioterapi				0,00
8.1.08.01.07.0019	Beban Penyusutan Alat Kedokteran- Alat Kedokteran Nuklir				0,00
8.1.08.01.07.0020	Beban Penyusutan Alat Kedokteran- Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin				0,00
8.1.08.01.07.0021	Beban Penyusutan Alat Kedokteran- Alat Kedokteran Gawat Darurat				0,00
8.1.08.01.07.0023	Beban Penyusutan Alat Kedokteran- Alat Kedokteran Bedah Ortopedi				0,00
8.1.08.01.07.0024	Beban Penyusutan Alat Kedokteran- Alat Kedokteran ICU				0,00
8.1.08.01.07.0025	Beban Penyusutan Alat Kedokteran- Alat Kedokteran ICCU				0,00
8.1.08.01.07.0026	Beban Penyusutan Alat Kedokteran- Alat Kedokteran Bedah Jantung				0,00
8.1.08.01.07.0028	Beban Penyusutan Alat Kedokteran- Alat Kedokteran Anestesi				0,00
8.1.08.01.07.0029	Beban Penyusutan Alat Kedokteran- Alat Kedokteran Lainnya				0,00
8.1.08.01.07.0030	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut				0,00
8.1.08.01.07.0032	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian				0,00
8.1.08.01.07.0033	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga				0,00
8.1.08.01.07.0034	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya				0,00
8.1.08.01.08	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	0,00			948.375,00
8.1.08.01.08.0001	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan				0,00
8.1.08.01.08.0002	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan				0,00
8.1.08.01.08.0003	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia				0,00
8.1.08.01.08.0006	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi				0,00
8.1.08.01.08.0007	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia				0,00
8.1.08.01.08.0008	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan				0,00
8.1.08.01.08.0010	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik				0,00
8.1.08.01.08.0011	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum				0,00
8.1.08.01.08.0012	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi				0,00

8.1.08.01.08.0013	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia				0,00
8.1.08.01.08.0014	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi				0,00
8.1.08.01.08.0015	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi				0,00
8.1.08.01.08.0016	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi				0,00
8.1.08.01.08.0017	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film		948.375,00		948.375,00
8.1.08.01.08.0018	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan				0,00
8.1.08.01.08.0019	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi				0,00
8.1.08.01.08.0020	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika				0,00
8.1.08.01.08.0026	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola				0,00
8.1.08.01.08.0027	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi				0,00
8.1.08.01.08.0033	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas				0,00
8.1.08.01.08.0034	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil				0,00
8.1.08.01.08.0035	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil				0,00
8.1.08.01.08.0037	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik				0,00
8.1.08.01.08.0038	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik				0,00
8.1.08.01.08.0039	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik				0,00
8.1.08.01.08.0040	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa				0,00
8.1.08.01.08.0041	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian				0,00
8.1.08.01.08.0044	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas				0,00
8.1.08.01.08.0045	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi				0,00
8.1.08.01.08.0046	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan				0,00
8.1.08.01.08.0047	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan				0,00
8.1.08.01.08.0048	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi				0,00

8.1.08.01.08.0049	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika				0,00
8.1.08.01.08.0050	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang				0,00
8.1.08.01.08.0051	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia				0,00
8.1.08.01.08.0052	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri				0,00
8.1.08.01.08.0054	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan				0,00
8.1.08.01.08.0055	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis				0,00
8.1.08.01.08.0056	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain				0,00
8.1.08.01.08.0061	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi				0,00
8.1.08.01.08.0064	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya				0,00
8.1.08.01.08.0065	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-Analytical Instrument				0,00
8.1.08.01.08.0067	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-General Laboratory Tool				0,00
8.1.08.01.08.0068	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-Glassware Plastic/Utensils				0,00
8.1.08.01.08.0069	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-Laboratory Safety Equipment				0,00
8.1.08.01.08.0071	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia				0,00
8.1.08.01.08.0072	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika				0,00
8.1.08.01.08.0073	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar				0,00
8.1.08.01.08.0074	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan				0,00
8.1.08.01.08.0075	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah				0,00
8.1.08.01.08.0076	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Atas				0,00
8.1.08.01.08.0077	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPS				0,00
8.1.08.01.08.0078	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Agama				0,00

8.1.08.01.08.0079	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan				0,00
8.1.08.01.08.0080	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian				0,00
8.1.08.01.08.0081	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga				0,00
8.1.08.01.08.0082	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN				0,00
8.1.08.01.08.0085	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK				0,00
8.1.08.01.08.0086	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya				0,00
8.1.08.01.08.0088	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Modular Counting And Scientific Electronic				0,00
8.1.08.01.08.0089	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Assembly/Counting System				0,00
8.1.08.01.08.0090	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display				0,00
8.1.08.01.08.0091	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply				0,00
8.1.08.01.08.0092	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Measuring/Testing Device				0,00
8.1.08.01.08.0096	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya				0,00
8.1.08.01.08.0097	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan				0,00
8.1.08.01.08.0098	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja				0,00
8.1.08.01.08.0099	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan				0,00
8.1.08.01.08.0100	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Meteorological Equipment				0,00
8.1.08.01.08.0108	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara				0,00
8.1.08.01.08.0110	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan				0,00
8.1.08.01.08.0111	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang				0,00
8.1.08.01.08.0115	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Data Acquisition and Analyzing System				0,00

8.1.08.01.08.0117	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Overhead Cranes				0,00
8.1.08.01.08.0118	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum				0,00
8.1.08.01.08.0119	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Model Ship Workshop				0,00
8.1.08.01.08.0126	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-MOB				0,00
8.1.08.01.08.0130	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator				0,00
8.1.08.01.08.0131	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik dan Akustik				0,00
8.1.08.01.08.0132	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik				0,00
8.1.08.01.08.0137	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran				0,00
8.1.08.01.09	Beban Penyusutan	0,00			0,00
8.1.08.01.09.0010	Beban Penyusutan Senjata Api-Senjata Lain-Lain				0,00
8.1.08.01.09.0011	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan				0,00
8.1.08.01.09.0012	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Non Senjata Api				0,00
8.1.08.01.09.0013	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Penjinak Bahan Peledak (Aljihandak)				0,00
8.1.08.01.09.0014	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Nuklir, Biologi Dan Kimia				0,00
8.1.08.01.09.0019	Beban Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alat Dalmas/Alat Dakhura				0,00
8.1.08.01.09.0020	Beban Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alat Wanteror (Perlawanan Teror)				0,00
8.1.08.01.09.0022	Beban Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alsus Lantas				0,00
8.1.08.01.09.0023	Beban Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alsus Reserse				0,00
8.1.08.01.09.0024	Beban Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alsus Fotografi Kepolisian				0,00
8.1.08.01.09.0025	Beban Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alsus Daktiloskopi				0,00
8.1.08.01.09.0026	Beban Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Instrumen Analisis Laboratorium Forensik				0,00
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	0,00			142.579.218,00
8.1.08.01.10.0001	Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan				0,00
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer		49.177.373,00		49.177.373,00
8.1.08.01.10.0003	Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya				0,00
8.1.08.01.10.0004	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe		2.500.000,00		2.500.000,00

8.1.08.01.10.0005	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer				0,00
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer		32.526.845,00		32.526.845,00
8.1.08.01.10.0007	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan		58.375.000,00		58.375.000,00
8.1.08.01.10.0008	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya				0,00
8.1.08.01.13	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00			0,00
8.1.08.01.13.0002	Beban Penyusutan Sumur-Sumur Pemboran				0,00
8.1.08.01.15	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	0,00			0,00
8.1.08.01.15.0004	Beban Penyusutan Alat Pelindung-Baju Pengaman				0,00
8.1.08.01.15.0010	Beban Penyusutan Alat SAR-Alat Penolong				0,00
8.1.08.01.15.0011	Beban Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian				0,00
8.1.08.01.15.0012	Beban Penyusutan Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air				0,00
8.1.08.01.15.0019	Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Fasleyktrik				0,00
8.1.08.01.17	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	0,00			0,00
8.1.08.01.17.0019	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment For Liquid				0,00
8.1.08.01.18	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	0,00			0,00
8.1.08.01.18.0001	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar				0,00
8.1.08.01.18.0002	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar				0,00
8.1.08.01.18.0003	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya				0,00
8.1.08.01.19	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	0,00			0,00
8.1.08.01.19.0001	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik				0,00
8.1.08.01.19.0002	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan				0,00
8.1.08.01.19.0003	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Senam				0,00
8.1.08.01.19.0004	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air				0,00
8.1.08.01.19.0006	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya				0,00
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00			51.410.550,00
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	0,00			50.850.550,00
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		35.042.382,00		35.042.382,00
8.1.08.02.01.0002	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang		932.000,00		932.000,00
8.1.08.02.01.0003	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar				0,00

8.1.08.02.01.0004	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi				0,00
8.1.08.02.01.0005	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium				0,00
8.1.08.02.01.0006	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan				0,00
8.1.08.02.01.0007	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium				0,00
8.1.08.02.01.0008	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah		225.380,00		225.380,00
8.1.08.02.01.0009	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan				0,00
8.1.08.02.01.0010	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan				0,00
8.1.08.02.01.0011	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga				0,00
8.1.08.02.01.0012	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar				0,00
8.1.08.02.01.0013	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga				0,00
8.1.08.02.01.0014	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool		2.055.766,00		2.055.766,00
8.1.08.02.01.0015	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan				0,00
8.1.08.02.01.0016	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan				0,00
8.1.08.02.01.0018	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara				0,00
8.1.08.02.01.0019	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan				0,00
8.1.08.02.01.0025	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka				0,00
8.1.08.02.01.0028	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri		12.595.022,00		12.595.022,00
8.1.08.02.01.0029	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/ Perikanan				0,00
8.1.08.02.01.0030	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya				0,00
8.1.08.02.01.0032	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum				0,00
8.1.08.02.01.0033	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir				0,00
8.1.08.02.01.0036	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman				0,00
8.1.08.02.01.0038	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I				0,00

8.1.08.02.01.0039	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II				0,00
8.1.08.02.01.0040	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III				0,00
8.1.08.02.01.0041	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan				0,00
8.1.08.02.01.0042	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Asrama				0,00
8.1.08.02.01.0045	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun				0,00
8.1.08.02.01.0049	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun				0,00
8.1.08.02.02	Beban Penyusutan Monumen	0,00			0,00
8.1.08.02.02.0002	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti-Tugu				0,00
8.1.08.02.02.0003	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti-Bangunan Peninggalan				0,00
8.1.08.02.02.0004	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya				0,00
8.1.08.02.03	Beban Penyusutan Bangunan Menara	0,00			0,00
8.1.08.02.03.0003	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi				0,00
8.1.08.02.04	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00			560.000,00
8.1.08.02.04.0001	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi				0,00
8.1.08.02.04.0003	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya				0,00
8.1.08.02.04.0004	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Pagar		560.000,00		560.000,00
8.1.08.02.04.0005	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya				0,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00			7.371.243,00
8.1.08.03.01	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	0,00			0,00
8.1.08.03.01.0001	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Nasional				0,00
8.1.08.03.01.0003	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten				0,00
8.1.08.03.01.0005	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Desa				0,00
8.1.08.03.01.0009	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Khusus				0,00
8.1.08.03.01.0010	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya				0,00
8.1.08.03.01.0015	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa				0,00
8.1.08.03.01.0019	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus				0,00
8.1.08.03.01.0020	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan Penyeberangan				0,00
8.1.08.03.01.0021	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal				0,00
8.1.08.03.01.0023	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan Lainnya				0,00
8.1.08.03.02	Beban Penyusutan Bangunan Air	0,00			0,00
8.1.08.03.02.0001	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi				0,00

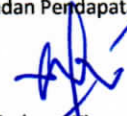
8.1.08.03.02.0002	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi				0,00
8.1.08.03.02.0003	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi				0,00
8.1.08.03.02.0004	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi				0,00
8.1.08.03.02.0006	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi				0,00
8.1.08.03.02.0009	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut				0,00
8.1.08.03.02.0012	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut				0,00
8.1.08.03.02.0013	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut				0,00
8.1.08.03.02.0017	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa				0,00
8.1.08.03.02.0025	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam				0,00
8.1.08.03.02.0028	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai				0,00
8.1.08.03.02.0029	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai				0,00
8.1.08.03.02.0030	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai				0,00
8.1.08.03.02.0033	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air				0,00
8.1.08.03.02.0034	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air				0,00
8.1.08.03.02.0036	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air				0,00
8.1.08.03.02.0037	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air				0,00
8.1.08.03.02.0040	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku				0,00
8.1.08.03.02.0044	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku				0,00
8.1.08.03.02.0045	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya				0,00

8.1.08.03.02.0050	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor				0,00
8.1.08.03.03	Beban Penyusutan Instalasi	0,00			919.992,00
8.1.08.03.03.0001	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan				0,00
8.1.08.03.03.0002	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air				0,00
8.1.08.03.03.0004	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal				0,00
8.1.08.03.03.0005	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya		919.992,00		919.992,00
8.1.08.03.03.0006	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik				0,00
8.1.08.03.03.0012	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah				0,00
8.1.08.03.03.0018	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)				0,00
8.1.08.03.03.0019	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)				0,00
8.1.08.03.03.0023	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)				0,00
8.1.08.03.03.0026	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)				0,00
8.1.08.03.03.0029	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya				0,00
8.1.08.03.03.0030	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk				0,00
8.1.08.03.03.0031	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi				0,00
8.1.08.03.03.0032	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik				0,00
8.1.08.03.03.0034	Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat				0,00
8.1.08.03.03.0037	Beban Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas				0,00
8.1.08.03.03.0044	Beban Penyusutan Instalasi Lain-Instalasi Lain				0,00
8.1.08.03.04	Beban Penyusutan Jaringan	0,00			6.451.251,00
8.1.08.03.04.0007	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi		6.451.251,00		6.451.251,00
8.1.08.03.04.0008	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya				0,00
8.1.08.03.04.0009	Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon diatas Tanah				0,00
8.1.08.03.04.0015	Beban Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi				0,00
8.1.08.09	Beban Penyusutan Properti Investasi	0,00			0,00
8.1.08.09.01	Beban Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan	0,00			0,00

8.1.08.09.01.0001	Beban Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung				0,00
	JUMLAH BEBAN Penyusutan dan Amortisasi	0,00			342.691.687,00
					0,00
8.3	BEBAN TRANSFER	0,00			0,00
8.3.01	Beban Bagi Hasil	0,00			0,00
8.3.01.01	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	0,00			0,00
8.3.01.01.03	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	0,00			0,00
8.3.01.01.03.0001	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa				0,00
8.3.01.02	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0,00			0,00
8.3.01.02.01	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0,00			0,00
8.3.01.02.01.0001	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa				0,00
8.3.02	Beban Bantuan Keuangan	0,00			0,00
8.3.02.05	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	0,00			0,00
8.3.02.05.01	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	0,00			0,00
8.3.02.05.01.0003	Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa				0,00
8.3.02.05.02	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	0,00			0,00
8.3.02.05.02.0003	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa				0,00
	JUMLAH BEBAN TRANSFER	0,00			0,00
					0,00
8.2	BEBAN TIDAK TERDUGA	0,00			0,00
8.2.01	Beban Tidak Terduga	0,00			0,00
8.2.01.01	Beban Tidak Terduga	0,00			0,00
8.2.01.01.01	Beban Tidak Terduga	0,00			0,00
8.2.01.01.01.0001	Beban Tidak Terduga				0,00
	JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA	0,00			0,00
	JUMLAH BEBAN	16.561.653.444,00			28.228.421.134,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	167.299.084.042,12			164.411.260.047,37
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0,00			576.677.888,48
7.4.03	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00			576.677.888,48
7.4.03.01	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00			576.677.888,48
7.4.03.01.01	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00			576.677.888,48
7.4.03.01.01.0001	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO			576.677.888,48	576.677.888,48
	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0,00			576.677.888,48
8.4	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0,00			0,00
8.4.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00			0,00
8.4.03.01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00			0,00
8.4.03.01.01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00			0,00
8.4.03.01.01.0001	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO				0,00

	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0,00		0,00
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00		576.677.888,48
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	167.299.084.042,12		164.987.937.935,85
POS LUAR BIASA				
8.5	BEBAN LUAR BIASA	0		0
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0		0
	SURPLUS/DEFISIT-LO	167.299.084.042,12		164.987.937.935,85

Kab. Lombok Tengah, 31 Desember 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah



Baiq Aluh Windayu Wiranom, S.E.,M.M.
NIP. 197307291997032008



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023



NO	Uraian	LPE 2024	PENYESUAIAN		LPE 2023
			D	K	
1	EKUITAS AWAL	40.035.134.763,22			44.032.719.876,57
2	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	164.987.937.935,85			130.733.441.861,93
3	RK PPKD	(166.608.612.192,12)		- 166.608.612.192,12	- 134.731.026.975,28
4	RK SKPD				
5	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	-			-
5.1	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-			-
	Persediaan Bahan Pakai Habis	-			
	Persediaan Bahan/ Material	-			
	Persediaan Barang Lainnya	-			
5.2	KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	-			-
	Koreksi Nilai Aset Tetap	-			-
	Tanah	-			
	Peralatan dan Mesin	-			
	Gedung dan Bangunan	-			
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-			-
	Aset Tetap Lainnya	-			
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-			-
	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-			-
	Peralatan dan Mesin	-			
	Gedung dan Bangunan	-			
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-			-
	Akumulasi Penyusutan	-			-
5.2	LAIN-LAIN	-			-
	Koreksi Nilai Kas	-			-
	Kas di Kas Daerah	-			
	Kas di Bendahara Penerimaan	-			
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-			
	Kas di BLUD	-			
	kas lainnya	-			
	Setara Kas	-			
	Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)	-			
	Kas di Bendahara BOS	-			
	Koreksi Nilai Piutang	-			-
	Piutang Pajak	-			
	Penyisihan Piutang Pajak	-			
	Piutang Retribusi	-			

	Penyisihan Piutang Retribusi	-			
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekay Daerah	-			
	Piutang Lain2 PAD	-			
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD	-			
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-			
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-			
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-			
	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-			
	Piutang TGR	-			
	Penyisihan Piutang TGR	-			
	Piutang Lain-lain Lainnya	-			
	Penyisihan Piutang Lain-lain Lainnya	-			
	Koreksi Nilai Beban Dibayar Dimuka	-			-
	Jasa dibayar dimuka	-			
	Barang dibayar dimuka	-			
	Koreksi Nilai Investasi	-			-
	Investasi Permanen	-			
	Investasi Nonpermanen	-			
	Penyisihan Investasi Non Permanen	-			
	Koreksi Nilai Aset Lainnya	-			-
	Tagihan Jangka Panjang -TGR	-			
	Penyisihan TGR	-			
	Kemitraan dengan Pihak III	-			
	Aset Tidak Berwujud	-			
	Aset dalam proses TGR	-			
	aset rusak berat	-			
	Akumulasi penyusutan	-			

	Koreksi Nilai Kewajiban	-			-
	Utang PFK	-			
	Utang Bunga	-			
	Bagian Utang Jangka Panjang	-			
	Pendapatan diterima dimuka	-			
	Utang Barang dan Jasa	-			
	Utang Belanja Pegawai	-			
	Utang Belanja Modal	-			
	Utang bansos	-			
	Utang Transfer	-			
	Bagian Lancar Utang Jk Pjg	-			
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-			
	Koreksi Nilai Aset Non APBD				
6	EKUITAS AKHIR	38.414.460.506,95			40.035.134.763,22

Kab. Lombok Tengah, 31 Desember 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah



Baiq Aluh Windayu Wiranom, S.E.,M.M.

NIP. 197307291997032008



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JURNAL PENYESUAIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024



No	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
1		RK	3.909.000,00	-
	1.1.01.02.01	Kas Bendahara Penerimaan	-	3.909.000,00
		Jurnal Penyesuaian Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2023		
1	2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	651.005,00	-
	8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	-	651.005,00
		Jurnal Penyesuaian atas pembayaran utang Barang dan Jasa Th 2023 di Tahun 2024		
2	8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	591.304,00	-
	8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.380.362,00	
	2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	591.304,00
	2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		1.380.362,00
		Jurnal Penyesuaian atas pengakuan adanya utang Barang dan Jasa Th 2024 dan Belum di Bayar sd Desember 2024 yang akan di bayarkan di tahun berikutnya		
3	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	178.122.398,00	-
	8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	-	178.122.398,00
		Jurnal Penyesuaian atas pembayaran utang TPP Th 2023 yang dibayarkan Tahun 2024		
4	8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	169.253.974,00	-
	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	-	169.253.974,00
		Jurnal Penyesuaian atas pengakuan adanya utang TPP Th 2024 dan Belum di Bayar sd Desember 2024 yang akan di bayarkan di tahun berikutnya		
5	2.1.06.01.01.0001	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	1.381.080,00	-
	2.1.06.01.01.0003	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	193.350,00	-
	2.1.06.01.01.0015	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	72,00	-
	2.1.06.01.05.0038	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	1.520.908.263,00	
	8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	-	1.381.080,00
	8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	-	193.350,00
	8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	-	72,00
	8.1.01.03.01.0006	BEBAN Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel		387.730.883,00
	8.1.01.03.01.0007	BEBAN Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran		270.186.036,00
	8.1.01.03.01.0009	BEBAN Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame		36.772.414,00
	8.1.01.03.01.0010	BEBAN Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan		413.334.155,00
	8.1.01.03.01.0012	BEBAN Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah		4.130.595,00

	8.1.01.03.01.0014	BEBAN Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam		18.754.180,00
	8.1.01.03.01.0016	BEBAN Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak BPHTB		390.000.000,00
		Jurnal Penyesuaian atas pembayaran utang gaji dan tunjangan pegawai Th 2023 yang dibayarkan Tahun 2024		
6	8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	223.600,00	
	8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	111.800,00	
	8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	9.391,00	
	2.1.06.01.01.0001	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS		223.600,00
	2.1.06.01.01.0003	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS		111.800,00
	2.1.06.01.03.0050	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan		9.391,00
		Jurnal Penyesuaian atas pengakuan adanya utang gaji dan tunjangan pegawai Th 2024 dan Belum di Bayar sd Desember 2024 yang akan di bayarkan di tahun berikutnya		
8	8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	281.621.683,00	-
	1.1.12.01.03.0003	Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	281.621.683,00
		Jurnal Penyesuaian sisa persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (Kuasi) Tahun 2023		
8	1.1.12.01.03.0003	Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	285.282.259,00	-
	8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	285.282.259,00
		Jurnal Penyesuaian sisa persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (Kuasi) Tahun 2024		
9	8.1.08.01.02.0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	63.428.572,00	
	8.1.08.01.02.0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	37.751.040,00	
	8.1.08.01.03.0001	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	208.333,00	
	8.1.08.01.03.0002	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	75.000,00	
	8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	6.011.668,00	
	8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.043.016,00	
	8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	13.922.041,00	
	8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.047.197,00	
	8.1.08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	1.240.000,00	
	8.1.08.01.05.0019	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	2.415.000,00	
	8.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	229.600,00	
	8.1.08.01.08.0017	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	948.375,00	
	8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	49.177.373,00	
	8.1.08.01.10.0004	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	2.500.000,00	
	8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	32.526.845,00	
	8.1.08.01.10.0007	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	58.375.000,00	
	1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		283.899.060,00
		Jurnal Penyesuaian atas pengakuan beban penyusutan aset tetap peralatan dan mesin		
	8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	35.042.382,00	
	8.1.08.02.01.0002	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	932.000,00	
##	8.1.08.02.01.0008	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	225.380,00	
	8.1.08.02.01.0014	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	2.055.766,00	

8.1.08.02.01.0028	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri	12.595.022,00	
8.1.08.02.04.0004	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Pagar	560.000,00	
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		51.410.550,00
	Jurnal Penyesuaian atas pengakuan beban penyusutan aset tetap gedung dan bangunan		
8.1.08.03.03.0005	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	919.992,00	
8.1.08.03.04.0007	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	6.451.251,00	
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan atas pengakuan beban penyusutan aset tetap jala, irigasi dan jembatan		7.371.243,00
	Jurnal Penyesuaian atas pengakuan beban penyusutan aset tetap jalan, irigasi dan jembatan		
7.1.01.09.01.0001	Pendapatan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	23.176.481,67	-
1.1.03.09.01.0001	Piutang Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	-	23.176.481,67
	Jurnal Penyesuaian atas pembayaran piutang pajak reklame tahun 2023 di tahun 2024		
2.1.05.05.01.0001	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	687.737.595,92	-
7.1.01.09.01.0001	Pendapatan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	-	687.737.595,92
	Jurnal Penyesuaian atas pembayaran dimuka pajak reklame tahun 2024		
7.1.01.12.01.0001	Pendapatan Pajak Air Tanah-LO	14.415.214,00	-
1.1.03.12.01.0001	Piutang Pajak Air Tanah	-	14.415.214,00
	Jurnal Penyesuaian atas pembayaran piutang pajak air tanah 2023 di tahun 2024		
8.1.07.01.09.0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.015.718,75	
1.1.10.01.01.0102	Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron		1.015.718,75
1.1.10.01.01.0115	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	115.882,41	
7.4.03.01.01.0001	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		115.882,41
8.1.07.01.12.0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	112.981,00	
1.1.10.01.01.0115	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah		112.981,00
1.1.10.01.01.0115	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	72.076,07	
7.4.03.01.01.0001	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		72.076,07
	Jurnal Penyesuaian atas penyisihan piutang pajak tahun 2024		
1.1.03.15.01.0001	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	24.082.761.379,00	
7.1.01.15.01.0001	PBBP2-LO		24.082.761.379,00
	Jurnal Penyesuaian atas piutang pajak PBBP2 tahun 2024 berdasarkan SPPT yang terbit tahun 2024		
7.1.01.15.01.0001	PBBP2-LO	16.005.853.534,00	
1.1.03.15.01.0001	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)		16.005.853.534,00
	Jurnal Penyesuaian atas pembayaran piutang pajak PBBP2 dari tahun 1997 - tahun 2024		
8.1.07.01.15.0001	Beban Penyisihan Piutang PBBP2	12.452.583.159,58	
1.1.10.01.01.0154	Penyisihan Piutang PBBP2		12.452.583.159,58
1.1.10.01.01.0154	Penyisihan Piutang PBBP2	576.489.930,00	
7.4.03.01.01.0001	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		576.489.930,00

